



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN ELEMEN SPASIAL PADA GAGASAN
MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
DI PALABUHANRATU**

SKRIPSI

**SIWI AYUNING ATMAJI
0706269451**

**FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN ARSITEKTUR
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN ELEMEN SPASIAL PADA GAGASAN
MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
DI PALABUHANRATU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Arsitektur**

**SIWI AYUNING ATMAJI
0706269451**

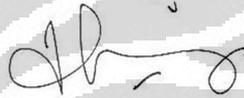
**FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN ARSITEKTUR
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SIWI AYUNING ATMAJI

NPM : 0706269451

Tanda Tangan : 

Tanggal : 25 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Siwi Ayuning Atmaji
NPM : 0706269451
Program Studi : Arsitektur
Judul Skripsi : Kajian Elemen Spasial Pada Gagasan Minapolitan
Perikanan Tangkap di Palabuhanratu

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dita Trisnawan S.T., M.Arch., STD

Penguji : Prof. Dr. Ir. Abimanyu Takdir Alamsyah, M.S

Penguji : Ir. Azrar Hadi Ph.D

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak dapat tergambarkan dalam kata-kata akan segala berkah dan izin Allah SWT selama penyelesaian skripsi satu tahun lamanya, meski selama proses dan hasil tidak sempurna namun penulis telah berusaha memberikan yang terbaik.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan berupa saran dan masukan, arahan, serta motivasi dari orang-orang yang sangat berjasa. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada;

1. Keluarga penulis (Bapak, Mama, dan Mas) yang selalu mendukung dengan doa yang tak pernah putus, diskusi-diskusi yang membuka mata dan memotivasi agar segera menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana.
2. Bapak **Dita Trisnawan S.T., M.Arch., STD** selaku dosen pembimbing skripsi selama dua semester yang telah banyak membantu dengan saran, masukan, kritikan, dan nasihat-nasihat membangun selama pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Abimanyu Takdir Alamsyah, M.S** sebagai dosen yang senantiasa merelakan waktunya dalam diskusi-diskusi kecil selama pengerjaan dan pinjaman buku-buku yang sangat membantu, sekaligus dosen penguji yang memberikan masukan, saran dan evaluasi hasil pengerjaan skripsi ini
4. Bapak **Ir. Azrar Hadi Ph.D** dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun sehingga dapat membuka wawasan baru untuk penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
5. Sahabat, teman, motivator sekaligus musuh. Terima kasih untuk semua diskusi, saran, kritik, hujatan, dan buku-buku yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita menunggu hari itu sebagai awal kehidupan baru dengan usaha, kerja keras, dan doa yang tak putus. Ketika jarak ratusan kilometer tidak jarang menjadi halangan.

6. Keluarga Bapak Edi dan Ibu Dian, staff Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang telah menerima dan menampung saya selama lima hari di Palabuhanratu layaknya anggota keluarga sendiri. Seluruh staff Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang sangat membantu. Dan segenap staff Kelurahan Palabuhanratu, Dinas Pekerjaan Umum Palabuhanratu.
7. Bapak Dr. Ir. Soebandono Diposaptono, M.Eng, selaku Direktur Pesisir dan Lautan Direktorat Jendral KP3K Kementrian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan buku serta masukan mengenai Minapolitan. Dan Staff-staff Direktorat Pesisir dan Lautan yang telah membantu dalam pengumpulan data.
8. Medina Azzahra Hadar, S.Ars dan Novi Dwi Aryani, S.Ars teman seperjuangan dan diskusi paling cerdas yang pernah saya kenal.
9. Seluruh teman Arsitektur 2007 untuk semua motivasi, dukungan, gurauan, ilmu-ilmu yang selalu mengucur dalam tiap pertemuan. Semoga ikatan keluarga 2007 selama empat tahun tidak sirna termakan waktu. Tuti Anshorsy dan Adhifah Rahayu, ditunggu wisuda bulan September 2012!
10. Teman-teman Arsitektur 2006, 2008, 2009, dan 2010 yang telah mewarnai kehidupan mahasiswa arsitektur saya. Dan teman-teman SOSMA FTUI 2008, MPM 2009,dan PPAM 2010. Terima kasih telah mengenalkan dunia teknik yang dinamis dan penuh huruhara.
11. Narasumber-narasumber yang telah menyediakan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
12. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siwi Ayuning Atmaji

NPM : 0706269451

Program Studi : Arsitektur

Departemen : Arsitektur

Fakultas : Teknik

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Kajian Elemen Spasial Pada Gagasan Minapolitan Perikanan Tangkap
di Palabuhanratu”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 25 Januari 2012

Yang menyatakan



(Siwi Ayuning Atmaji)

ABSTRAK

Nama : Siwi Ayuning Atmaji
Program Studi : Arsitektur
Judul : Kajian Elemen Spasial Pada Gagasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Palabuhanratu

Minapolitan atau kota berbasis sektor perikanan merupakan salah satu program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan dan produktivitas kawasan pesisir. Saat ini pemerintah sebatas menentukan definisi dan kriteria secara umum kawasan Minapolitan. Bagaimana elemen-elemen spasial pembentuk Minapolitan dapat terimplementasikan di Palabuhanratu sebagai *pilot project*. Pengamatan terhadap Palabuhanratu perlu dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen spasial kota dan Minapolitan perikanan tangkap. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pengamatan langsung di wilayah studi guna mengetahui kegiatan perikanan masyarakat Palabuhanratu. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa pola spasial Minapolitan kawasan Palabuhanratu sangat tergantung dengan kondisi geografis serta eksisting wilayah dan perbedaan kondisi terbangun di bagian Selatan dan Utara di Palabuhanratu. Keberadaan laut dan kegiatan perikanan tradisional masyarakat nelayan maupun kegiatan perikanan skala besar dipengaruhi oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai kawasan inti Minapolitan. Perbedaan kondisi terbangun bagian utara dan selatan Palabuhanratu dapat menciptakan kesenjangan pengembangan kawasan dan menghambat berkembangnya Minapolitan. Hal ini memunculkan kebutuhan akan sinergitas pembangunan dibagian utara dan selatan Palabuhanratu.

Kata kunci : minapolitan, elemen spasial, pesisir, nelayan

ABSTRACT

Name : Siwi Ayuning Atmaji
Study Program : Architecture
Title : Spatial Elements' Study of Minapolitan Idea's of Fisheries Based Palabuhanratu

Minapolitan or fisheries-based city sector is one of the main program of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries aimed to improve the quality of fishermen life and productivity of coastal zone. The government is currently determining the definition and criteria of Minapolitan in larger scope. This research tend to find how the spatial elements of Minapolitan can be implemented in Palabuhanratu as pilot projects. Observation of Palabuhanratu, Sukabumi needs to be done to determine the spatial elements of Minapolitan Palabuhanratu capture fisheries. The methods are direct observation in the study area to determine Palabuhanratu community fisheries activities. Based on observation, it is known that the spatial pattern of Minapolitan Palabuhanratu region depends on the geographic conditions and existing territories. The existence of ocean, traditional fishing activities of fishermen and large-scale fishing activity is influenced by the Pelabuhan Perikanan Nusantara as the core area of Minapolitan. Differences of northern and southern in Palabuhanratu can create gaps inhibit the development of the region and the development of Minapolitan. This condition raises the need for synergy development in the north and south Palabuhanratu.

Keyword : coastal, minapolitan, spatial elements, fishermen

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.6 Ruang Lingkup	5
1.7 Urutan Penulisan	5
1.8 Kerangka Penulisan	7
BAB 2 KAWASAN PESISIR KOTA DAN MINAPOLITAN	8
2.1 Definisi Pesisir	8
2.2 Kota Pesisir	10
2.2.1 Perkembangan Kawasan Pesisir Kota	10
2.2.2 Permukiman Pesisir dan Pola Permukiman	15
2.3 Minapolitan	19
2.3.1 Definisi Minapolitan	19
2.3.2 Kriteria Kawasan Minapolitan	20

2.3.3	Gambaran Umum Tata Ruang Kawasan Minapolitan	23
2.3.4	Kebijakan Minapolitan	24
2.4	Ruang Kegiatan Masyarakat Pesisir Nelayan Tangkap	25
2.4.1	Definisi Nelayan	25
2.4.2	Kebudayaan Masyarakat Nelayan	26
2.4.3	Karakteristik Nelayan Tangkap	27
2.4.4	Kegiatan Masyarakat Pesisir Nelayan Tangkap Berdasar Aspek Ruang-Waktu	28
BAB 3	STUDI KASUS KAWASAN PALABUHANRATU	30
3.1	Perkembangan Kawasan Palabuhanratu	30
3.2	Gambaran Umum Palabuhanratu	31
3.2.1	Kondisi Geografis	32
3.2.2	Penggunaan Lahan	33
3.2.3	Kependudukan	36
3.3	Permukiman Nelayan Cipatuguran	38
3.3.1	Nelayan Cipatuguran.....	38
3.3.2	Kondisi Sosial-Masyarakat Nelayan Cipatuguran	40
3.3.3	Rona Ruang Kegiatan Masyarakat Nelayan Cipatuguran	41
3.3.4	Kondisi Fisik Permukiman Nelayan Cipatuguran	44
3.4	Kawasan Inti Minapolitan Palabuhanratu (Pelabuhan Perikanan Nusantara)	49
3.4.1	Kondisi Umum Kawasan Inti Minapolitan	49
3.4.2	Pengembangan Rencana Induk Kawasan Inti Minapolitan Palabuhanratu.....	52
3.4.3	Sistem Operasional dan Jaringan	53
BAB 4	MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP PADA KAWASAN PESISIR KOTA PALABUHANRATU	54
4.1	Kondisi Fisik Kawasan Pesisir Palabuhan Ratu Kaitannya Pada Gagasan Minapolitan.....	54
4.1.1	Kondisi Fisik Terbangun Palabuhanratu	56

4.1.2 Kondisi Prmukina di Kawasan Pesisir Palabuhanratu, Cipatuguran	62
4.2 Kegiatan Perikanan Palabuhanratu	68
4.2.1 Nelayan Tangkap Harian	69
4.2.2 Nelayan Buruh Palabuhanratu	79
4.2.3 Infrastruktur sebagai Penunjang Kegiatan Perikanan Bagi Minapolitan	83
4.3 Kesimpulan Pembahasan	85
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
Daftar Pustaka	90

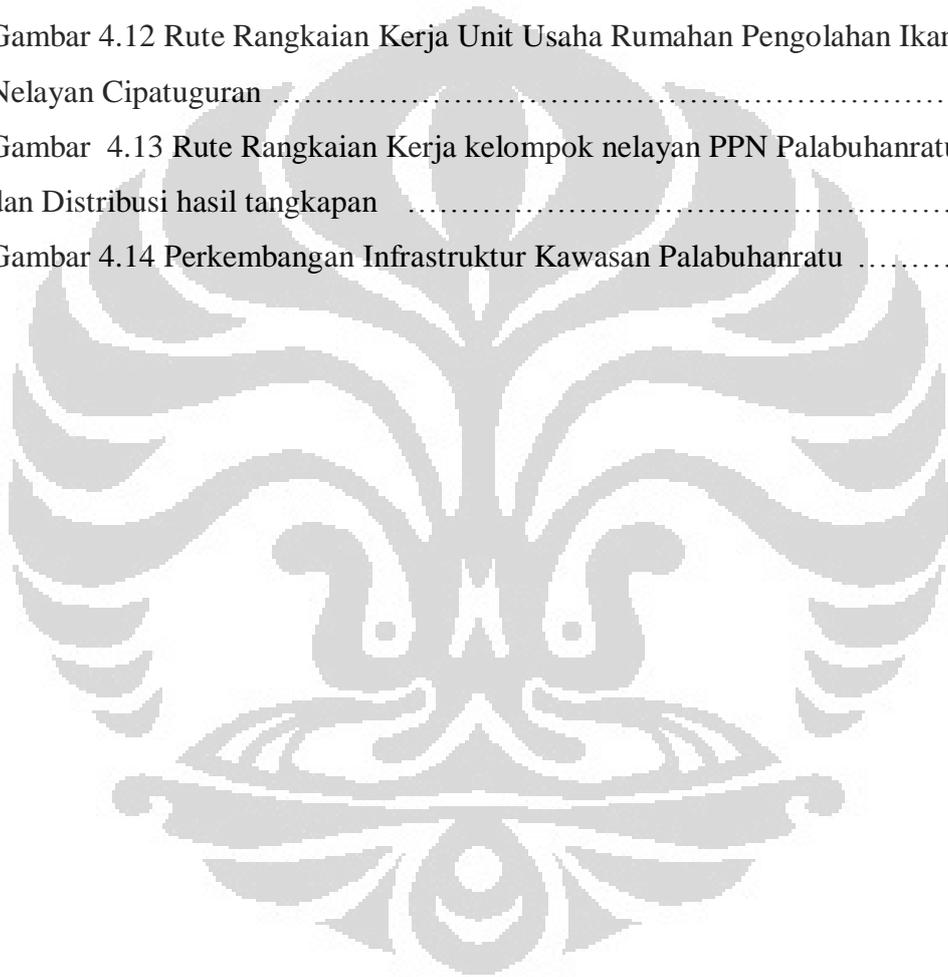


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lima Elemen Ekistics: pengoptimalan kualitas hubungan antara manusia dengan lingkungannya	11
Gambar 2.2 Pola Kawasan Tepi Air. A. Pola Linier; B. Pola Radial; C. Pola Konsentrik; D. Pola Bercabang (Branch)	14
Gambar 2.3 Pola Permukiman Nelayan. 1. Sub Kelompok Komunitas; 2. Saling Berhadapan (face to face)	16
Gambar 2.4 Struktur Ruang Permukiman Nelayan. 1. Linier; 2. Mengelompok; 3. Kombinasi	16
Gambar 2.5 Pola Perkembangan Daerah Pesisir	18
Gambar 2.6 Pola Perkembangan Daerah Terbangun Di Kawasan Pesisir	18
Gambar 2.7 Master Plan Pemanfaatan Ruang Dan Pengembangan Kawasan Minapolitan - Bagian RTRW Kabupaten	23
Gambar 2.8 Contoh Draft Zonasi Ruang Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap	24
Gambar 3.1 Peta Administratif Kelurahan Palabuhanratu	32
Gambar 3.2 Visualisasi Foto Udara Palabuhanratu	33
Gambar 3.3 Peruntukan Fungsi Bangunan	34
Gambar 3.4 Atas: Panorama Jalan Siliwangi, Deretan Ruko. Bawah: Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pasar Palabuhanratu.....	35
Gambar 3.5 Kantor Polres Sukabumi	35
Gambar 3.6 Struktur Kawasan Palabuhanratu	36
Gambar 3.7 Tapak yang diamati meliputi kawasan PPNP hingga Kampung Cipatuguran	38
Gambar 3.8 Struktur Kawasan Cipatuguran	40
Gambar 3.9 Kegiatan Masyarakat Nelayan Cipatuguran. Kiri: Aktivitas Masyarakat di TPI; Kanan: Tempat Melabuhkan Perahu-Perahu Nelayan	42
Gambar 3.10 Pelataran rumah sebagai tempat menyimpan dan memperbaiki peralatan melaut	43

Gambar 3.11 Tempat Pendaratan Ikan sekaligus terjadi jual-beli hasil tangkapan ikan	43
Gambar 3.12 Permukiman Nelayan Cipatuguran	44
Gambar 3.13 Figure Ground Kampung Cipatuguran	45
Gambar 3.14 Tata letak rumah permukiman Kampung Cipatuguran sebelum berubah	46
Gambar 3.15 Foto sebelah kiri rumah salah satu warga yang belum direnovasi. Foto sebelah kanan rumah warga telah direnovasi	46
Gambar 3.16 Denah rumah salah satu penduduk yang telah direnovasi sebagian (menggabungkan dua rumah asli)	47
Gambar 3.17 Foto kiri: Kondisi eksisting permukiman dan orientasi rumah. Foto kanan: Rumah sekaligus tempat usaha	47
Gambar 3.18 Kondisi Jalan Lingkungan Permukiman Nelayan Cipatuguran	48
Gambar 3.19 Fasilitas Umum dan Sosial serta Ruang Terbuka berkegiatan masyarakat setempat. Kiri-Kanan: Toilet Umum, Masjid, Bale-bale	48
Gambar 3.20 Lokasi Kawasan Inti Minapolitan	49
Gambar 3.21 Zonasi Kawasan Inti Minapolitan Palabuhanratu	50
Gambar 3.22 Kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan (kiri), dan kegiatan dalam pasar ikan (kanan)	51
Gambar 3.23 Rencana Pengembangan Kawasan Inti Minapolitan Palabuhanratu	52
Gambar 3.24 Peta Wilayah Kerja Darat dan Laut Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	53
Gambar 4.1 Kawasan Observasi Penulisan Skripsi, Palabuhanratu	58
Gambar 4.2 Aktivitas kegiatan Kawasan Palabuhanratu	59
Gambar 4.3 Marka jalan lokasi evakuasi bencana dan plang peringatan bencana	62
Gambar 4.4 Kawasan Cipatuguran	62
Gambar 4.5 Perubahan Fungsi Lahan Kawasan Pesisir	64
Gambar 4.6 Pola Permukiman Cipatuguran	66

Gambar 4.7 Spasial Permukiman Cipatuguran	67
Gambar 4.8 Suasana ruang pantai Cipatuguran	71
Gambar 4.9 Garis Pantai sepanjang Cipatuguran hingga PPN Palabuhanratu	75
Gambar 4.10 Zoom out A Rute Penangkapan Ikan dan Distribusi Hasil Tangkapan dari Cipatuguran	76
Gambar 4.11 Zoom out B. Rute Penangkapan Ikan dari Cipatuguran menuju PPN Palabuhanratu dan Distribusi Hasil Tangkapan.	77
Gambar 4.12 Rute Rangkaian Kerja Unit Usaha Rumahan Pengolahan Ikan Nelayan Cipatuguran	78
Gambar 4.13 Rute Rangkaian Kerja kelompok nelayan PPN Palabuhanratu dan Distribusi hasil tangkapan	81
Gambar 4.14 Perkembangan Infrastruktur Kawasan Palabuhanratu	83



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 2.1 Peraturan Mengenai Garis Sempadan Pantai dan Sungai	10
Tabel 3.1 Penggunaan Lahan Kelurahan Palabuhanratu	33
Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	37
Grafik 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	37



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Analisis Minapolitan	55
Diagram 4.2 Analisis Minapolitan dilihat dari kebutuhan tempat bernaung	61
Diagram 4.3 Analisis Minapolitan berdasarkan dari kegiatan perikanan nelayan	68
Diagram 4.4 Nelayan Harian Cipatuguran	69
Diagram 4.5 Analisis Rute Rangkaian Kerja Nelayan Cipatuguran	74
Diagram 4.6 Analisis Rute Rangkaian Kerja Nelayan Tangkap	75
Diagram 4.7 Analisis Rute Rangkaian Kerja Unit Rumah Usaha Pengasinan Ikan Nelayan Cipatuguran	78
Diagram 4.8 Nelayan Buruh Palabuhanratu	79
Diagram 4.9 Analisis Rute Rangkaian Kerja kelompok nelayan PPN Palabuhanratu	81
Diagram 4.10 Kegiatan perikanan nelayan harian Palabuhanratu dan kaitannya dengan elemen masyarakat pendukung kegiatan perikanan	86
Diagram 4.11 Kegiatan perikanan nelayan buruh Palabuhanratu dan kaitannya dengan elemen masyarakat yang mendukung kegiatan perikanan didalamnya	86

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara bahari yang terdiri dari laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dan berpotensi sebagai penggerak utama pengembangan wilayah dalam skala nasional. Garis pantai Indonesia yang lebih dari 81.000 km mendukung wilayah pesisir berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengintervensi dalam bentuk kebijakan dan penanganan khusus pengelolaan wilayah laut dan pesisir untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya laut dan pesisir bagi pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum secara luas.

440 kabupaten/kota dari total 495 kabupaten/kota di Indonesia berada di kawasan pesisir dan dari 67.439 desa di Indonesia, 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir¹. Namun kerap kali potensi wilayah pesisir dan lautan tidak digali dengan optimal, hingga kini *stereotype* wilayah pesisir sebagai kawasan tertinggal dan kumuh masih terjadi. Kondisi tersebut diperkuat dengan data 14,58 juta jiwa atau 90% dari 16,2 juta jiwa nelayan berada dalam kemiskinan².

Keberadaan permukiman nelayan sangat berkaitan erat dengan sumber penangkapan ikan, daerah distribusi hasil tangkapan dan daerah pantai. Daerah pantai harus mudah diakses oleh masyarakat umum dengan sistem transportasi dan infrastruktur yang memadai, didukung dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang menarik tanpa merusak tatanan ekologi dan keserasian lingkungannya (Eko Budihardjo, 1997). Pengelolaan serta pengendalian kawasan ini guna menciptakan keseimbangan alam dan keberlanjutan kawasan pesisir. Untuk mengembangkan kawasan pesisir perlu pembangunan dan perbaikan infrastruktur utama dan pendukung di permukiman nelayan (Dahuri, 2001).

¹ Disampaikan oleh Ditjen KP3K KKP pada saat Workshop Nasional Mitigasi Bencana Tsunami April 2011

² Harian Antara dalam Burhanuddin, 2011

Minapolitan merupakan salah satu intervensi kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dimulai pada tahun 2009 sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya nelayan) dan produktivitas kawasan pesisir. Program Minapolitan bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan (*hinterland*) yang dikembangkan tidak saja budidaya (*on farm*) tetapi juga pengolahan dan pemasaran (*off farm*) seperti sarana perikanan dan jasa penunjang lainnya.

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi³. Minapolitan merupakan suatu gambaran kawasan kota dengan aktivitas ekonomi utama dari usaha perikanan, dari hulu sampai hilir. Pengembangan kawasan Minapolitan akan mencakup kegiatan produksi, pengolahan, serta pemasaran produk perikanan dan kelautan.

Kegiatan perikanan yang terintegrasi akan mendukung berjalannya gagasan Minapolitan di Palabuhanratu, namun kini kebijakan yang ada apakah dapat direalisasikan dengan baik bila pengkajian mengenai struktur kota pesisir yang didominasi kegiatan perikanan tidak dilakukan dengan baik sebelum pembentukan sebuah Kota Perikanan. Palabuhanratu sebagai salah satu wilayah yang ditetapkan menjadi *pilot project* Minapolitan khususnya Perikanan Tangkap memang memiliki potensi yang sangat besar dalam kegiatan perikanan dalam kehidupan masyarakat nelayan. Daya dukung infrastruktur yang cukup memadai dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara yang menyumbangkan komoditas ekspor ikan tuna di Indonesia. Kembali pada tujuan utama Minapolitan diadakan adalah untuk menyejahterakan masyarakat perikanan, bertolak pada tujuan itulah penulis berusaha mengkaji kegiatan perikanan Minapolitan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan

³ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2009

pendekatan melalui elemen-elemen spasial dan penataan Minapolitan yang mampu menjawab tujuan utama sebuah Minapolitan.

1.2 Rumusan Masalah

Kementrian Kelautan dan Perikanan yang telah mengagas Minapolitan sebagai sebuah kota yang menunjang kegiatan perikanan telah menentukan kebijakan mengenai kriteria-kriteria kawasan yang layak dikembangkan menjadi kawasan Minapolitan, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai pola spasial dan elemen-elemennya dalam Minapolitan untuk menunjang kegiatan perikanan. Dari hal tersebut maka timbul pertanyaan-pertanyaan dalam penulisan skripsi ini;

1. Bagaimana interaksi ruang yang terjadi dalam kegiatan perikanan di kawasan Palabuhanratu termasuk pada permukiman nelayan ?
2. Bagaimana keterkaitan hasil temuan elemen-elemen spasial kegiatan perikanan pada Palabuhanratu dengan kriteria Minapolitan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan ?
3. Apa saja elemen-elemen spasial yang membentuk Minapolitan perikanan tangkap Palabuhanratu ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui kegiatan perikanan yang saling mempengaruhi ruang-ruang interaksi hingga tercipta pola spasial Minapolitan perikanan tangkap
2. Menemukan keselarasan antara kondisi nyata di Palabuhanratu dengan kriteria kawasan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan
3. Dapat mengetahui elemen-elemen spasial apa saja yang sebaiknya ada di Minapolitan perikanan tangkap Palabuhanratu

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi;

1. Kepentingan ilmu pengetahuan sebagai upaya pengkayaan terhadap ilmu arsitektur, khususnya menyangkut konsep pembentukan pola ruang kawasan dan kota pesisir, terutama suatu lingkungan kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap khususnya Kota Palabuhanratu sebagai kawasan Minapolitan pertama.
2. Pemerintah dan masyarakat umum sebagai masukan bagi penentu kebijakan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan pesisir berdasarkan karakteristik kawasan Minapolitan yang bersangkutan. Selain itu, hasil penulisan sangat bermanfaat bagi perumusan konsep dan pendekatan yang akan diterapkan pada perencanaan dan perancangan suatu lingkungan kota pesisir.
3. Kepentingan hasil penulisan ini berpotensi untuk dijadikan penelitian lanjutan karena hingga penulisan ini selesai gagasan Minapolitan masih dimatangkan dalam tataran konseptual.

1.6 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan berupa analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dari data primer dan data sekunder yang didapatkan.

1 Pengumpulan Data Wilayah Studi (data primer)

Proses pengambilan data secara langsung di lapangan guna mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- Observasi
Pengamatan langsung di wilayah studi melalui observasi wilayah serta mengumpulkan pendapat penduduk untuk mengetahui fenomena-fenomena yang ada, kegiatan penduduk dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir serta pengembangan gagasan Minapolitan di Palabuhanratu.
- Rekaman visual wilayah studi

Menampilkan foto, video, maupun pencitraan peta untuk memperkuat fakta yang ada mengenai karakteristik Wilayah Pesisir Palabuhanratu.

2 Pengumpulan Penelusuran Literatur (data sekunder)

Menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari penelitian sebelumnya. Literatur yang digunakan, yaitu diantaranya: laporan penelitian, skripsi, tesis, makalah, media internet, media edukasi, berbagai literatur yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan topik pembahasan. Kunjungan ke institusi pemerintahab terkait guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

1.7 Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah studi ini mengambil kawasan Palabuhanratu, Sukabumi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.32/MEN/2010 yang menetapkan 197 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi sebagai daerah pengembangan kawasan Minapolitan.

1.8 Urutan Penulisan

Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Studi, Perumusan Masalah, Batasan Masalah Kajian, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan, Metodologi Penulisan, dan Ruang Lingkup Kajian.

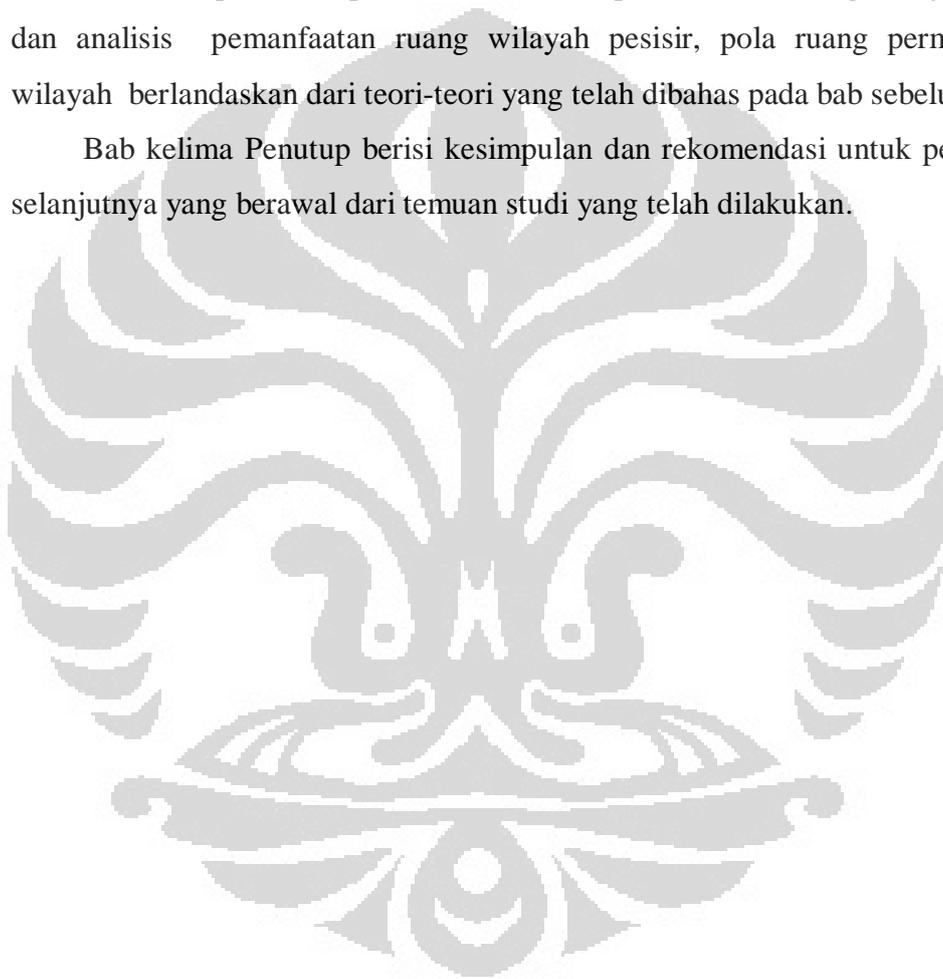
Bab kedua merupakan Landasan Teori yang berisi kajian literatur dan tinjauan teoritis yang terkait dalam kajian dan akan dijadikan sebagai dasar acuan dalam pembahasan penataan ruang wilayah pesisir dengan pendekatan dari definisi tentang kota, ruang kota, perkotaan pesisir, dan kehidupan nelayan dalam kawasan pesisir. Membahas Minapolitan yang terdiri dari definisi umum

Minapolitan, karakteristik serta kriteria kawasan Minapolitan, dan Minapolitan berdasarkan pemanfaatan ruang.

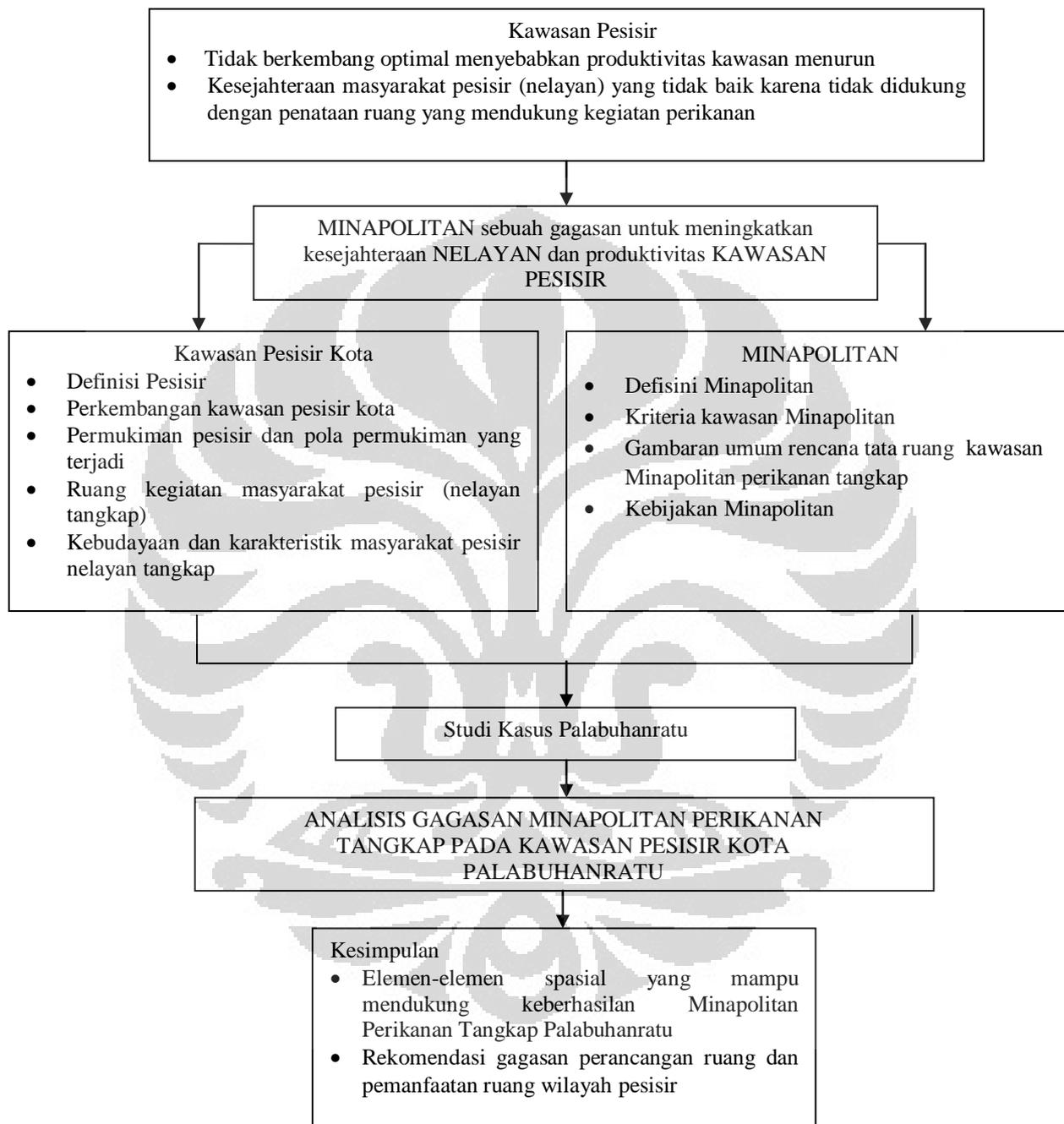
Bab ketiga Tinjauan Wilayah Studi berisi uraian singkat mengenai kondisi wilayah studi, mencakup karakteristik fisik wilayah, aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat dengan lebih mengarah pada aspek keruangan permukiman dan rencana tata ruang yang saat ini berlaku di wilayah studi.

Bab keempat berisi pembahasan terhadap kondisi eksisting wilayah studi dan analisis pemanfaatan ruang wilayah pesisir, pola ruang permukiman wilayah berlandaskan dari teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya

Bab kelima Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berawal dari temuan studi yang telah dilakukan.



1.9 Kerangka Penulisan



BAB 2

KAWASAN PESISIR KOTA DAN MINAPOLITAN

2.1 Definisi Pesisir

Soegiarto (dalam Dahuri, 2001) menjabarkan wilayah pesisir sebagai daerah bertemunya darat dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Sorenson dan Mc. Creary dalam Clark (1996: 1) *“The part of the land affected by it’s proximity to the land...any area in which processes depending on the interaction between land and sea are most intense”*. Daerah pesisir atau *coastal zone* merupakan daerah transisi yang dalam prosesnya bergantung pada interaksi antara daratan dan lautan karena kedekatannya dengan kedua area tersebut.

Wilayah pesisir, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, merupakan wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi dimana kearah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendeskripsikan bahwa wilayah pesisir meliputi ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya.

Penjelasan kawasan pesisir diatas memberikan suatu pengertian bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik karena berada dalam dua ruang yang saling mempengaruhi. Ruang daratan yang tidak lepas dari pengaruh lautan dan daratan yang mempengaruhi ruang lautan. Wilayah ini sangat rentan

terhadap perubahan, baik karena diakibatkan oleh aktivitas daerah hulu maupun karena aktivitas yang terjadi di wilayah pesisir itu sendiri. Sehingga pesisir memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan daratan ataupun lautan pada umumnya.

Secara garis besar wilayah pesisir dipilah berdasarkan pembagian zona-zona perlindungan karena karakter wilayah pesisir yang sangat dinamis. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.34/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002) terdapat tiga pembagian zona wilayah pesisir, yaitu:

1. Zona konservasi merupakan zona perlindungan yang didalamnya terdapat zona preservasi dan penyangga dapat dimanfaatkan secara terbatas yang didasarkan atas pengaturan yang ketat bagi pemanfaatan ruang.
2. Zona pemanfaatan (kawasan budidaya) merupakan zona pemanfaatan yang dapat dilakukan secara intensif namun pertimbangan daya dukung lingkungan tetap merupakan syarat utama, pada zona ini terdapat area-area yang merupakan zona perlindungan setempat seperti sempadan sungai dan pantai.
3. Zona tertentu merupakan kawasan khusus untuk kegiatan pertahanan dan militer, kawasan cepat berkembang.

Garis Sempadan Pantai digunakan untuk perlindungan kawasan pantai dari aktivitas yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai dan ekosistem pantai. Dalam Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung garis sempadan pantai minimal 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat, sehingga pembangunan yang memanfaatkan wilayah pantai harus dilakukan lebih di luar garis sempadan pantai.

Berikut tabel mengenai Garis Sempadan kawasan tepi pantai dan sungai:

Tabel 2.1 Peraturan Mengenai Garis Sempadan Pantai dan Sungai

Sumber	Sempadan	Kriteria
Keputusan Presiden RI No.32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung	Garis sempadan pantai	- Minimum 100 m diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat
	Sungai di luar pemukiman	- Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar - Sekurang-kurangnya 50 meter di kiri kanan anak sungai
	Sungai di kawasan permukiman	- Sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter
Peraturan pemerintah republik Indonesia No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Garis sempadan sungai bertanggul	- Ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
	Garis sempadan sungai tidak bertanggul	- Ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomi oleh pejabat wewenang
	Ketentuan lain	- Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang

Sumber: Wati Masrul, 2007

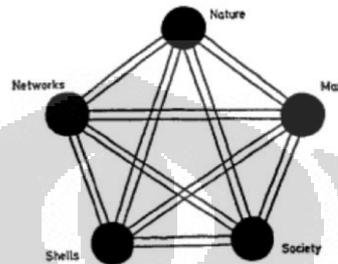
2.2 Kota Pesisir

2.2.1 Perkembangan Kawasan Pesisir Kota

Kota merupakan tempat kehidupan manusia yang dipandang dan dirasakan dari berbagai sudut pandang, yang menggambarkan keaktifan, keberagaman dan kompleksitasnya, serta bentuk fisik dari cerminan ekspresi masyarakat dan kebudayaan didalamnya yang perkembangannya dipengaruhi oleh kegiatan penggunaan perkotaan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman (waktu) dan kebutuhan atau tuntutan hidup baik secara individual maupun komunal dalam lingkungan.

Dengan kata lain kota merupakan wadah bermukimnya manusia (*human settlement*) dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan aktualisasi diri. Doxiadis (1968) menjelaskan bahwa “*Human Settlement are, by definition, settlements inhabited by man*”. Segala rupa *shelter* yang mampu menjadi naungan untuk kehidupan manusia didalamnya baik skala kecil lingkungan terbangun hingga tingkat makro kota dan wilayah. Doxiadis membagi *human settlement* dalam dua elemen besar yakni fisik wadah/tempat (*the container*)

merupakan ruang fisik buatan dan ruang alam, dan isi (*the content*) atau manusia dan masyarakat yang menghuni didalamnya. Kemudian kedua elemen besar tersebut diurai kembali menjadi lima elemen kecil yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang perlu diperhatikan dalam *human settlement*, yaitu *shell*, *network*, *nature*, *man and society* (*human resources*).



Gambar 2.1 Lima Elemen Ekistics: pengoptimalan kualitas hubungan antara manusia dengan lingkungannya

Sumber: Science, v.170, no.3956, October 1970, p. 393-404

Shell, sebagai ruang terbangun yang kasat mata dari satu bangunan, kelompok bangunan hingga skala lingkungan dan kota. *Network* atau jaringan sarana dan prasarana dalam menghubungkan *shell* dengan *shell* dan mendukung kegiatan bermukim manusia. *Nature* atau ruang alam yang membentuk atau mempengaruhi *human settlement* berupa keseluruhan ekosistemnya beserta unsure-unsur biotik abiotik hingga kondisi klimatologis—pencahayaan, kelembaban, *thermal*, pergerakan udara dan lainnya-. *Man and society*, Mulyandari (2011) menggabungkannya menjadi *human resources*, merupakan penghuni atau yang bermukim didalamnya –manusia individu maupun kolektif. (Mulyandari, 2011)

Begitu pula dengan kota pesisir—kota tepian air- yang sejak dahulu telah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, tidak banyak hal-hal yang berbeda yang perlu diperhatikan dalam *human settlement* (kota) yang berada di darat. Hanya saja, seperti yang telah dijelaskan pada awal, kondisi geografis dan tapak wilayah pesisir/pantai yang lebih unik dan rentan menjadi fokus utama dan sudut pandang yang berkebalikan dalam berkembangnya wilayah pesisir kota.

Great many towns are built on water—along rivers or on their delta, or at the meeting of two or more rivers, or on the edge of lakes and seas. (Kostof, 1991, p. 39)

Cities have been sorted out by country, by epoch, and by geographic location. Cities designed themselves as reflection of forms of government and ideals of order. (Kostof, 1991, p. 15)

Spiro Kostof membuka awal paragraf bagian *Meeting The Water* pada *The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History* dengan mengatakan bahwa banyak kota-kota besar berada dekat/berbatasan dengan air. Kondisi tapak yang berbeda dan bagaimana cara permukiman beradaptasi dengan air, memberikan karakter pada bentuk kota dan respon yang umum terjadi dengan menyelaraskan pertumbuhannya dengan tapak.

Kondisi geografis juga akan mempengaruhi fungsi sebuah kota. Bila kota dalam perkembangannya ditujukan untuk mengembangkan kegiatan niaga kelautan didalam permukimannya, yakni sebagai tempat pertukaran barang antara daratan dan lautan, maka kota selayaknya memiliki akses yang mampu menghubungkan daratan dan lautan. (Branch, 1996)

Selain dipengaruhi oleh waktu dan kondisi geografis, proses pembentukan sebuah kota tidak lepas dari peran dan perkembangan masyarakat sehingga terbentuk berbagai pola kota yang terus berkembang dengan proses yang dinamis dan berkesinambungan tanpa suatu awal dan akhir yang jelas.

Jenis-jenis sumber air—sungai, laut, danau atau kanal- akan membentuk permukiman. Selain didominasi kegiatan bermukim, air juga menjadi faktor yang menentukan perkembangan bentuk dan pola kota, sebagaimana disebutkan oleh Jacobs (1993) *At some point, topography and natural features such as rivers show in street patterns...The street and block patterns of early European hill cities reflect topography. Similarly the impact of rivers shows, not only as undulating linear bands of public space between areas of streets and development blocks, but as determinants of the development patterns themselves. (p.256)*

Pada zaman dahulu, berdekatan atau berbatasan dengan air adalah salah satu kriteria penting dalam memilih tapak untuk sebagai tempat bermukim. Selain memberikan keuntungan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia, air juga berperan penting dalam perkembangan perdagangan, dengan kemajuan perdagangan maka dibangunlah pelabuhan-pelabuhan kecil ditepi air untuk memberikan kemudahan akses menuju kota lainnya, dan permukiman setempat mulai menjadi kota pelabuhan. Kawasan tersebut menjadi pusat ekonomi kota karena perubahan spasial yang terjadi di garis pantai atau tepian air. Pada saat yang sama kawasan tepi air juga menjadi kawasan untuk masyarakat berinteraksi. (Butuner, 2006)

Perkembangan kota-kota pesisir—kota-kota pantai- di Indonesia pada awalnya berangkat dari kesamaan fungsi dan kemudian bergerak menuju keragaman fungsi kota, sebagai kota administratif, budaya, perdagangan, pendidikan (Mulyandari, 2011). Kawasan perkotaan pesisir menurut Emirhadi Suganda (2007), dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pantai dan Pembangunan Berkelanjutan⁴, melalui pendekatan ekologis berupa perkotaan yang terletak di wilayah pesisir yang merupakan pertemuan antara daratan dan lautan, termasuk kawasan pengaruhnya, yaitu daerah daratan, pantai, dan laut. Kawasan ini berfungsi sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan ini terdiri dari habitat dan ekosistem yang menyediakan barang dan jasa bagi komunitas perkotaan pantai dan pemanfaatan lainnya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik secara geofisik maupun sosial ekonomi.

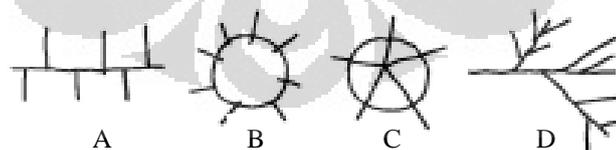
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terdapat 516 kota andalan di Indonesia dengan 216 kota diantaranya merupakan kota tepi air yang berada di tepi laut (pantai), sungai atau danau.

⁴ Diambil dari buku Pembangunan Perdesaan dan Daerah Pesisir Pada Era Millenium III, 2007

Menurut Iwan Suprijanto⁵, Kawasan pesisir kota atau kota tepi laut memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, terutama berkaitan dengan fungsi kota dan aksesibilitas. Kota pantai/tepi laut sebagai salah satu bentuk kota tepi air pada dasarnya berakar pada faktor-faktor geografi dan sejarah nusantara yang selama berabad-abad telah menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Pada perkembangan selanjutnya kawasan ini menjadi tempat yang menarik untuk permukiman. Gejala tersebut dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain :

- merupakan kawasan alternatif permukiman kota bagi pendatang (contoh kasus pada sepanjang pantai utara DKI Jakarta)
- merupakan peluang bagi kemudahan transportasi.
- menjadi pintu gerbang alami untuk perdagangan antar tempat yang terpisahkan oleh laut.

Hingga kini terdapat empat bentuk pola pada kawasan tepi air yaitu linear, radial, konsentrik dan bercabang. Pola linear biasanya menyebar dan memanjang sepanjang garis tepi air seperti pantai dan sungai. Pola radial adalah pola susunan ruang dan massanya mengelilingi suatu wilayah perairan seperti danau dan teluk. Pola konsentrik merupakan pengembangan dari bentuk radial yang menyebar secara linear ke arah belakang dari pusat radial. Pola bercabang terbentuk jika ada anak-anak sungai dan kanal-kanal. Pada intinya bentuk-bentuk pola kawasan tersebut memiliki muka bangunan yang berorientasi ke arah air (Soesanti et.al, 2006).



Gambar 2.2 Pola Kawasan Tepi Air

A. Pola Linier; B. Pola Radial; C. Pola Konsentrik; D. Pola Bercabang (*Branch*)

Sumber: Siska Soesanti, et.al, 2006

⁵ Proceeding - Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global

Perkembangan kota-kota di daerah pesisir dilandasi oleh tiga alasan mendasar (Mulyadi, 2005), yaitu :

1. Dapat memberikan fungsi yang efektif sebagai suatu pemusatan masyarakat dengan berbagai tingkat kebudayaan
2. Dapat memberikan fungsi kepada kota tersebut sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan di mana penguasaan, pengendalian serta pengawasan terhadap suatu wilayah dapat dilakukan secara efektif
3. Dapat memberikan peranan dan fungsi terhadap kota tersebut sebagai suatu pusat pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan peranan perekonomian ke dalam maupun keluar.

Dengan demikian, faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan yang diharapkan dari potensi fisiografis adalah :

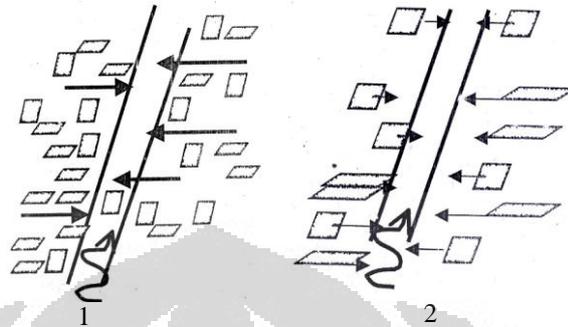
1. Keadaan fisik yang dapat memenuhi kebutuhan proses penempatan berbagai kegiatan serta perkembangannya.
2. Ketersediaan potensi fisik yang dapat membantu kelancaran dan aktivitas pergerakan.
3. Dapat menguasai potensi-potensi fisik yang dapat memenuhi kebutuhan strategi keamanan dan pertahanan.

Perkembangan daerah-daerah pantai yang dilandasi oleh berbagai macam bentuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan sosial budaya, ekonomi dan politik jelas akan termanifestasikan pada perkembangan fisiknya.

2.2.2 Permukiman Pesisir dan Pola Permukiman

Berkembangnya suatu kawasan merupakan hal yang pasti terjadi karena adanya tuntutan untuk membentuk kawasan yang terencana agar dapat mengatur kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Namun perkembangan kawasan tidak bisa terlepas dari budaya masyarakat setempat. Bentuk-bentuk tipe dan pola permukiman pada suatu kawasan merupakan bagian dari pola penggunaan tanah yang akan menggambarkan struktur serta faktor yang mempengaruhinya. Lee Taylor (1984) membagi bentuk atau ciri-

ciri permukiman pada kawasan yang berbatasan dengan perairan berdasarkan dari pola permukiman dan struktur ruang.



Gambar 2.3 Pola Permukiman Nelayan.

1. Sub Kelompok Komunitas; 2. Saling Berhadapan (*face to face*)

Sumber: Panggardjito, 1999

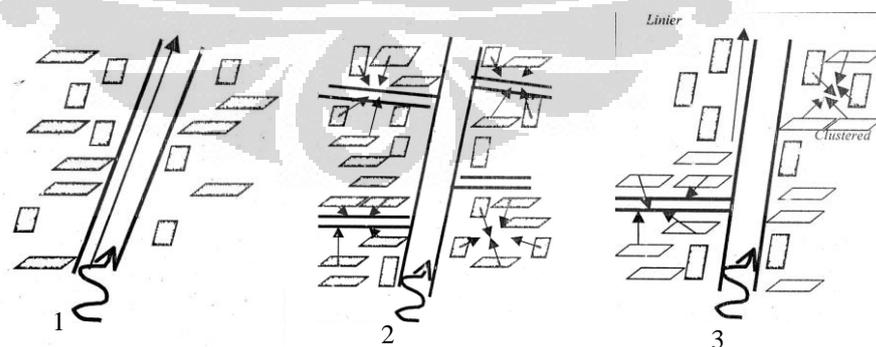
Pola Permukiman nelayan;

1. Sub Kelompok Komunitas

Pola permukiman tipe ini berbentuk cluster, terdiri dari beberapa unit atau kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting, seperti penjemuran, ruang terbuka umum, masjid dan sebagainya.

2. Face to face

Pola permukiman tipe ini berbentuk linier, antara unit-unit hunian sepanjang permukiman dan secara linier terdapat perletakan pusat aktivitas yaitu tambatan perahu atau dermaga, ruang penjemuran, pasar dan sebagainya.



Gambar 2.4 Struktur Ruang Permukiman Nelayan. 1. Linier; 2. Mengelompok; 3. Kombinasi

Sumber: Panggardjito, 1999

Struktur Ruang Permukiman nelayan

1. Linier

Pola permukiman bentuk ini adalah suatu pola sederhana dengan peletakan unit-unit permukiman (rumah, fasum, fasos dan sebagainya) secara terus menerus pada tepi sungai dan jalan. Pola ini memiliki kepadatan tinggi, kecenderungan permukiman dapat berekspansi dan *mixed use function* penggunaan lahan beragam.

2. Mengelompok

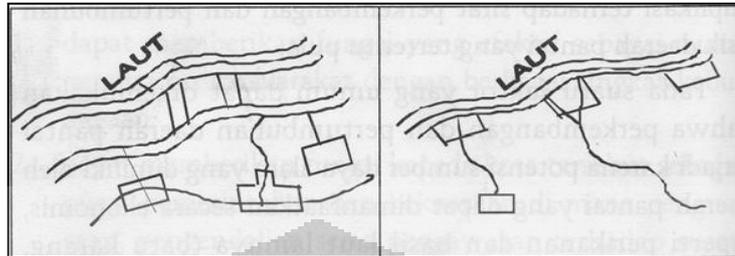
Pada pola ini berkembang dengan adanya kebutuhan lahan dan penyebaran unit-unit permukiman telah mulai timbul. Kecenderungan pola ini mengarah pada pengelompokan unit permukiman terhadap suatu yang dianggap memiliki nilai atau pengikat kelompok seperti ruang terbuka komunal dalam melakukan aktivitas bersama.

3. Kombinasi

Pola ini merupakan suatu kombinasi antara kedua pola di atas menunjukkan bahwa selain ada pertumbuhan juga menggambarkan adanya ekspansi ruang untuk kepentingan lain (pengembangan usaha dan sebagainya). Pola ini menunjukkan adanya gradasi dari intensitas lahan dan hirarki ruang mikro secara umum.

Perkembangan daerah pesisir menurut Sujarto (dalam Mulyadi, 2005) terbagi menjadi dua macam. Pertama, perkembangan daerah pesisir yang intensif maupun ekstensif secara berkesinambungan di sepanjang daerah pesisir. Pola perkembangan tersebut terjadi karena telah berkembangnya jaringan sarana perhubungan darat yang menghubungkan daerah-daerah sepanjang pantai atau pesisir. Kedua, perkembangan intensif yang terjadi karena terpecar di lokasi-lokasi tertentu karena adanya potensi perkembangan yang secara historis memiliki potensi perekonomian. Dalam pola yang kedua ini pertumbuhan dan perkembangan hanya terjadi intensif pada lokasi-lokasi tertentu saja dengan orientasi kepedalaman. Kondisi ini bertolak-belakang dengan pertumbuhan

pertama, hal ini disebabkan karena sarana transportasi yang menghubungkan daerah-daerah pesisir masih sangat kurang.

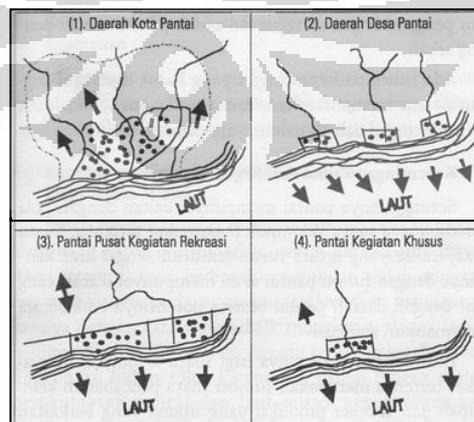


- (1). Perkembangan pesisir yang ekstensif maupun intensif dan kontinu karena telah maju sarana perhubungan sepanjang pesisir
 (2). Perkembangan pesisir yang intensif namun tersebar karena sarana perhubungan yang belum maju pesisir

Gambar 2.5 Pola Perkembangan Daerah Pesisir
 Sumber: Mulyadi, 2005

Dari segi fungsinya, daerah pantai dapat berkembang sebagai suatu kota, suatu desa, suatu pusat kegiatan rekreasi dan sebagai suatu kegiatan fungsional khusus seperti industri, stasiun angkutan laut, pusat pengolahan atau kegiatan khusus lainnya.

Menurut Stuart Chapin (dalam Yunus, 2001) unsur-unsur utama perilaku manusia serta dinamika perilaku manusia dalam proses imbal-baliknya telah mengakibatkan terciptanya pola-pola keruangan tertentu dalam suatu wilayah /kota. Sujarto menyebutkan empat pola perkembangan daerah terbangun (built up areas) di daerah pantai (Mulyadi, 2005), yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.6 Pola Perkembangan Daerah Terbangun Di Kawasan Pesisir
 Sumber: Mulyadi, 2005

1. Daerah Kota Pantai, kota pantai umumnya berkembang karena adanya potensi ekonomi, strategi pertahanan dan sebagai pusat pemerintahan. Daerah terbangun berkembang secara intensif sepanjang pantai. Penggunaan lahan daerah pantai lebih berorientasi ekonomis seperti untuk pelabuhan, pergudangan, dan industri. Adakalanya juga untuk kegiatan rekreasi yang produktif. Daerah pesisir umumnya merupakan "gerbang" kegiatan sosial ekonomi, politik dan budaya bagi daerah sekitarnya (hinterland).
2. Daerah Desa Pantai, perkembangan dan pertumbuhan dimulai oleh terbentuknya kelompok masyarakat yang mata pencahariannya nelayan. Pemukiman umumnya berorientasi ke arah laut karena usaha utama dari asil laut. Biasanya daerah terbangun terpencar-pencar di tepi pantai sesuai dengan potensi kebutuhan masyarakat. Jadi, sifat perkembangan fisik adalah ekstensif.
3. Pantai Pusat Kegiatan Rekreasi, yaitu suatu kawasan rekreasi yang memanfaatkan potensi alam kawasan pesisir. Orientasi kegiatannya adalah ke arah pantai dan sepanjang pantai serta memberikan pelayanan bagi kebutuhan rekreasi regional di pedalaman. Dalam hubungan ini, peranan jaringan perhubungan darat dengan daerah dan kota-kota lainnya di pedalaman merupakan faktor yang sangat penting.
4. Pantai untuk Kegiatan Khusus, yaitu suatu penggunaan fungsi daerah pantai untuk kepentingan kegiatan-kegiatan khusus bagi yang berorientasi kepada ekonomi dan ataupun pemerintah.

2.3 Minapolitan

2.3.1 Definisi Minapolitan

Kawasan kota pesisir merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Minapolitan, salah satunya yang berbasis pada perikanan tangkap. Minapolitan merupakan salah satu intervensi kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam program utama Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dimulai pada tahun 2009 sebagai startegi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat (khususnya nelayan) dan produktivitas kawasan pesisir. Program Minapolitan bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan (*hinterland*) yang dikembangkan tidak saja budidaya (*on farm*) tetapi juga pengolahan dan pemasaran (*off farm*) seperti sarana perikanan dan jasa penunjang lainnya.

Istilah Minapolitan serupa dengan istilah Agropolitan yang telah lama dikenal. Agropolitan dikenalkan oleh Friedman dan Douglass pada tahun 1967 melalui konsep agropolitan distrik (Adriyani, 2004). Hanya saja berbeda dalam segi komoditas yang diunggulkan. Secara definisi Agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian. Menurut Departemen Pertanian (2003) Agropolitan merupakan kota yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, dan menarik kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah-wilayahnya.

Minapolitan, bila dilihat dari definisi yang serupa dengan Agropolitan, dalam Bahasa Sansakerta *Mina* berarti ikan, sehingga Minapolitan bisa diartikan sebagai Kota Perikanan yang konsep pengembangan dan pembangunan kelautan dan perikananannya berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan meliputi prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi agar wilayah tersebut cepat tumbuh layaknya sebuah kota⁶. Minapolitan, merupakan gambaran suatu kawasan kota yang berbasiskan komoditas perikanan dengan aktivitas ekonomi utama dari usaha perikanan, dari hulu hingga hilir. Pengembangan kawasan Minapolitan mencakup kegiatan produksi, pengolahan, serta pemasaran produk perikanan dan kelautan.

2.3.2 Kriteria Kawasan Minapolitan

Pengembangan kawasan Minapolitan menjadikan kegiatan perikanan sebagai *core business* dalam suatu pengembangan wilayah dengan dukungan berbagai sektor, mendorong pengembangan kawasan perikanan tangkap yang

⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2009

telah tumbuh secara alamiah melalui dukungan pengembangan kawasan Minapolitan, pengembangan infrastruktur kawasan Minapolitan diutamakan di daerah-daerah yang telah ada kegiatan usaha perikanan, sehingga infrastruktur yang dibangun akan dapat menjadi pendorong bagi kegiatan budidaya yang sudah ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009).

Karakteristik kawasan Minapolitan memiliki sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan dan mempunyai *multiplier effect* tinggi terhadap perekonomian di sekitarnya, keanekaragaman kegiatan ekonomi, produksi, perdagangan, jasa pelayanan, kesehatan, dan sosial yang saling terkait serta sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi sebagaimana layaknya sebuah kota pesisir.

Berikut beberapa kriteria untuk kawasan Minapolitan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Memiliki potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan.
- Tersedia infrastruktur awal (pelabuhan perikanan).
- Telah ditetapkan melalui Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) menjadi zona pengembangan perikanan.
- Terdapat unit-unit usaha yang telah berjalan dengan baik serta berpotensi untuk pengembangan usaha baru.
- Tersedia lahan yang dapat dikembangkan di sekitar daerah pelabuhan perikanan maupun sentra kegiatan nelayan.
- Tersedia suplai BBM, listrik, dan air bersih yang memadai
- Terdapat lembaga ekonomi berbasis kerakyatan seperti Tempat Pelelangan Ikan, koperasi perikanan, Pusat Pendaratan Ikan.
- Diusulkan oleh Dinas KP Kabupaten/Kota dengan rekomendasi penda kabupaten/kota/propinsi serta lolos seleksi dari tim seleksi.

Minapolitan terbagi menjadi dua jenis, terkait dengan pemanfaatan ruang pada kawasan, yakni Minapolitan berbasis perikanan tangkap berkegiatan di dekat dengan sumber-sumber penangkapan ikan dan kegiatan membudidayakan jenis ikan tidak dominan, khusus pada hasil tangkap ikan. Minapolitan berbasis

Perikanan Budidaya tidak bergantung dengan hasil tangkapan ikan baik dari laut maupun danau atau sungai, lebih pada kegiatan mandiri membudidayakan komoditas ikan unggulan kawasan yang dituju.

1. Minapolitan Perikanan Tangkap

Strategi pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap, antara lain :

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha
- *Consumer oriented* melalui sistem keterkaitan produsen dan konsumen
- Berorientasi pada kekuatan pasar (*Market Driven*) melalui pemberdayaan masyarakat
- Komoditi yang akan dikembangkan bersifat *export base* bukan raw base

2. Minapolitan Perikanan Budidaya

Jenis usaha pada perikanan budidaya, antara lain :

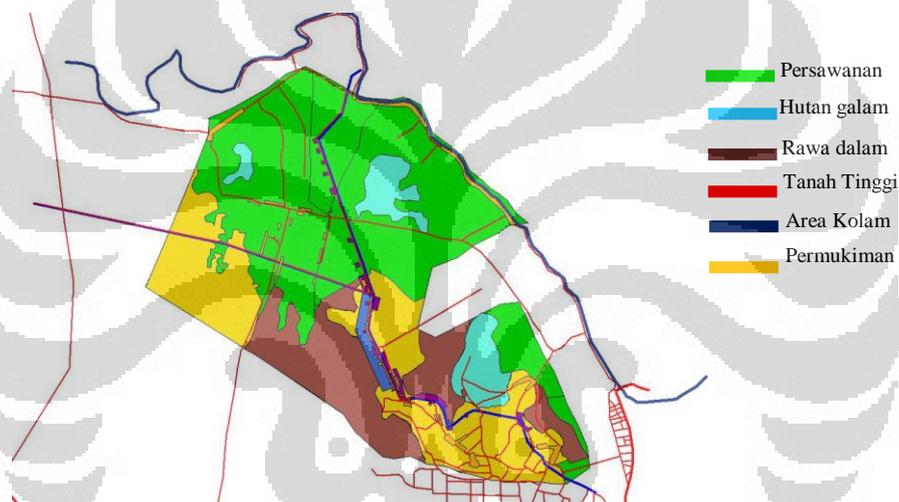
- budidaya kolam,
- budidaya keramba,
- budidaya tambak
- mina padi

Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), menyebutkan persyaratan Kawasan Minapolitan adalah sebagai berikut:

- Memiliki sumberdaya lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas perikanan yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (komoditas unggulan).
- Memiliki berbagai sarana dan prasarana Minabisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha Minabisnis yaitu: pasar; lembaga keuangan; memiliki kelembagaan pembudidaya ikan (kelompok, UPP); Balai Penyuluhan Perikanan (BPP) yang berfungsi sebagai klinik; Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha perikanan yang efisien.

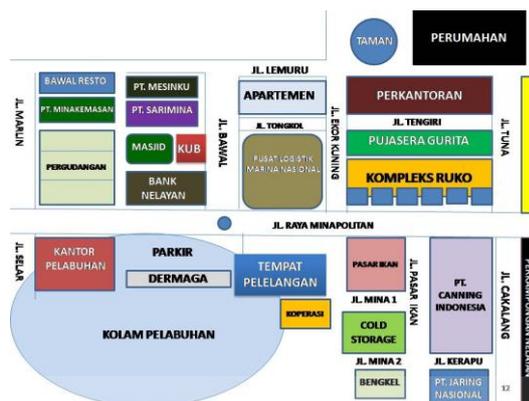
- Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.
- Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial atau masyarakat yang memadai seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan lain-lain;
- Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin.

2.3.3 Gambaran Umum Tata Ruang Kawasan Minapolitan



Gambar 2.7 Master Plan Pemanfaatan Ruang Dan Pengembangan Kawasan Minapolitan - Bagian RTRW Kabupaten
Sumber: Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP, 2011

Berdasarkan dari *masterplan* yang disusun oleh pemerintah setidaknya ada beberapa zona yang diperhatikan dalam kawasan Minapolitan khususnya Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap, yakni zona kolam untuk melabuh kapal-kapal, biasanya kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap harus memiliki fasilitas penunjang seperti pelabuhan perikanan, permukiman masyarakat setempat, rawa untuk melindungi kawasan dari pasang laut.



Gambar 2.8 Contoh Draft Zonasi Ruang Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap

Sumber: Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP, 2011

2.3.4 Kebijakan Minapolitan

Pengembangan Kawasan Minapolitan berlandaskan pada:

- UU Penataan Ruang No 26/2007, yang juga mengatur tentang Kawasan Agropolitan, Bab I Ketentuan Umum Nomor 24, Pasal 51 ayat 1 dan 2
- Sembilan Butir Kesepakatan Temu Koordinasi Agropolitan/Minapolitan di Kaliurang, 14 Desember 2007
- Sarasehan Nasional Agropolitan/ Minapolitan dihadapan 5 Menteri di Magelang 15 Desember 2007
- SK Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Keputusan Mentan Nomor : 467/Kpts/OT.160/8/2006
- Audiensi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Se-Indonesia dengan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian Dan Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perikanan di Ruang Rapat Graha Sawala Jakarta 19 Maret 2008
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/MEN/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan
- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. KEP 45/DJ-PB/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan.
- PP Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.4 Ruang Kegiatan Masyarakat Pesisir Nelayan Tangkap

2.4.1 Definisi Nelayan

Ensiklopedi Indonesia mendefinisikan nelayan sebagai individu atau kelompok yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun tidak langsung (seperti juru mudi kapal, nahkoda kapal bermotor, ahli mesin kapal), sebagai mata pencaharian.

Imron dalam Mulyadi (2007) juga menjabarkan nelayan sebagai suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara penangkapan langsung maupun budidaya. Kelompok ini pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan permukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Merujuk pada dua penjabaran diatas membagi nelayan berdasarkan cara mendapatkan hasil ikan serta wilayah kerja dan pembagian kerja. Dalam penjabaran teori kedua nelayan terbagi atas nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Yang membedakan kedua nelayan tersebut adalah pemanfaatan wilayah dan cakupan kerja. Nelayan tangkap memanfaatkan wilayah pesisir hingga laut lepas sebagai tempat kerja. Sedangkan nelayan budidaya, yang sering disebut petani tambak, mengelola daerah rawa, sungai, sawah dan sejenisnya untuk mengelola produk perikanan dan biasanya nelayan budidaya ini hanya mengembangbiakan benih ikan yang ditebar diwilayah pengelolaannya.

Penjabaran diatas juga menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga yang kegiatan utamanya bukan menangkap ikan, tetapi menggunakan ikan sebagai bahan proses produksi bukan dikategorikan rumah tangga nelayan. Dengan demikian pedagang ikan yang hidup di tepi pantai juga tidak termasuk dalam kategori nelayan (Elfrindi dalam Mulyadi, 2007).

2.4.2 Kebudayaan Masyarakat Nelayan

Hildred Geertz (1981) berpendapat ketergantungan masyarakat terhadap sektor kelautan memberikan identitas tersendiri sebagai masyarakat pesisir dengan pola hidupnya yang dikenal sebagai kebudayaan pesisir. Identitas kehidupan masyarakat pesisir terbentuk dari kebudayaan nelayan baik nelayan, petambak, pembudidayaan perairan, atau kelompok-kelompok yang menggantungkan kehidupannya dari sumber daya pesisir dan lautan.

Kusnadi (2002) menerangkan kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi fungsi dalam pedoman kehidupan, referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Dalam kehidupan nelayan setiap gagasan dan praktik kebudayaan harus bersifat fungsional dan mampu membantu kemampuan bertahan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan.

Pola interaksi yang terjadi dalam kehidupan nelayan menjadi kompleks karena terjadi di dua wilayah yakni lautan dan daratan. Wilayah lautan sebagai lapangan pekerjaan utama dan wilayah daratan sebagai tempat bertinggal (dalam hal ini wilayah daratan termasuk wilayah pesisir) dan memproses hasil dari kegiatan utama nelayan. Dalam kondisi ini masyarakat nelayan memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda dan mempengaruhi kondisi permukiman tempat tinggal.

Henry Lefebvre (dalam Pangardjito, 1999) mengemukakan bahwa setiap lingkungan sosial dalam sejarahnya memiliki bentuk spasial, yakni ruang sosial tersendiri yang merupakan jalinan antara kegiatan sosial dan ekonomi. Ruang-ruang sosial tersebut memiliki skala yang berbeda mulai dari skala terkecil berupa ruang perumahan (pribadi) dan ruang umum atau *public space* (umum). Bagian yang menarik dari pernyataan Lefebvre ketika ia menggunakan kata sosial untuk memberikan penjelasan akan sebuah ruang untuk kegiatan bersama. Bagi Lefebvre inti dari ruang sosial tersebut adalah bagaimana ruang diciptakan didalam masyarakat dan menjadi proses penggerak kegiatan dalam masyarakat.

2.4.3 Karakteristik Masyarakat Nelayan Tangkap

Secara ekologis, masyarakat pesisir mempunyai cara kehidupan yang bervariasi, sekurangnya mereka mempunyai alternatif pemanfaatan dua lingkungan hidup : dataran (tanah) dan lautan (air); pada bentuk masyarakat ini, komoditi ekonomi lain selain dari aspek kelautan (mencari ikan dan sumber-sumber alam pantai) merupakan matapencarian tambahan, sedangkan pada masyarakat petani darat keadaan ini berlaku sebaliknya, yaitu sektor perikanan adalah sebagai bentuk matapencarian tambahan (Koentjaraningrat, 1990: 32).

Laut dan nelayan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nelayan merupakan profesi seseorang yang begitu terkait erat dengan keberadaan laut dalam melangsungkan eksistensi hidupnya. Panggardjito (1999) menjelaskan dalam tesisnya masyarakat nelayan tangkap memiliki karakter khusus yang tidak dimiliki oleh petani maupun nelayan budidaya yang ditunjukkan pada pola sosial budayanya.

Pertama, intensitas interaksi dalam berkelompok yang tinggi, berlangsung antara 8 jam sehari hingga 30 hari ditengah laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu membuat tantangan hidup di perahu sangat besar, sehingga ketergantungan dan keterikatan dalam komunitas tinggi.

Kedua, konvensi yang terjadi dalam masyarakat nelayan sering terjadi dalam hal jual-beli ikan, daerah tangkapan ikan, penggunaan perahu, hingga hadir keterikatan dengan jenjang kepemimpinan dalam komunitas. Pengelompokan-pengelompokan dalam lingkungan nelayan terjadi sangat kuat karena didasari oleh adanya bentuk-bentuk kesepakatan tersebut.

Ketiga, ikatan kekerabatan yang terbentuk memberikan ciri khas pada penataan permukiman nelayan. Kekerabatan-kekerabatan yang terjadi cenderung mengarah pada pengelompokan antar unit permukiman dan kebutuhan akan ruang kegiatan. Ikatan kekerabatan dalam pola penataan ruang permukiman tersebut tidak didasari oleh kesamaan (homogenitas) namun lebih kearah pola hubungan kegiatan nelayan.

Nelayan bukanlah satu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya dengan nelayan juragan ialah yang memiliki alat tangkap yang kemudian dioperasikan oleh orang lain (nelayan buruh). Dan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi, 2007; 7).

2.4.4 Kegiatan Masyarakat Pesisir (Nelayan Tangkap) Berdasar Aspek Ruang-Waktu

Menurut Syarif Moeis (2008) dalam penelitiannya menjelaskan kegiatan melaut membutuhkan wawasan seputar mekanisme penangkapan ikan, cuaca dan iklim, serta melibatkan unsur-unsur yang berhubungan dengan :

- a. Jenis dan sifat ikan. Dengan pertimbangan tertentu nelayan menentukan jenis ikan apa yang akan ditangkap dan bagaimana sifat dari ikan tersebut, karena ini tentu disesuaikan dengan kemampuan, peralatan yang ada, tenaga kerja, prospek jual, konsumsi serta berbagai pantangan tentangnya.
- b. Waktu dan masa (musim) penangkapan ini berkaitan dengan penentuan saat-saat yang tepat untuk mendapatkan ikan. Waktu dan masa ini berhubungan dengan kondisi lingkungan alam, iklim, cuaca, angin, keadaan air. Selain pengaruh kondisi alam dan musim ikan, kegiatan melaut juga tergantung dengan kapasitas perahu yang digunakan oleh para nelayan.
- c. Laut, tanda-tanda keberadaan ikan serta tumbuhan tertentu; tidak sembarang waktu nelayan dapat menangkap ikan, karena pengalaman yang mengajarkan mereka untuk tahu keberadaan ikan itu dalam lingkup ekosistem yang berlaku di sana.
- d. Lokasi penangkapan; dari sistem pengetahuan yang berkembang, nelayan dapat menduga di tempat mana sebaiknya mereka menangkap ikan serta unsur peralatan juga amat menentukan sampai batas kejauhan mana mereka dapat melakukan aktivitasnya.

Pola kerja yang dikembangkan masyarakat pesisir menunjukkan bahwa faktor ketergantungan manusia terhadap alam sangat besar, kehidupan manusia relatif mengikuti ritme alam. Perputaran alam yang lambat diterapkan dalam kehidupan manusia, waktu yang mulur bukan merupakan masalah untuk bentuk masyarakat nelayan. Ketergantungan terhadap alam, keterbatasan kemampuan fisik manusia dan rumitnya proses kerja menyebabkan keterlibatan invidu lain dalam suatu aktivitas sangat diperlukan, baik sebagai pengendali kegiatan, tenaga pembantu, mitra kerja, lembaga penampung hasil tangkapan.



BAB 3

STUDI KASUS KAWASAN PALABUHANRATU

3.1 Perkembangan Kawasan Palabuhanratu

Palabuhanratu, kota kecamatan terletak di bagian selatan Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu kawasan pertama terpilih untuk dikembangkan menjadi kawasan Minapolitan, khususnya Minapolitan berbasis perikanan tangkap. Perkembangan Kota Palabuhanratu berdasarkan waktu terbagi menjadi dua momentum;

1. Peresmian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 1993 memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan wilayah Palabuhanratu. Sebelum tahun 1990 kawasan ini merupakan desa nelayan dengan produktivitas kawasan yang rendah, serta memiliki tingkat kerawanan sosial yang cukup tinggi. Kondisi nelayan yang pada saat itu mengalami kesulitan dalam tempat pembongkaran dan pendaratan ikan, tempat pemasaran ikan yang layak dan keamanan perahu yang terjamin, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.
2. Pemindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi menuju Palabuhanratu. Ibukota Kabupaten Sukabumi yang pada mulanya berada di Kota Sukabumi dipindahkan pada tahun 1998 ke Kota Palabuhanratu berdasarkan Penjelasan Umum PP nomor 66 tahun 1998 mengenai pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ke Kota Palabuhanratu di wilayah Kecamatan Palabuhanratu menjelaskan bahwa pembangunan Kabupaten Dati II Sukabumi sudah tumbuh dan berkembang secara fisik wilayah, perekonomian, sosial, budaya dan jumlah penduduk. Pemindahan Ibukota Kabupaten memberikan dampak yang signifikan atas berkembangnya wilayah Palabuhanratu.

Palabuhanratu di Kecamatan Palabuhanratu dipilih sebagai ibukota Kabupaten karena dianggap dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan di Kabupaten Dati II Sukabumi dan dipandang memenuhi syarat. Pembangunan

Kota Palabuhanratu menjadi lokasi Ibukota yang baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah bagian selatan secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan secara bertahap akan dapat diwujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah.

Aspek aksesibilitas sebagai salah satu struktur fisik yang paling pertama dilihat dalam perkembangan sebuah kota, kemudahan masyarakat mengakses Ibukota Pemerintahan serta konektivitas terhadap Kota/Daerah lain sangat perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi Ibukota Kabupaten karena pada umumnya Ibukota Kabupaten sebagai pusat pemerintahan yang memiliki fungsi melayani masyarakat dan kedudukan secara administratif membawahi beberapa wilayah lainnya. Selain itu kemudahan akses akan menunjang kegiatan perekonomian. Aksesibilitas tidak dapat dilepaskan dari infrastruktur yang disediakan untuk menunjang kegiatan kota tersebut.

Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

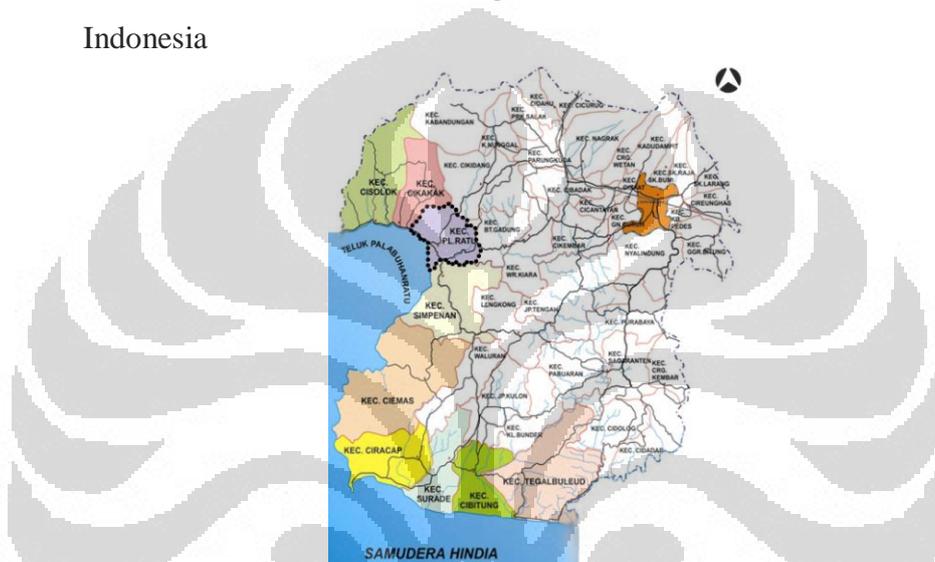
3.2 Gambaran Umum Palabuhanratu

3.2.1 Kondisi Geografis

Palabuhanratu yang terletak sekitar 61 KM dari Kabupaten Sukabumi termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan atau disebut Kota Palabuhanratu kini telah menjadi Ibukota Kabupaten Sukabumi yang memiliki satu kelurahan dan dua desa, yakni Kelurahan Palabuhanratu, Desa Citarik, dan Desa Citepus. Luas Kota Palabuhanratu sebesar 3.386,21 Ha dengan luas wilayah Kelurahan Palabuhanratu sebesar 1.023,22 Ha terbagi menjadi 31 RW

dan 128 RT. Secara administratif Kota Palabuhanratu berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikidang dan Kecamatan Cikakak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpenan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan BT.Gadung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Palabuhanratu atau Samudera Indonesia



Gambar 3.1 Peta Administratif Kelurahan Palabuhanratu
Sumber: Dinas Tata ruang PU Kab. Sukabumi

Rentang suhu maksimum dan minimum Kelurahan Palabuhanratu mencapai 18°C hingga 36°C dengan curah hujan 3000 mm/tahun dengan lamanya hari hingga 100 hari. 60% wilayah merupakan bentuk wilayah datar hingga berombak, 30% berombak hingga berbukit, 10% berbukit sampai bergunung. Palabuhanratu termasuk kedalam kategori pantai curam atau terjal karena berbatasan langsung dengan pegunungan.

Secara umum Kelurahan Palabuhanratu memiliki topografi yang sama seperti kawasan lainnya di Kabupaten Sukabumi. Topografi beragam dengan perpaduan antara daratan landai menuju pantai dan perbukitan rendah yang menggaris kearah selatan dan timur yang merupakan kawasan perhutanan dan perkebunan.

Menurut hasil pengamatan lapangan Mahasiswa Geografi UI (2010) ketinggian dari permukaan laut Wilayah Kabupaten Sukabumi bervariasi antara 0 - 2.958 m. Daerah datar umumnya terdapat pada daerah pantai dan daerah kaki gunung yang sebagian besar merupakan daerah pesawahan. Sedangkan daerah bagian selatan merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 300 - 1.000 m dari permukaan laut.



Gambar 3.2 Visualisasi Foto Udara Palabuhanratu
Sumber : Dinas Tata ruang PU, 2003

3.2.2 Penggunaan Lahan

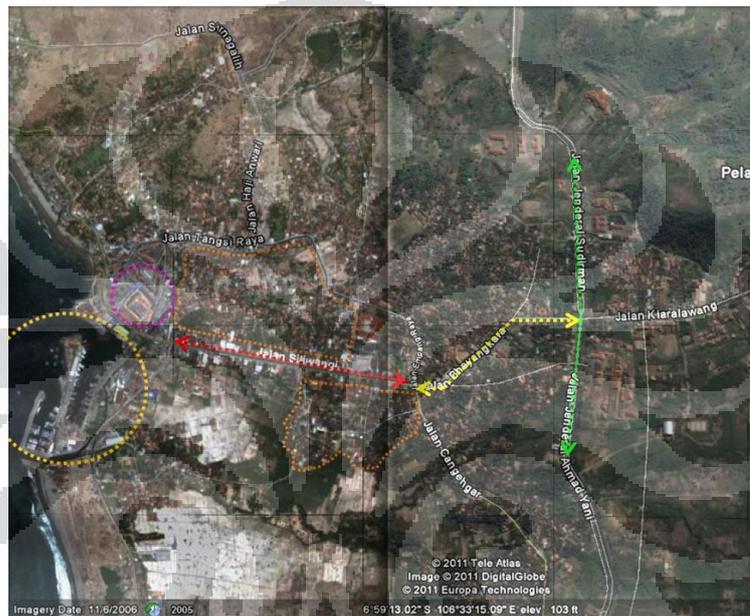
Luas lahan keseluruhan Kelurahan Palabuhanratu sebesar 1.023,22 Ha dengan dominasi lahan persawahan dan ladang. Luas lahan yang terbangun mencapai 527,45 Ha. Jika melihat hasil perbandingan luas wilayah yang terbangun maka Kelurahan Palabuhanratu belum sepenuhnya terbangun, hal ini karena dari kondisi topografi wilayah yang berbukit-bukit menyebabkan lahan yang dapat dibangun menjadi terbatas.

Tabel 3.1 Penggunaan Lahan Kelurahan Palabuhanratu

Penggunaan Lahan	Luas Lahan
Persawahan	139 Ha
Perkarangan/Bangunan	47 Ha
Ladang	159 Ha
Tambak	5 Ha
Hutan	24 Ha
Fasilitas Umum	53,45 Ha
Perkebunan	100 Ha
Total	527,45 Ha

Sumber: Kecamatan Palabuhanratu, Kelurahan Palabuhanratu, 2010

Kawasan terbangun pada Kelurahan Palabuhanratu terpusat pada Jalan Siliwangi yang disebut oleh penduduk setempat sebagai pusat kota Palabuhanratu. Fungsi bangunan yang mendominasi Jalan Siliwangi memiliki fungsi komersial berupa pertokoan. Kabupaten Sukabumi memiliki Pelabuhan Perikanan Nasional sebagai pusat kegiatan sektor perikanan yang juga terletak di Jalan Siliwangi. Begitu pula letak Pasar Palabuhanratu dan Terminal Palabuhanratu.



Keterangan:

- ◄-----► Jalan Siliwangi, Pertokoan
- ◄-----► Jalan Bhayangkara, Pendidikan
- ◄-----► Jalan Jendral Soedirman dan Jalan Jendral Ahmad Yani, Pusat Pemerintahan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
- Pasar Palabuhanratu dan Terminal
- Permukiman

Gambar 3.3 Peruntukan Fungsi Bangunan
Sumber : Google Earth, 2006 (telah diolah kembali)

Sepanjang Jalan Jendral Soedirman dan Jalan Jendral Ahmad Yani merupakan kawasan pusat pemerintah Palabuhanratu dan Kabupaten Sukabumi. Jalan Bhayangkara didominasi oleh kawasan Pendidikan, SMP Negeri 1

Palabuhanratu dan SMA Negeri 1 Palabuhanratu sebagai sekolah menengah yang pertama ada di Palabuhanratu. Palabuhanratu direncanakan menjadi pusat kawasan perdagangan-jasa dan permukiman di Kabupaten Sukabumi yang terbangun sebagian besar di Kecamatan Palabuhanratu khususnya Kelurahan Palabuhanratu.



Gambar 3.4 Atas: Panorama Jalan Siliwangi, Deretan Ruko.
Bawah: Pelabuhan Perikanan Nusantara,
Pasar Palabuhanratu
Sumber : Dokumentasi Pribadi, Mei 2011

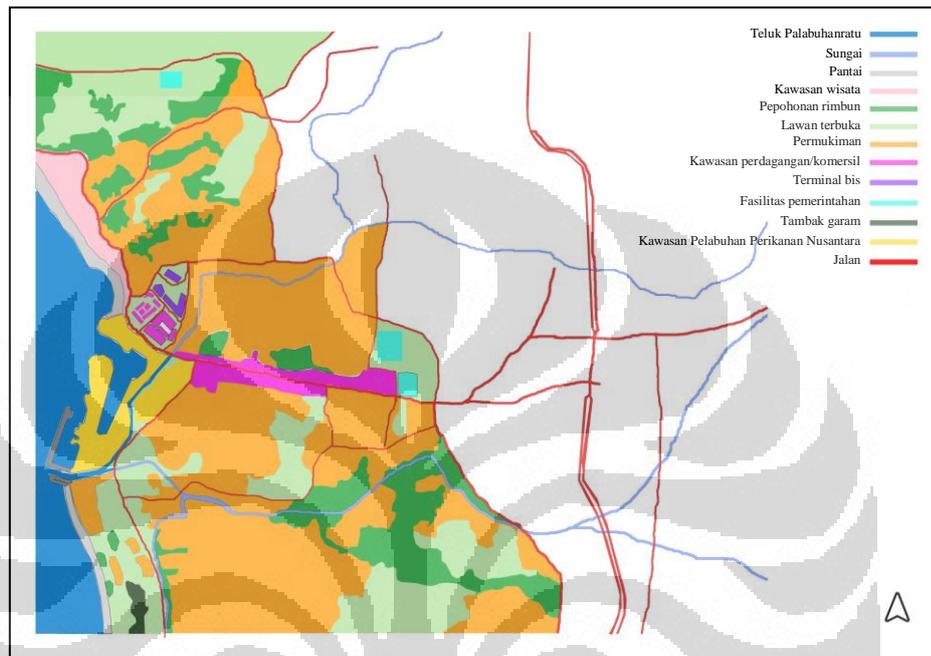


Gambar 3.5 Kantor Polres Sukabumi,
Sumber : Dokumentasi Pribadi, Mei 2011

Palabuhanratu berfungsi sebagai pusat penampungan serta pendistribusian hasil laut untuk kawasan penangkapan ikan di sepanjang pesisir selatan Jawa Barat selain dari Pameungpeuk di Kabupaten Garut dan Pangandaran di Kabupaten Ciamis.

Palabuhanratu termasuk pelabuhan yang cukup besar bila dibandingkan dengan dua pelabuhan diatas. Bila dilihat dari banyaknya jumlah perahu yang ada, tercatat hingga 1000 buah perahu bermesin besar dengan 4000 buah perahu

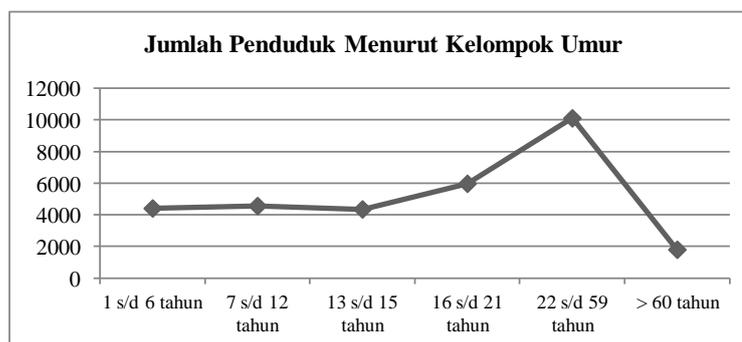
bermesin kecil (Syarif Moeis, 2008). Selain keberadaan perahu-perahu ini terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara yang memfasilitasi fungsi Palabuhanratu sebagai wilayah dengan produktivitas hasil tangkapan ikan yang cukup tinggi di wilayah ini.



Gambar 3.6 Struktur Kawasan Palabuhanratu
Sumber : Ilustrasi pribadi, November 2011

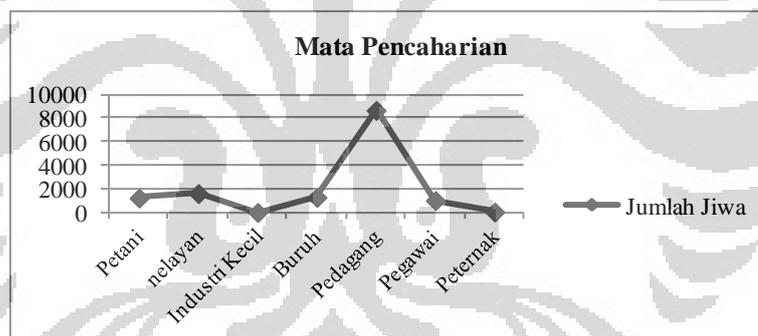
3.2.3 Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Palabuhanratu pada tahun 2010 sebesar 31.308 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebesar 15.923 jiwa dan perempuan sebesar 15.385 jiwa dan jumlah kepala keluarga mencapai 8.545 KK yang tersebar di 35 RW dan 128 RT. Penduduk kota atau wilayah merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan kota karena hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi, sosial, dan budaya kota setempat.



Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Sumber : Data Kependudukan Kelurahan Palabuhanratu, 2010

Jumlah penduduk menurut kelompok umur berdasar dari grafik tersebut Kelurahan Palabuhanratu memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif (22-59 tahun) yang tinggi, yakni 10.110 jiwa dari 31.308 jiwa penduduk Kelurahan Palabuhanratu. Kondisi ini mendukung perkembangan kawasan Palabuhanratu sebagai kawasan perdaganga-jasa dan Minapolitan dengan implikasinya peningkatan dalam bidang sosial-ekonomi masyarakat dan lapangan pekerjaan.



Grafik 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Sumber : Data Kependudukan Kelurahan Palabuhanratu, 2010

Mata pencaharian penduduk kawasan ini didominasi dari sektor perdagangan, mencapai 8.673 jiwa penduduk berprofesi sebagai pedagang. Hal ini juga sebagai pendukung untuk peningkatan kawasan perdagangan-jasa. Namun wilayah Palabuhanratu lebih berpotensi dalam sektor perikanan, didukung dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai penggerak utama dalam kegiatan eksport-import hasil perikanan tangkap. Kegiatan perdagangan juga tidak lepas dari kegiatan di sektor perikanan.

3.3 Permukiman Nelayan Cipatuguran

3.3.1 Nelayan Cipatuguran

Kampung Cipatuguran terletak 3 Km di sebelah Utara ibukota kecamatan, sebagai suatu pemukiman yang mencirikan pola perkampungan yang mengelompok. Cipatuguran disebut sebagai permukiman nelayan karena hampir 80% masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan bilapun menjadi pedagang biasanya komoditas yang dijual merupakan komoditas perikanan.

Berdasarkan sejarah terbentuknya, Kampung Cipatuguran merupakan permukiman yang penduduknya berasal dari daerah kawasan yang kini menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) kemudian dipindahkan karena rencana perluasan daerah dermaga PPNP pada tahun 1976 dan relokasi kedua dilakukan pada tahun 1993 saat peresmian PPNP. Permukiman tersebut diadakan oleh pemerintah termasuk bentuk fisik bangunan, sehingga pada saat relokasi penduduk langsung menempati rumah tersebut. Status kepemilikan tanah yang ditempati oleh penduduk tersebut masih milik pemerintah, begitu pula dengan fisik bangunan. Selain statusnya sebagai penduduk pindahan, sebelumnya Kampung Cipatuguran telah ada pemukiman namun dengan populasi yang relatif kecil, 25 Kepala Keluarga.

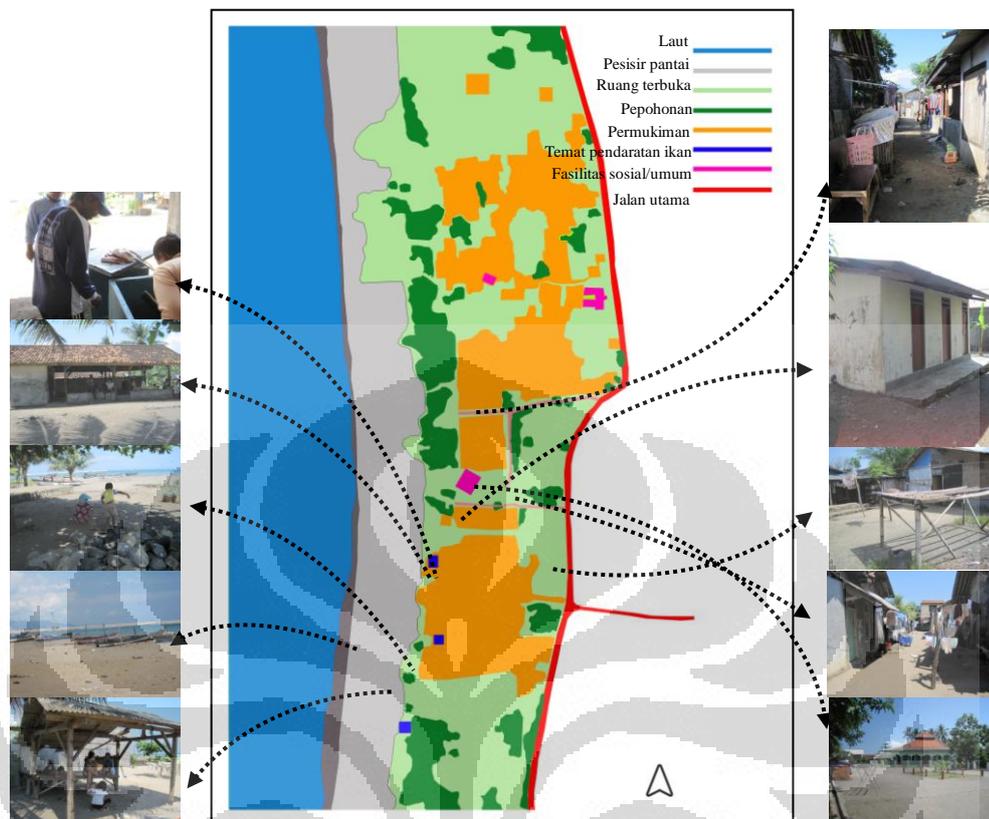


Gambar 3.7 Tapak yang diamati meliputi kawasan PPNP hingga Kampung Cipatuguran
Sumber : Google Earth, 20006 (Telah diolah kembali)

Penduduk Kampung Cipatuguran terdiri dari berbagai etnis, dengan etnis Sunda sebagai mayoritas (65%), Cirebon dan Indramayu (12%), Bugis (8%), dan etnis lainnya seperti Jawa, Madura, Banten, Batak, Padang, dan Ambon (15%) (Syarif Moeis, 2008).

Masyarakat Cipatuguran berasal dari berbagai golongan etnis di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda tidak menghalangi mereka untuk membentuk satu unsur kekerabatan yang menjadi dasar pola pengaturan kehidupan antar warga dalam masyarakat. Sistem kekerabatan yang terjadi di Kampung Cipatuguran menetapkan kedudukan individu dalam susunan kekerabatan yang lebih luas, setiap individu kampung Cipatuguran bisa menyebut kerabat kepada seseorang yang dianggap mempunyai hubungan darah, baik laki-laki maupun perempuan. Koentjoroningrat (1990) dalam kajian Antropologi, bentuk kekerabatan seperti ini dikenal sebagai prinsip kekerabatan bilateral. Prinsip kekerabatan bilateral yang terjadi memiliki prinsip tidak memilah-milah seperangkat tugas dan fasilitas khusus bagi warga masyarakat secara sepihak baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

Etnis pendatang hidup tidak megelompok secara eksklusif tetapi hidup berbaaur dengan masyarakat lainnya, baik dalam hal permukiman maupun aspek sosial budaya. Pertama kali hanya sembilan orang Etnis Bugis datang pada tahun 1960 yang berprofesi sebagai nelayan, kemudian disusul etnis-etnis lainnya memiliki profesi yang sama. Kecenderungan untuk membentuk kelompok etnis sendiri tidak timbul karena masing-masing etnis mampu beradaptasi dan membaaur dilingkungan, kondisi ini didukung juga dengan terjadinya pola perkawinan campuran antar etnis.



Gambar 3.8 Struktur Kawasan Cipatuguran
Sumber : Ilustrasi pribadi, November 2011

3.3.2 Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan Cipatuguran

Dalam kehidupan masyarakat pesisir faktor sumber daya laut sangat berperan besar. Keterlibatan masyarakat didalamnya tidak dapat lepas dari aspek lingkungan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Kegiatan utama masyarakat pesisir Cipatuguran adalah mencari dan mendapatkan ikan dari laut untuk dikonsumsi pribadi dan dijual kembali pada tengkulak maupun dijual langsung di pasar ikan PPNP.

Sebagian besar nelayan Cipatuguran menggunakan perahu congkrang⁷ untuk aktivitas kesehariannya karena keterbatasan modal untuk memiliki perahu diesel atau rumpon. Selain keterbatasan modal, kebiasaan nelayan Cipatuguran sebagai nelayan harian tidak berani mengambil resiko untuk melaut

⁷ Perahu Congkrang adalah perahu kecil dengan kapasitas muatan 2 -3 orang dilengkapi dengan motor tempel sebesar 40PK . Lamanya waktu melaut biasanya sekitar 8-12 jam dikarenakan keterbatasan daya tampung bahan bakar mesin.

menggunakan perahu diesel atau rumpon yang memakan waktu di lautan cukup lama. Namun ada kelompok-kelompok nelayan yang menjadi nelayan buruh bagi pemilik perahu diesel atau rumpon⁸.

Mata pencaharian nelayan Cipatuguran membentuk mereka pada satu pola ketergantungan pada alam, disebabkan karena pengetahuan dan teknologi yang dikuasai masih terbatas. Nelayan Cipatuguran memandang alam sebagai bentuk klasifikasi dari alam bawah dan alam atas. Struktur alam semesta yang berada disepertar kehidupan secara sederhana terbagi mejadi dua, yaitu dunia badag atau dunia besar dan dunia lembut atau dunia kecil. Kedua tempat tersebut masing-masing memiliki karakter tersendiri, terutama berkenaan dengan penghuni yang ada di dalamnya, tentu saja karakter itu menjadi pembeda diantara keduanya. (Syarif Moeis, 2008)

Jika cuaca dan ombak sedang tidak baik untuk melaut maka nelayan-nelayan Cipatuguran akan memeriksa perlengkapan melautnya, dan memperbaiki jaring-jaring yang sobek dipekarangan atau dipinggir-pinggir rumah. Tak jarang kondisi tidak melaut ini membuat kondisi perekonomian nelayan menjadi tidak baik pula karena tidak adanya pemasukan dari melaut. Kondisi ini kadang membuat nelayan menjual atau menggadaikan mesin perahu bahkan perahunya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3.3.3 Rona Ruang Kegiatan Masyarakat Nelayan Cipatuguran

Hubungan saling mempengaruhi antara perilaku-kegiatan terhadap ruang menunjukkan adanya sinergisitas sebagai kepentingan dan kinerja terhadap kebutuhan ruang. Penyediaan ruang sangat berkaitan erat dengan kegiatan utama komunitas sebagai nelayan dan kegiatan turunannya seperti kegiatan pengasinan hasil tangkapan dan sebagainya. Sehingga pembentukan lingkungan dari permukiman nelayan bertolak dari perilaku dan kegiatan masyarakat nelayan baik secara komunal maupun individual.

Pantai digunakan sebagai tempat penambatan perahu sebelum dan setelah melaut bagi nelayan Cipatuguran. Sehingga akses dari rumah menuju pantai

⁸ Rumpon merupakan salah satu jenis umpan dari seresah daun atau batang kelapa yang diikatkan pada pemberat diletakkan ditengah laut dengan kedalaman hingga 3000m.

menjadi penting. Tempat pendaratan ikan (TPI) yang biasanya menyatu dengan pelelangan ikan juga menjadi tempat yang berperan besar dalam kegiatan melaut bagi nelayan. Di tempat pendaratan ikan terjadi aktivitas pelelangan ikan sebelum ikan dipasarkan di pasar ikan Palabuhanratu. Namun karena hasil tangkapan yang tidak banyak maka hasil penjualan akan habis di TPI dan tidak dipasarkan di pasar ikan. Cipatuguran memiliki 3 tempat pendaratan ikan sekaligus pusat pelelangan ikan yang letaknya berada dekat pantai dan tempat nelayan melabuhkan perahunya.



Gambar 3.9 Kegiatan Masyarakat Nelayan Cipatuguran. Kiri: Aktivitas Masyarakat di TPI; Kanan: Tempat Melabuhkan Perahu-Perahu Nelayan
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei 2011

Proses pendistribusian hasil tangkap setelah melaut maka nelayan akan menambatkan perahunya dekat dengan lokasi pendaratan ikan dan berlangsung proses pelelangan ikan antara nelayan dan pemasok ikan untuk dijual kembali di pasar ikan Palabuhanratu. Untuk ikan yang tidak laku dibeli oleh pemasok sebagian akan dijual oleh istri nelayan keliling desa dengan alat pemanggul ikan dan sebagian lainnya akan dimanfaatkan oleh nelayan sebagai konsumsi pribadi keluarga mereka. Hal ini dilakukan agar tidak ada ikan yang terbuang.

Rumah juga menjadi tempat yang penting dalam kehidupan nelayan. Pekarangan rumah kerap kali dijadikan sebagai tempat memperbaiki jaring dan peralatan melaut lainnya, tempat bermusyawarah nelayan dan kelompoknya sebelum melaut dan menyimpan berbagai peralatan melaut.



Gambar 3.10 Pelataran rumah sebagai tempat menyimpan dan memperbaiki peralatan melaut
Sumber : Dokumentasi pribadi, Mei 2011

Nelayan yang tidak memiliki perahu akan bekerja dengan orang lain yang memiliki kapal. Nelayan ini disebut sebagai nelayan buruh. Nelayan buruh Cipatuguran akan melaut bersama 5-7 orang lainnya menggunakan perahu jenis diesel atau rumpon dengan masa melaut hingga 3 minggu. Persiapan yang dilakukannya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan nelayan congkrang. Persiapan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang jaraknya sekitar 3 km dari Kampung Cipatuguran. Pertama anggota perahu akan mengecek kondisi perahu dan perlengkapan lainnya, kemudian menyiapkan bahan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan (box berisi es dan garam) dan bahan perbekalan hidup selama di laut.



Gambar 3.11 Tempat Pendaratan Ikan sekaligus terjadi jual-beli hasil tangkapan ikan
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei 2011

Ketika hasil tangkapan dinilai cukup maka perahu akan kembali ke tempat penambatan sebelumnya (pelabuhan perikanan nusantara), penurunan ikan akan dilakukan oleh anggota perahu dan dibantu dengan buruh angkut yang sudah berada di lokasi pendaratan. Pencatatan hasil tangkapan dihitung oleh pemilik

kapal. Pemilik kapal ini biasanya tidak ikut melaut. Hasil tangkapan tersebut ada yang langsung dibawa ke tempat ekspor ikan, biasanya komoditas tuna dan tongkol yang diekspor, dan ada sebagian yang dilelang untuk kemudian dijual di pasar ikan Palabuhanratu maupun ke sekitar Sukabumi dan Jakarta.

3.3.4 Kondisi Fisik Permukiman Nelayan Cipatuguran



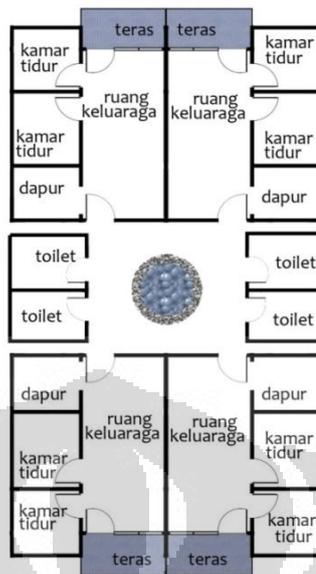
Gambar 3.12 Permukiman Nelayan Cipatuguran
Sumber : Google Earth, 2006 (telah diolah kembali)

Salah satu wilayah di Kampung Cipatuguran yang diobservasi ialah RW 21 yang terdiri dari 4 RT dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 332 KK, dengan distribusi KK per RT nya yakni RT 01 92 KK, RT 02 97 KK, RT 03 75 KK, dan RT 04 68 KK.



Gambar 3.13 Figure Ground Kampung Cipatuguran
 Sumber : Ilustrasi Pribadi, Mei 2011

Kondisi fisik permukiman nelayan Cipatuguran yang dikembangkan oleh pemerintah sejak tahun 1976 cukup baik dan tertata dengan pola grid yang terbagi oleh jalan-jalan lingkungan. Namun terdapat perluasan wilayah permukiman yang saat dibangun oleh pemerintah jarak antara garis pantai saat pasang tertinggi normal dengan permukiman sekitar 150 meter dari garis pantai kini menjadi sekitar 100 meter. Pertambahan penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan sebuah hunian, maka masyarakat dengan swadaya membangun sendiri rumahnya diluar dari batas permukiman yang telah dibangun oleh pemerintah kala itu. Radius terjauh saat pasang terjadi dapat mencapai 180 meter dari garis pantai.



Gambar 3.14 Tata letak rumah permukiman Kampung Cipatuguran sebelum berubah
Sumber : Ilustrasi pribadi, Mei 2011

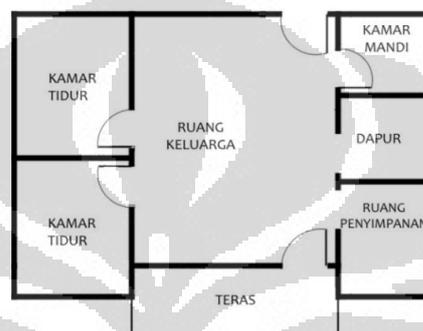
Pada tahun 1976 pemerintah kala itu menyiapkan 1 unit rumah untuk satu kepala keluarga. Per unit rumah tersebut memiliki luas 50m^2 dengan satu sumur untuk dua atau empat unit rumah dengan peletakan sumur berada diantara rumah yang saling membelakangi. Kondisi rumah asli yang dibangun oleh pemerintah dinding permanen dengan material bata sekitar 40% dari keseluruhan dinding rumah dan sisanya berupa bilik anyaman bambu. Namun kini hampir 90% penduduk merenovasi rumah secara keseluruhan.



Gambar 3.15 Foto sebelah kiri rumah salah satu warga yang belum direnovasi. Foto sebelah kanan rumah warga telah direnovasi

Sumber : Dokumentasi pribadi, Mei 2011

Seiring dengan berjalannya waktu perubahan terjadi di permukiman nelayan Cipatuguran. Kondisi permukimannya maupun rumah-rumah penduduk tersebut. Renovasi besar dilakukan oleh masyarakat setempat. Setidaknya renovasi yang dilakukan pada rumah keluarga Ibu Nunung yang telah tinggal di Kampung Cipatuguran sejak tahun 1990. Ia menempati rumah tersebut dengan kondisi yang telah diubah oleh pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya menggabungkan dua rumah menjadi satu dan mengubah sebagian fungsi ruang.



Gambar 3.16 Denah rumah salah satu penduduk yang telah direnovasi sebagian (menggabungkan dua rumah asli)

Sumber : Ilustrasi pribadi, Mei 2011

Bersatunya fasilitas usaha dengan rumah merupakan hal yang umum terjadi karena masyarakat menggunakan pelataran rumah dan gang-gang untuk memperbaiki dan menyimpan peralatan melaut. Ada beberapa keluarga yang membuka usaha seperti warung sembako untuk mendapatkan penghasilan tambahan, karena penghasilan sebagai nelayan yang tidak tentu. Warung tersebut akan dikelola oleh seorang istri.



Gambar 3.17 Foto kiri: Kondisi eksisting permukiman dan orientasi rumah.

Foto kanan: Rumah sekaligus tempat usaha

Sumber : Dokumentasi pribadi, Mei 2011

Jaringan jalan permukiman Cipatuguran terdiri dari tiga yaitu jalan utama, jalan lingkungan, dan jalan setapak. Jalan utama menuju permukiman Cipatuguran digunakan sebagai akses utama menuju pusat kota Palabuhanratu dan tempat lain disekitar kawasan tersebut memiliki lebar jalan sekitar 6-8 m. Kondisi jalan lingkungan permukiman nelayan Cipatuguran bukan berupa perkerasan aspal namun berupa tanah berpasir.



Gambar 3.18 Kondisi Jalan Lingkungan Permukiman Nelayan Cipatuguran
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei 2011



Gambar 3.19 Fasilitas Umum dan Sosial serta Ruang Terbuka berkegiatan masyarakat setempat.
Kiri-Kanan: Toilet Umum, Masjid, Bale-bale
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2011

Fasilitas sosial dan fasilitas umum terdiri dari dua masjid, satu puskesmas, satu sekolah taman kanak-kanak, satu sekolah menengah perikanan, lima toilet umum, tiga tempat pendaratan ikan. Toilet umum yang disediakan di kawasan ini sebagian besar sudah tidak terpakai karena masing-masing warga telah memiliki toilet pribadi di rumah mereka. Ruang terbuka berupa pantai dan ruang terbuka (lapangan masjid) digunakan sebagai tempat penjemuran atau tempat bermain anak. Pada permukiman nelayan ini juga terdapat ruang berkumpul warga berupa bale-bale non permanen.

3.4 Kawasan Inti Minapolitan Palabuhanratu (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

Lingkup Kawasan Inti Minapolitan adalah satu area Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berfungsi sebagai tempat berkegiatan di sektor perikanan yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu, serta sebagai tempat kegiatan pemerintahan (kantor dinas pelabuhan perikanan) dan kegiatan perikanan untuk tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

3.4.1 Kondisi Umum Kawasan Inti Minapolitan



Gambar 3.20 Lokasi Kawasan Inti Minapolitan
Sumber: Google Earth, 2006

Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Palabuhanratu adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan wilayah Minapolitan Perikanan Tangkap secara garis besar terdiri dari Zona Inti di Kawasan Pelabuhan Perikanan, Zona Pengembangan dan Pendukung. Wilayah Minapolitan Perikanan Tangkap di Palabuhanratu memiliki Zona Inti di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Pasar ikan

masuk kedalam kawasan zona inti Minapolitan meskipun penanganan dan manajemen pasar tidak dikelola oleh Dinas Pelabuhan Perikanan.



Gambar 3.21 Zonasi Kawasan Inti Minapolitan Palabuhanratu
Sumber: Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Maret 2011 (telah diolah kembali)

Fasilitas-fasilitas pokok yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meliputi (PPN Palabuhanratu, 2011) :

1. Dermaga pelabuhan terbagi dalam dermaga tambat dan dermaga bongkar dengan kapasitas areal tambat labuh seluas 310 m² dan perbekalan seluas 106 M², sedangkan tempat pendaratan perahu seluas 3.953 m².
2. Kolam I mempunyai luas 3 Ha dengan kedalaman 3 meter sedangkan kolam II mempunyai luas 2 Ha dengan kedalaman 4 meter. Pemecah gelombang adalah suatu struktur bangunan kelautan yang berfungsi khusus untuk melindungi pantai atau daerah di sekitar pantai terhadap gelombang laut.
3. Tempat Pelelangan Ikan memiliki luas 920 m² dan berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penjual (nelayan) dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan) untuk melakukan jual beli / transaksi lelang ikan.
4. Kantor Adiministrasi pelabuhan
5. Laboratorium Bina Mutu

6. Bangunan Bengkel Perikanan berfungsi sebagai tempat perbaikan mesin-mesin kapal perikanan yang mengalami kerusakan.
7. Restoran Ikan
8. Pasar Ikan
9. Depo Pengisian Bahan Bakar
10. Perusahaan-perusahaan eksportir ikan

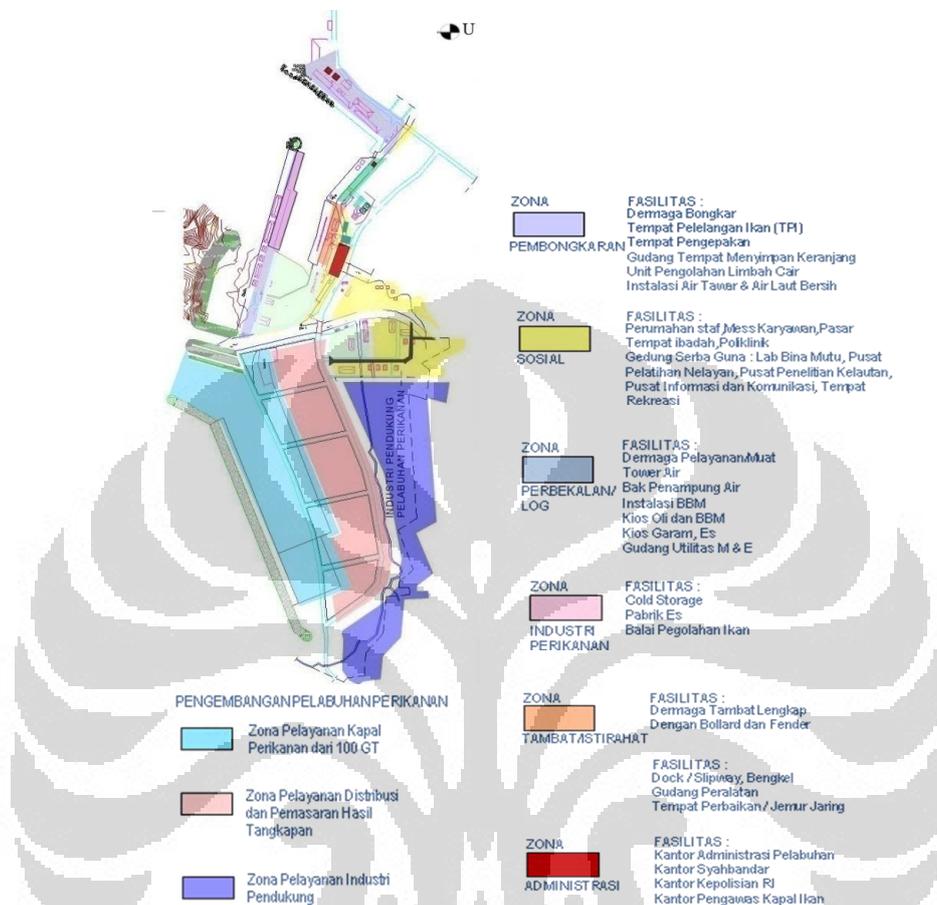


Gambar 3.22 Kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan (kiri), dan kegiatan dalam pasar ikan (kanan)
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2011

Kapal yang telah melaut akan menyandarkan perahunya di dermaga Pelabuhan Perikanan. Di Tempat Pendaratan Ikan telah menunggu buruh-buruh angkut ikan untuk menurunkan ikan dari kapal kemudian akan dibawa ke perusahaan ekportir ikan yang berada di Pelabuhan Perikanan juga. Namun ada sebagian komoditas ikan yang dijual di Pasar Ikan Palabuhanratu. Komoditas ikan yang dijual di pasar tersebut tidak hanya berasal dari tangkapan kapal yang melaut di Teluk Palabuhanratu, tetapi ada juga komoditas dari luar Palabuhanratu seperti dari Jakarta.

Komoditas terbesar dari hasil tangkapan ikan para nelayan Palabuhanratu adalah ikan tuna dan ikan layur. Untuk ikan tuna setelah penurunan langsung dibawa ke perusahaan eksportir ikan tuna di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu untuk diolah atau langsung diekspor. Terkadang distribusi hasil tangkap ikan dapat langsung dilakukan di laut. Penjualan hasil tangkapan biasa dijual di pasar tradisional Palabuhanratu dan pasar ikan modern yang menyatu dengan restoran ikan milik PPN Palabuhanratu.

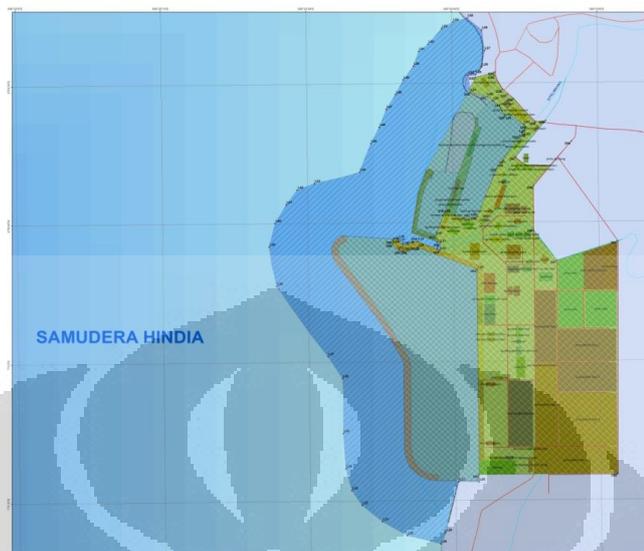
3.4.2 Pengembangan Rencana Induk Kawasan Inti Minapolitan Palabuhanratu



Gambar 3.23 Rencana Pengembangan Kawasan Inti Minapolitan Palabuhanratu
Sumber: Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Maret 2011
(telah diolah kembali)

Dinas Pelabuhan Perikanan berencana untuk mengembangkan kawasan inti Minapolitan guna mendukung kegiatan perikanan yang jauh lebih produktif dengan mengupayakan perubahan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menuju Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Dengan perubahan status Pelabuhan Perikanan Palabuhanratu menjadi PPS diharapkan hasil produksi tangkap meningkat dan daya tampung kapal yang masuk menjadi lebih besar serta fasilitas pendukung usaha perikanan dapat terpenuhi. Pengembangan tersebut diarah ke bagian selatan Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara.

3.4.3 Sistem Operasional dan Jaringan



Gambar 3.24 Peta Wilayah Kerja Darat dan Laut
Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
Sumber: Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara, 2011

Wilayah kerja operasional di PPN Palabuhanratu terbagi menjadi dua, yakni wilayah kerja operasional darat mencakup beberapa kecamatan di Sukabumi dalam kegiatan perikanan yang dikelola atau ditangani langsung oleh PPN Palabuhanratu. Kedua, wilayah kerja operasional laut, sesuai dengan status pelabuhan perikanan di Palabuhanratu yang merupakan Pelabuhan Perikanan Nusantara hanya mencapai zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut territorial. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe B atau kelas II. Pelabuhan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran 15 – 16 ton GT sekaligus. Pelabuhan ini juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan ZEE Indonesia dan perairan nasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40 – 50 ton / hari atau sekitar 8.000 – 15.000 ton / tahun.

BAB 4

MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP PADA KAWASAN PESISIR KOTA PALABUHANRATU

Kawasan pesisir Palabuhanratu tumbuh dan berkembang menjadi kawasan dengan kegiatan perikanan yang tinggi karena keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang berfungsi sebagai denyut nadi perdagangan sektor perikanan dalam skala nasional maupun internasional. Penetapan Palabuhanratu menjadi kawasan Minapolitan atau kota perikanan yang berbasis perikanan tangkap bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kawasan dan kesejahteraan masyarakat perikanan⁹ terutama nelayan yang memiliki ketergantungan akan kemudahan akses menuju laut dari daratan maupun sebaliknya.

Kegiatan perikanan yang bermula pada lautan sebagai proses awal seperti aktivitas penangkapan sumberdaya laut, penurunan dan penyimpanan hasil tangkapan, pengolahan hingga pendistribusian hasil laut di daratan. Kegiatan perikanan dan keseharian aktor-aktor, baik nelayan hingga wisatawan yang datang untuk menikmati kegiatan perikanan di Palabuhnratu, yang berperan dalam kegiatan tersebut mempengaruhi ruang-ruang yang akan membentuk kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap. Infrastruktur memiliki posisi yang sangat penting dalam pertumbuhan sebuah kota. Tanpa didukung oleh infrastruktur yang baik, kota tersebut tidak mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah ditentukan. Pada bab ini juga akan dikaji mengenai infrasturktur kota yang akan mendukung perkembangan Minapolitan Palabuhanratu.

Tapak wilayah Palabuhanratu yang diamati dan dibahas dalam penulisan ini meliputi wilayah yang disebut pusat kota oleh masyarakat Palabuhanratu, permukiman nelayan (Cipatuguran) hingga sepanjang pantai Citepus disebelah barat pusat kota Palabuhanratu, karena wilayah tersebut merupakan pusat dari kegiatan perikanan di Palabuhanratu.

Minapolitan sebagai sebuah kota merupakan wadah bagi manusia untuk bermukim didalamnya. Dalam kehidupannya manusia—masyarakat- butuh hal-hal yang dapat mendukung kelangsungan hidup mereka seperti tempat

⁹ Bab 1 Latar Belakang tujuan Minapolitan pada halaman 2

bernaung, makan, dan aktualisasi diri. Minapolitan sebagai kota yang berbasis pada kegiatan perikanan dan masyarakat didalamnya yang didominasi oleh nelayan serta terlibat dalam kegiatan tersebut tidak dapat meniadakan kebergantungannya dengan ketersediaan hasil tangkapan laut, seperti produksi/tangkapan laut yang memadai, kualitas yang terjaga, dan jaminan pasar untuk distribusi hasil tangkapan. Namun semua itu memiliki tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Minapolitan.

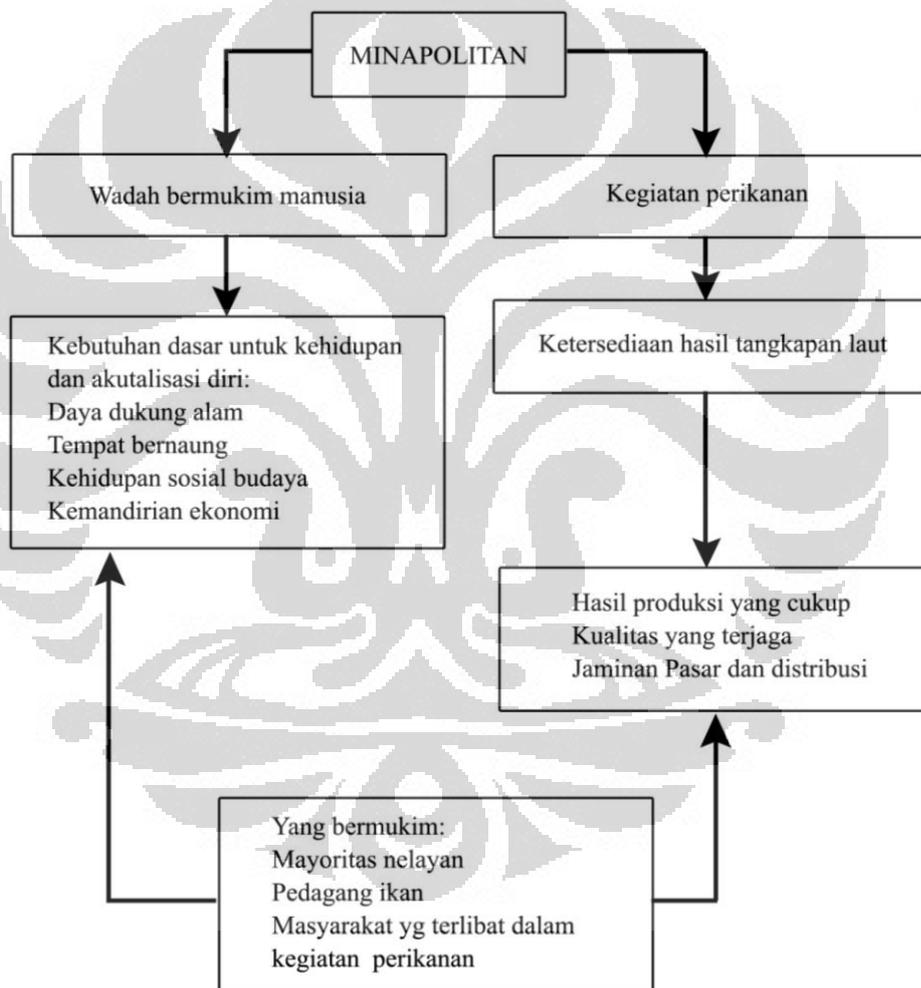


Diagram 4.1 Analisis Minapolitan

4.1 Kondisi Fisik Kawasan Pesisir Palabuhanratu Kaitannya Pada Gagasan Minapolitan

4.1.1 Kondisi Fisik Terbangun Palabuhanratu

Konstruksi bangunan pada kawasan pesisir mempengaruhi kondisi lingkungan kawasan pesisir. Pemanfaatan ruang terbangun di kawasan pesisir harus ada suatu aturan yang mengikat bagi yang akan membangun, mengembangkan dan menempati bangunan di kawasan pesisir antara lain ukuran suatu bangunan harus disesuaikan dengan daya dukung dari wilayah yang akan di bangun. Konstruksi bangunan sedapatnya dapat menekan atau menghambat laju abrasi pantai, penanganan sampah domestik harus baik dan tepat, serta penanaman pohon-pohon yang cocok dengan kondisi di kawasan pesisir sehingga membantu kestabilan pantai. Penataan lingkungan dan pemukiman masyarakat pesisir juga akan membantu masyarakat untuk hidup sehat di lingkungannya sendiri.

Pengembangan dan pembangunan Minapolitan memiliki prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. Prinsip-prinsip dapat mempercepat pertumbuhan kawasan pesisir. Dalam sudut pandang spasial, prinsip integrasi merujuk pada satu kesatuan dalam satu kota yang dapat menampung kegiatan-kegiatan perikanan dan tidak ada dikotomi-dikotomi antara kegiatan pariwisata, pelabuhan, maupun kegiatan nelayan. Gagasan Minapolitan bertujuan agar semua kegiatan-kegiatan perekonomian dapat saling bersinergi satu sama lain untuk memberikan keuntungan bagi kawasan Palabuhanratu. Efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk ekonomi kompetitif, kondisi ini dapat terjadi di kawasan Minapolitan yang terintegrasi memudahkan masyarakatnya untuk mengakses Palabuhanratu. Pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia maupun dalam pengembangan infratraktur kota.

Kawasan pesisir Palabuhanratu yang ingin mampu bersaing dengan kawasan pesisir lainnya harus melakukan percepatan dalam segala bidang. Infrastruktur yang terbangun dan terkelola dengan baik akan memberikan dampak yang signifikan bagi Palabuhanratu.

Sunoto¹⁰ menyatakan Program Nasional Minapolitan mengangkat konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan struktur:

1. Ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah: Indonesia dibagi menjadi sub – sub wilayah pengembangan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya alam, prasarana dan geografi
2. Kawasan ekonomi unggulan-minapolitan: setiap propinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan
3. Sentra produksi: setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan dan kegiatan lainnya yang saling terkait
4. Unit produksi/usaha: setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi atau pelaku-pelaku usaha.

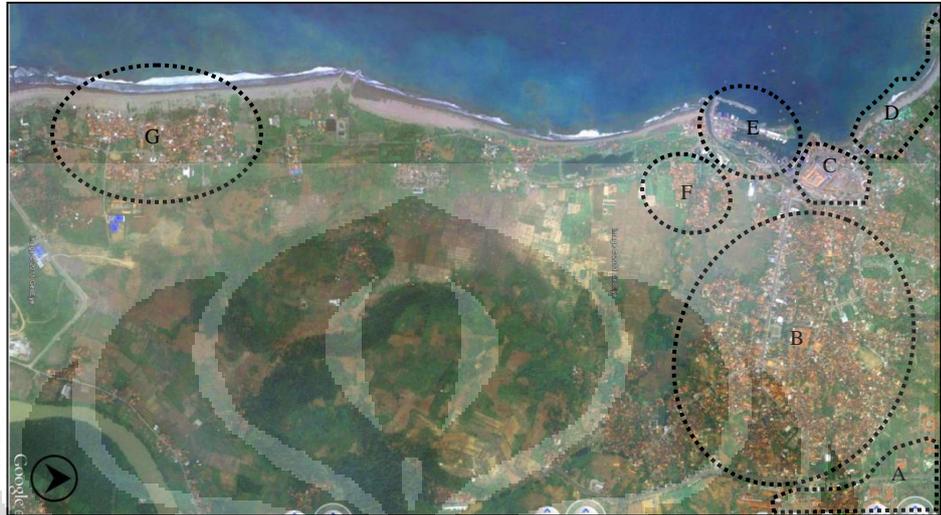
Tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas, dan Kualitas
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang adil dan merata
3. Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Karakteristik Minapolitan menurut KKP adalah wilayah tersebut telah memiliki sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan yang memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian di sekitarnya. Palabuhanratu didukung oleh keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai sentra

¹⁰ Arah kebijakan pengembangan konsep minapolitan di Indonesia

produksi sekaligus pemasaran hasil tangkapan, namun kendalanya adalah ada beberapa titik infrastruktur yang belum mendukung dan sarana transportasi darat yang tidak menjangkau semua wilayah Palabuhanratu.

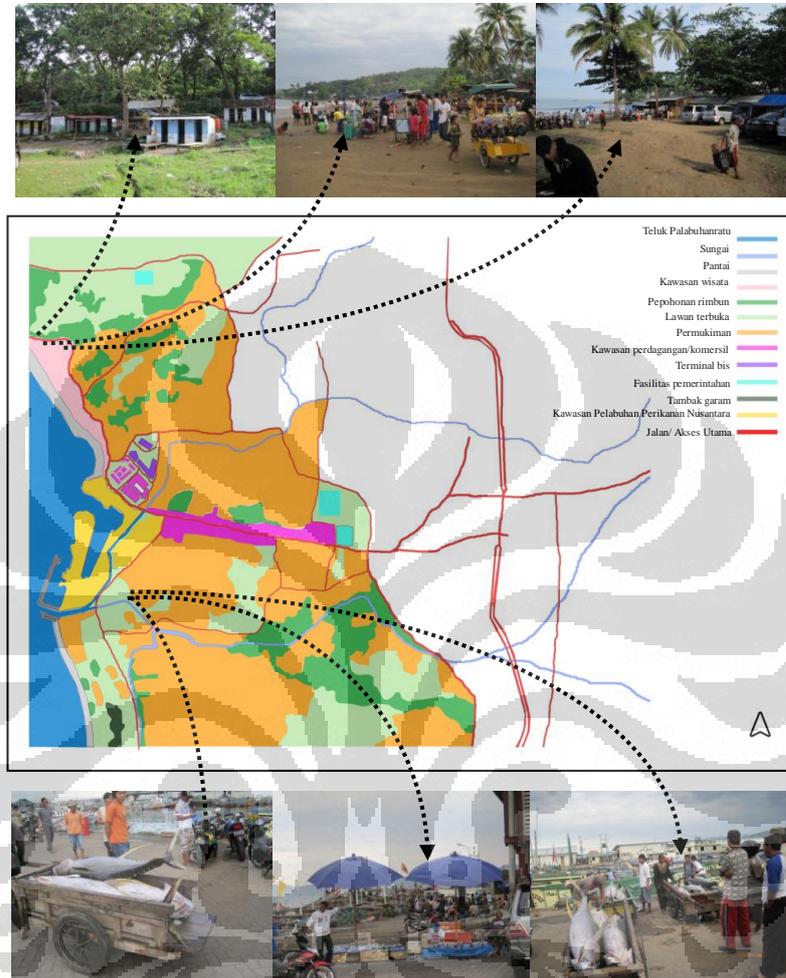


Gambar 4.1 Kawasan Observasi Penulisan Skripsi, Palabuhanratu
Sumber : Google Earth, 2006

A adalah kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Palabuhanratu. Kawasan B dan C didominasi oleh permukiman dan ruko-ruko juga terdapat terminal dan pasar tradisional Palabuhanratu, kawasan ini lah yang disebut ‘kota’ oleh masyarakat setempat, karena kegiatan ekonomi berpusat di wilayah ini. Kawasan D merupakan kawasan wisata untuk wisatawan, daerah tersebut banyak didominasi oleh resor maupun hotel-hotel. Kawasan D disebut kawasan inti Minapolitan, keberadaan PPN Palabuhanratu meningkatkan kegiatan perikanan didalamnya. Kawasan F dan G merupakan permukiman nelayan, F adalah perkampungan Majelis dan G adalah Perkampungan Cipatuguran.

Perkembangan Palabuhanratu terjadi dari bagian timur hingga barat, sehingga perkembangan ini dapat dikatakan perkembangan yang ekstensif maupun intensif karena telah berkembangnya jaringan sarana transportasi darat, namun disisi lain dari jaringan sarana transportasi darat yang masih belum memadai pada bagian selatan Palabuhanratu (sepanjang Jalan Cipatuguran,

termasuk permukiman nelayan) perkembangannya masih perkembangan intensif.



Gambar 4.2 Aktivitas kegiatan Kawasan Palabuhanratu
Sumber : Ilustrasi pribadi, November 2011

Stuart Chapin¹¹ menyebutkan perilaku kehidupan manusia dan proses imbal balik nya membentuk pola-pola keruangan dalam suatu wilayah dan berdasarkan empat pola perkembangan *built up areas* yang dijelaskan oleh Sujarto(1980)¹², Palabuhanratu termasuk dalam daerah kota Pantai. Namun keberadaan perkampungan nelayan sebagai entitas utama bagi kawasan pesisir ini masih tetap memberikan kontribusi bagi bergeraknya kegiatan ekonomi perikanan di Palabuhanratu. Perbedaan perkembangan ini dapat menyebabkan

¹¹ Bab 2 pada subbab Permukiman Pesisir dan Pola Permukiman halaman 18

¹² Ibid

pertumbuhan dan perkembangan Palabuhanratu sebagai Minapolitan Perikanan Tangkap tidak sesuai dengan prinsip integrasi dan dapat menghambat laju percepatan pertumbuhan kawasan.

Palabuhanratu yang terkenal dengan wisata bahari dan pantainya memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun manca negara. Wilayah pariwisata ini terletak sekitar 3-5 km dari pusat kota Palabuhanratu, sepanjang jalur utama yang menghubungkan pusat kota Palabuhanratu. Namun patut disayangkan kawasan wisata, terutama Pantai Citepus sebagai salah satu *public space* yang sering dikunjungi oleh masyarakat Palabuhanratu tidak dikelola dengan baik. Fasilitas umum seperti toilet umum yang berada di pinggir Pantai Citepus konstruksinya tidak dalam kondisi yang baik dan cenderung terbengkalai, tidak diberikan area khusus bagi pedagang-pedagang kaki lima dan area parkir bagi pengunjung. Sepanjang pantai di bagian utara telah berdiri bangunan-bangunan resor atau hotel untuk mengakomodasi turis-turis dan restoran-restoran olahan laut yang cukup terkenal di Palabuhanratu.

Keberadaan PPN Palabuhanratu juga telah menjadi salah satu tempat yang harus dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan yang hanya ingin melihat kegiatan nelayan saat menurunkan ikan dan proses lelang ikan di TPI. Hal ini menunjukkan bahwa selain berselancar di laut atau pun menikmati keindahan alam, wisatawan juga menikmati kegiatan perikanan nelayan yang tersaji di kawasan tersebut.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta peningkatan dalam sektor pariwisata (wisatawan banyak yang mengunjungi Palabuhanratu) menimbulkan dampak pembangunan di wilayah pesisir akan meningkat, sedangkan salah satu ancaman Palabuhanratu yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa adalah gempa bumi di bawah laut yang dapat mengakibatkan gelombang Tsunami karena lempeng tektonik yang melewati Palabuhanratu.

Minapolitan sebagai kota yang terletak di tepi pantai harus dapat melihat tantangan bencana alam tersebut. Manusia dengan ilmunya tidak akan mampu mengalahkan kekuatan alam, namun dengan kerendahan hati manusia mampu

beradaptasi dengan kondisi alam di pesisir yang fluktuatif. Kondisi topografi Pelabuhanratu yang berbukit memberikan keuntungan tersendiri karena dapat digunakan sebagai lokasi evakuasi, pemerintah setempat telah memasang penanda jalan yang menunjukkan arah lokasi evakuasi dan telah memasang *early warning system*, sehingga masyarakat dapat waspada dan bersiaga ketika *early warning system* berbunyi. Namun jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Pelabuhanratu menuju perbukitan mencapai 700 meter, hal ini sangat tidak mungkin bagi manusia dapat menempuh jarak 700 meter dalam waktu singkat, mengingat kecepatan gelombang tsunami dapat mencapai 700 km/jam dengan ketinggian ombak mencapai 10 meter.

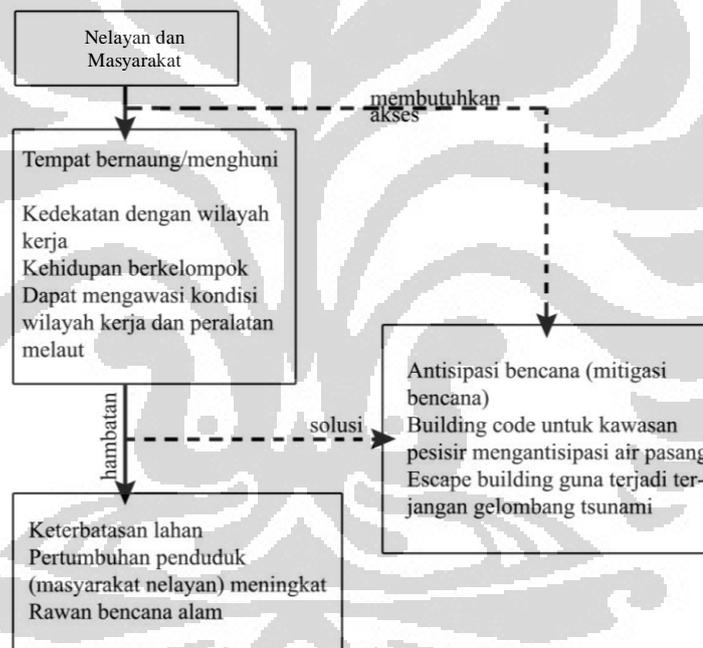
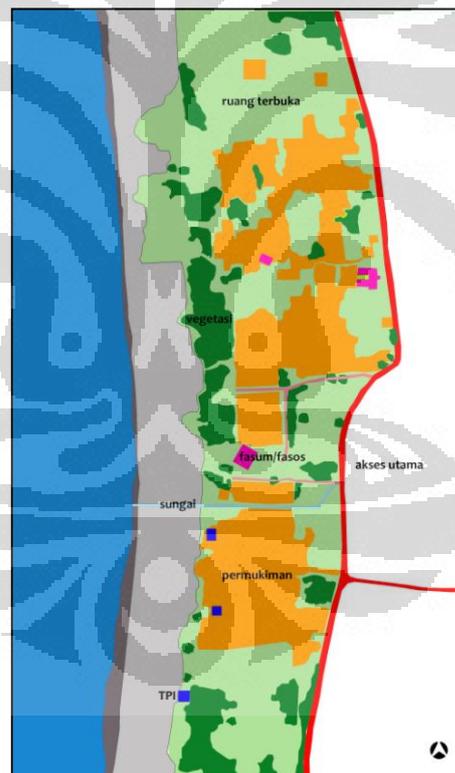


Diagram 4.2 Analisis Minapolitan dilihat dari kebutuhan tempat bernaung



Gambar 4.3 Marka jalan lokasi evakuasi bencana dan plang peringatan bencana
Sumber : Dokumentasi pribadi, November 2011

4.1.2 Kondisi Permukiman di Kawasan Pesisir Palabuhanratu, Cipatuguran



Gambar 4.4 Kawasan Cipatuguran
Sumber : Ilustrasi pribadi, November 2011

Kampung Cipatuguran terletak 3 Km di sebelah Utara ibukota kecamatan, sebagai suatu pemukiman yang mencirikan pola perkampungan yang

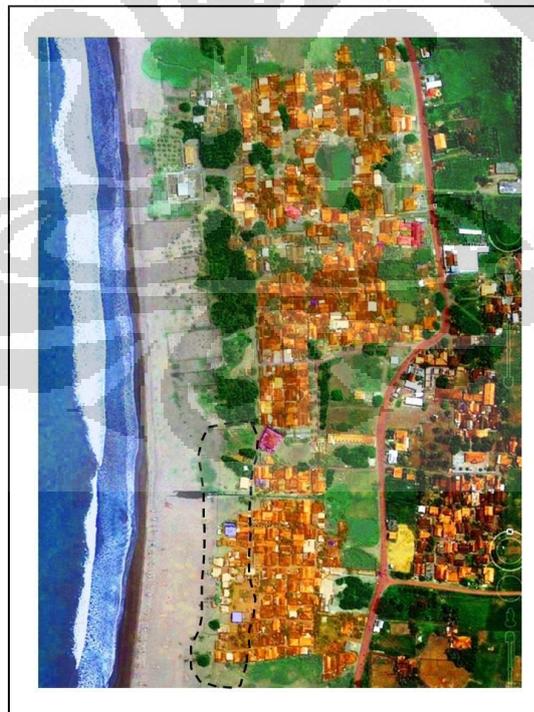
mengelompok. Struktur kawasan permukiman nelayan Cipatuguran memiliki ciri khas dan pola ditunjukkan seperti adanya ruang-ruang terbuka yang kedekatannya dengan akses terlihat di struktur kawasan tersebut untuk mendukung kegiatan permukiman ini. Ruang terbuka, fasilitas umum dan sosial menjadi pusat bagi kegiatan masyarakat. Sungai tidak berperan penting bagi kegiatan nelayan karena sungai yang berada di kawasan ini kecil dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai kanal untuk melabuhkan perahu-perahu mereka. Permukiman nelayan Cipatuguran itu sendiri terletak lebih kedalam dari akses utama (jalan utama) sehingga bila dilihat dari luar yang pertama terlihat adalah ruang-ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat penjemuran. Pembangunan rumah oleh masyarakat dilakukan kearah pantai, hal ini menyalahi aturan garis sempadan pantai dan dapat mengakibatkan resiko dampak bencana alam lebih besar di Permukiman nelayan tersebut. Akses utama lebih didominasi oleh keberadaan fasilitas pemerintah seperti pos angkatan laut, pusat kesehatan masyarakat dan keberadaan stasiun penelitian kelautan IPB, sekolah perikanan, juga laboratorium perikanan dan kelautan dinas Provinsi Jawa Barat.

Pola permukiman makro Cipatuguran secara umum dapat digambarkan seperti dibawah ini. Dari pola dibawah terlihat bangunan yang dekat dengan sungai, muka bangunan menghadap ke arah sungai dan untuk bangunan yang jauh dari sungai muka bangunannya menghadap jalan. Namun seluruh rumah yang berada pada bagian terluar permukiman Cipatuguran tidak menghadap kearah pantai (laut) karena paparan angin barat yang cukup kencang di Pantai tersebut. Tidak ada batas jelas yang memisahkan bagian mana yang dapat dibangun dan bagian mana yang seharusnya tidak dibangun. Hanya bangunan-bangunan fasilitas umum dan sosial saja yang menghadap kearah pantai, seperti bale-bale dan tempat penurunan ikan.

Kondisi fisik kawasan yang dibangun oleh pihak pemerintah secara terencana namun tanpa mempertimbangkan historis keberadaan nelayan dan kegiatannya. Secara historis perkembangan permukiman atau desa nelayan bertolak dari kegiatan nelayan yang sudah turun temurun baik nelayan dengan

alat tradisional hingga modern. Bentuk desa nelayan didorong oleh persamaan kepentingan dan corak kehidupan mereka yang berkelompok serta sifat pekerjaan dan kehidupan mereka yang cenderung terikat pada tempat-tempat yang dapat mendukung kegiatan mereka, dan berkembang dengan perkawinan diantara kelompok mereka dan tumbuh dengan sendirinya hingga terbentuk masyarakat sendiri.

Permukiman nelayan cenderung tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang menguntungkan untuk kegiatan nelayan dan pendaratannya. Hingga timbul permukiman yang berkembangnya bergantung dengan kondisi setempat. Hal tersebut yang menyebabkan nelayan Cipatuguran menempatkan TPI di daerah pinggir pantai sebagai tempat strategis untuk pendaratan mereka karena pada awal mulanya pemerintah tidak menyediakan TPI untuk menunjang kegiatan nelayan. Dengan keberadaan TPI sebagai bangunan penting dalam kegiatan mereka maka tumbuh lah rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat nelayan setempat dekat dengan fasilitas tersebut selain untuk memudahkan mereka memantau perahu-perahu mereka.

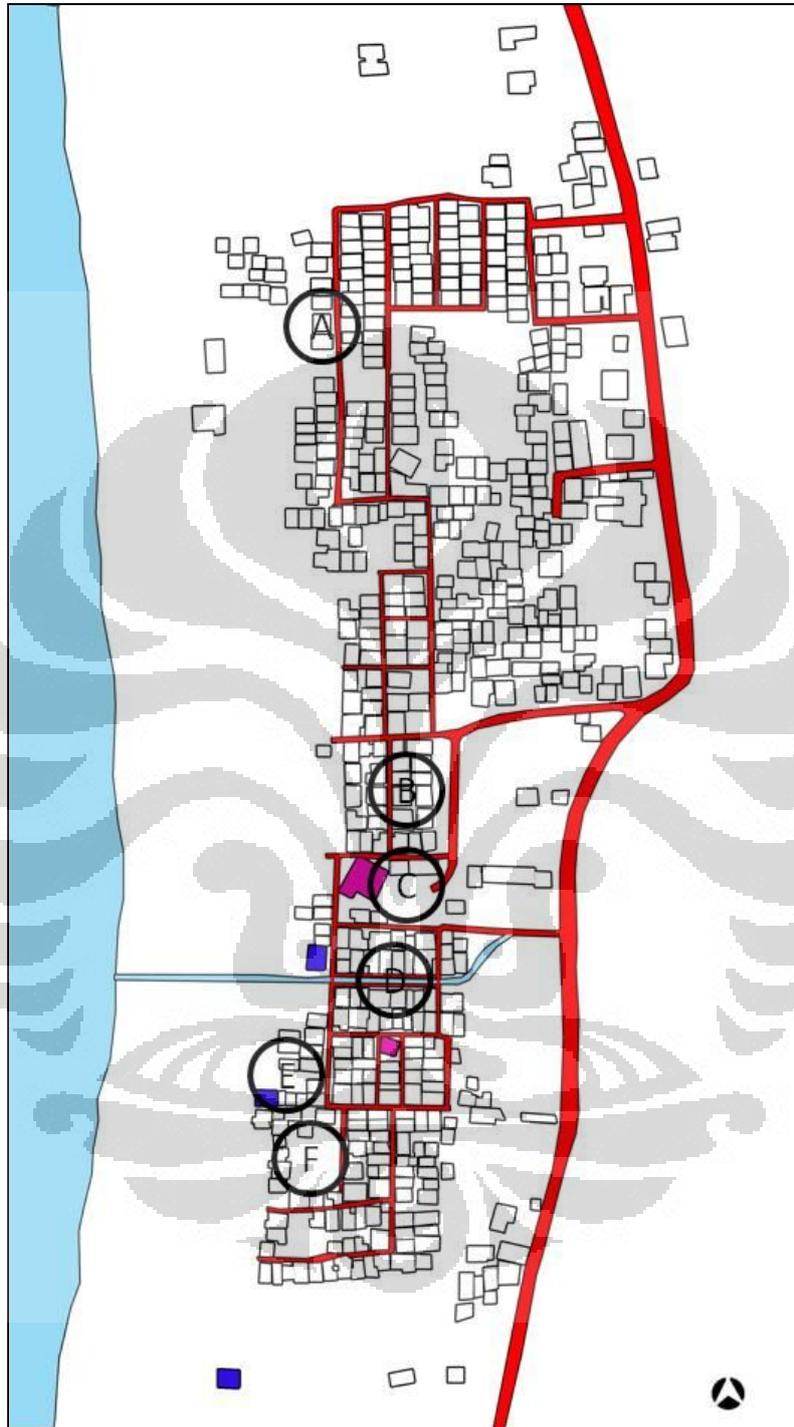


Gambar 4.5 Perubahan Fungsi Lahan Kawasan Pesisir
Sumber: Google Earth, 2006 (telah diolah kembali)

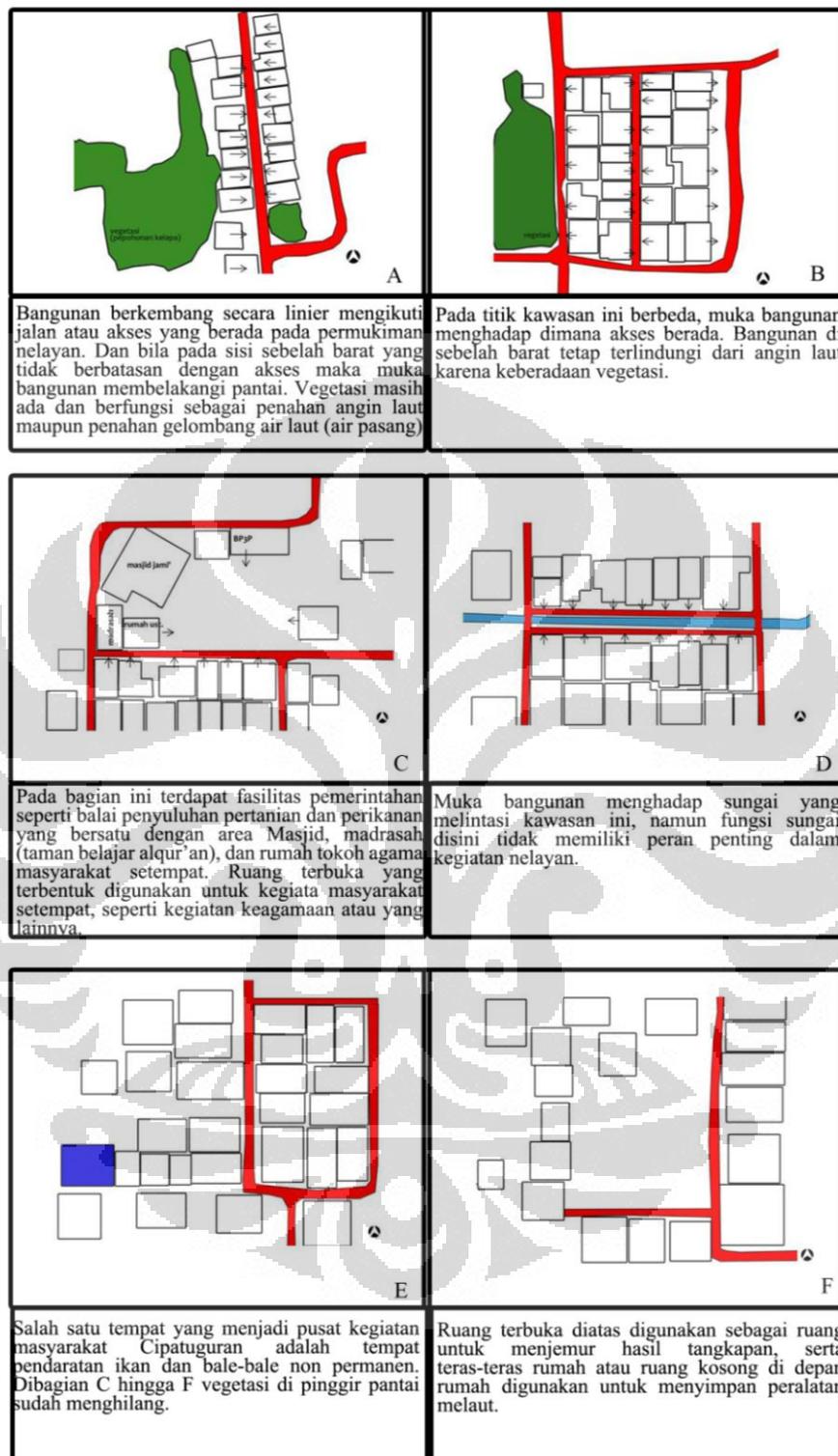
Hal ini menyebabkan batas permukiman Cipatuguran berubah dan semakin mendekati pantai karena zona konservasi yang seharusnya merupakan daerah penyangga (vegetasi) berubah fungsi dengan dibangunnya rumah-rumah oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat menyebabkan abrasi karena tidak ada vegetasi yg menahan gerusan air laut. Selain itu bergesernya garis pantai disebabkan juga oleh aktivitas pembangunan PLTU di selatan Cipatuguran. Air pasang juga dapat mengancam kawasan ini, menurut warga setempat sesaat setelah bencana alam tsunami di Pangandaran, kawasan ini mengalami pasang laut yang cukup tinggi mencapai satu meter dan hingga 500 meter dari garis pantai ke arah permukiman. Vegetasi yang seharusnya bisa berfungsi untuk melindungi daerah permukiman dari pasang laut dan gelombang ombak besar (seperti tsunami).

Dilihat dari lamanya masyarakat tinggal di kawasan ini, hampir seluruh masyarakat sudah menempatnya lebih dari lima tahun, bahkan ada beberapa masyarakat yang telah tinggal sejak pertama kali relokasi kawasan permukiman nelayan Cipatuguran. Kondisi ini terjadi disebabkan masyarakat sudah turun temurun tinggal di kawasan pesisir. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir telah menyatu dengan lingkungan tempat tinggalnya sehingga sulit untuk pindah dari lokasi tersebut apalagi bila dipindah jauh dari akses mereka menuju laut. Karena letak permukiman nelayan sangat terikat dengan tempat-tempat yang dianggap strategis bagi kegiatan mereka, laut dan kanal-kanal sungai, sehingga dalam memasarkan hasil tangkapan atau olahan mereka kerap kali harus menempuh jarak yang cukup jauh.

Keterkaitan kegiatan nelayan dengan ruang-ruang pada permukiman nelayan Cipatuguran dapat dilihat pada pola spasial yang terbentuk. Beberapa titik yang penting diambil untuk melihat ruang-ruang yang terbentuk.



Gambar 4.6 Pola Permukiman Ciptuguran
Sumber : Ilustrasi pribadi, Desember 2011



Gambar 4.7 Spasial Permukiman Cipatuguran

Sumber : Ilustrasi pribadi, Desember 2011

4.2 Kegiatan Perikanan Palabuhanratu

Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan sehingga wilayah operasinya jadi terbatas, hanya sekitar perairan pantai. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan, maka permasalahan para nelayan di kawasan pesisir dalam upaya meningkatkan produksi perikanan perlu ditunjang dengan peningkatan kualitas armada kapal, baik secara kelompok maupun individu, sehingga dapat mencapai area tangkap yang lebih jauh dan luas. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan pemberian kemudahan pendanaan (dengan perkreditan/koperasi) dan pengadaan barang (peralatan tangkap, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari lainnya). Pendapatan masyarakat di kawasan pesisir, akan berpengaruh terhadap kualitas pemukiman dan lingkungan kawasan pesisir.

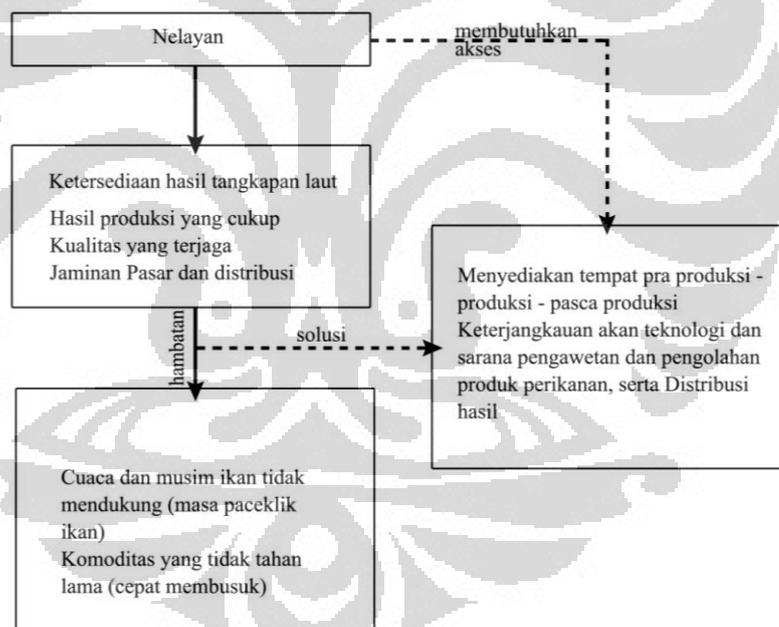


Diagram 4.3 Analisis Minapolitan berdasarkan dari kegiatan perikanan nelayan

Selayaknya telah diketahui Minapolitan yang khususnya berbasis perikanan tangkap tidak bisa lepas dari tapak yang membentuknya. Seluruh kota yang ditetapkan sebagai Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap oleh KKP

merupakan kota yang terletak dipesisir laut. Pada Bab 2 telah dijabarkan karakteristik kawasan pesisir yang sangat khas karena dipengaruhi oleh daratan dan lautan, hal ini menyebabkan pesisir menjadi daerah yang rawan dan fluktuatif. Kondisi iklim dan cuaca yang tidak baik bisa menyebabkan hasil tangkapan tidak memadai.

Berdasarkan dari kepemilikan alat tangkap nelayan di Palabuhanratu dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan¹³. Ketiga nelayan tersebut memiliki jam kerja di laut dan menggunakan jenis perahu/ kapal dan sistem penangkapan yang berbeda satu sama lainnya. Nelayan buruh di Palabuhanratu merupakan nelayan yang melaut dengan jenis perahu-perahu besar seperti rumpon, diesel, dan payang dengan daya jelajah yang jauh dan waktu melaut hingga satu bulan lamanya. Nelayan juragan yakni pemilik kapal yang biasanya tidak ikut melaut, mereka hanya melakukan pembagian tugas untuk nelayan buruh di darat sebelum melaut dan menyediakan perbekalan bagi nelayan buruh. Nelayan perorangan merupakan nelayan yang paling mendominasi di perkampungan-perkampungan nelayan di Palabuhanratu, khususnya di perkampungan nelayan Cipatuguran.

4.2.1 Nelayan Tangkap Harian

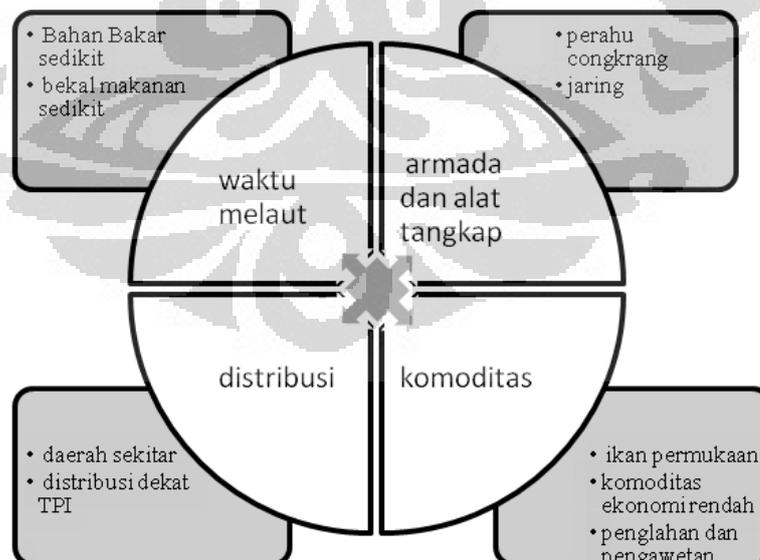


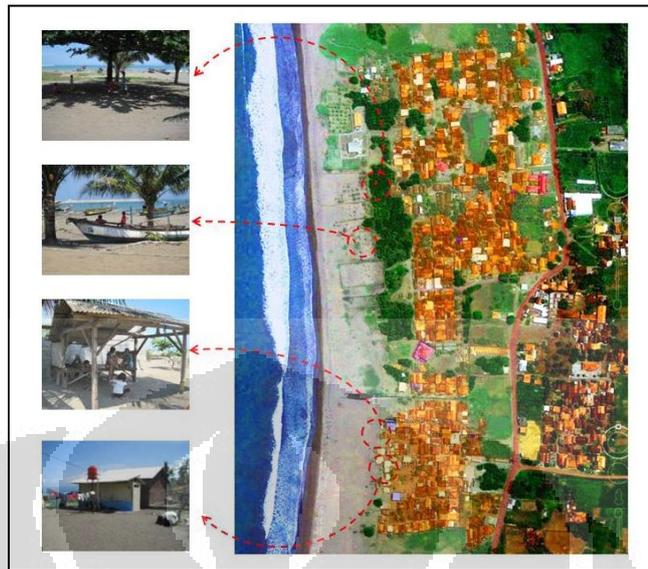
Diagram 4.4 Nelayan Harian Cipatuguran

¹³ Pada Bab 2 sub bab Karakteristik Masyarakat Nelayan Tangkap halaman 28

Telah dijelaskan pada Bab 2 mengenai perkembangan kawasan pesisir, Spiro Kostof menyatakan bahwa kondisi tapak yang berbeda dan bagaimana cara permukiman beradaptasi dengan air akan memberikan karakter pada bentuk kota dan respon yang terjadi dengan menyelaraskan pertumbuhannya dengan tapak. Ternyata tidak hanya membentuk karakter kota namun juga mempengaruhi kultur, corak, dan struktur ekonomi masyarakat setempat. Palabuhanratu yang merupakan daerah pantai memiliki masyarakat yang sebagian besar sumber pendapatannya berasal dari usaha penangkapan ikan dan pengolahan ikan. Mereka lebih dikenal dengan sebutan masyarakat nelayan¹⁴. Ciri khas masyarakat nelayan khususnya nelayan Cipatuguran dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dari kondisi nyata pada kawasan tersebut. Ciri khas yang tampak pada kawasan ini antara lain:

1. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai nelayan maupun pedagang dan memiliki industri rumah tangga maupun menengah yang bergerak pada sektor perikanan dan memiliki keterampilan khusus seperti memperbaiki jaring, menebar jaring, mengolah ikan dan membaca kondisi alam.
2. Pada bagian luar rumah digunakan sebagai tempat menyimpan atau menaruh peralatan melaut (jaring, mesin perahu, alat pancing dan lainnya).
3. Terdapat ruang-ruang bersama untuk menjemur ikan dan mengolah ikan, serta terdapat tempat penurunan ikan yang selain berfungsi untuk menurunkan hasil tangkapan juga sekaligus menjual hasil tangkapan dan sebagai tempat berkumpul warga.

¹⁴ Bab 2 Kawasan Pesisir Kota Dan Minapolitan pada halaman 25 mengenai definisi nelayan



Gambar 4.8 Suasana ruang pantai Cipatuguran
Sumber: Google Earth, 2006 (telah diolah kembali)

Berdasarkan dari durasi kerja melaut, daya jelajah dan jenis perahu¹⁵ yang digunakan nelayan Cipatuguran termasuk kedalam nelayan harian, dengan rata-rata kerja mencapai 10-12 jam dengan di laut untuk kemudian kembali lagi ke daratan dengan membawa atau tidak membawa hasil ikan jika musim tangkap atau cuaca alam sedang tidak baik. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa pola kerja nelayan seperti itu membuat mereka sangat bergantung dengan alam. Berdasarkan waktu melaut nelayan Cipatuguran melaut terbagi menjadi tiga; 1. Nelayan yang berangkat melaut pada dini hari kemudian kembali ke daratan pada siang hari, 2. Nelayan yang berangkat melaut selepas isya kemudian kembali ke daratan saat subuh, 3. Nelayan yang melaut pada siang hari dan kemudian kembali ke daratan pada tengah malam. Ini terjadi karena bergantung kondisi laut, ombak dan angin atau komoditas yang dibutuhkan.

Berdasarkan dari relasi keluarga nelayan Cipatuguran didominasi oleh nelayan perorangan dan nelayan kelompok. Nelayan perorangan disini adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan pengoperasiannya dilakukan oleh beberapa anggota laki-laki di keluarga tersebut. Nelayan

¹⁵ Jenis perahu yang digunakan adalah perahu congkrang. Telah dijelaskan pada Bab Studi Kasus Kawasan Palabuhanratu halaman 45

kelompok merupakan gabungan dua hingga tiga nelayan namun anggota nelayan lainnya sifatnya hanya membantu pemilik perahu. Sebelum melaut anggota nelayan akan mempersiapkan segala kebutuhan seperti perbekalan. Anggota nelayan dari perahu congkrang terdiri dari tiga orang, pemilik perahu akan menjadi pemimpin selama melaut karena dianggap lebih berpengalaman dan berpengetahuan dari anggota yang lain. Dua anggota yang lain berperan sebagai pembantu penangkap ikan dan pemegang kemudi. Walaupun pola pembagian kerjanya tegas, tetapi setelah ada di tengah laut biasanya masing-masing orang saling membantu, namun dari semua itu tetap saja peranan pimpinan yang paling menentukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Masyarakat nelayan Cipatuguran setidaknya telah mengembangkan dua cara dalam menangkap ikan; 1. Penangkapan di tengah laut, dan 2. Penangkapan di pinggir pantai. Masing-masing cara memerlukan mekanisme dan perangkat kerja yang berbeda, tergantung dari lokasi penangkapan dan jenis ikan.

Teknik penangkapan ikan di daerah pinggiran pantai adalah dengan menggunakan jaring. Teknik penangkapan ini disebut ngarad. Jaring ditebar di daerah pinggir pantai dengan menggunakan perahu, kemudian di tarik dari arah pantai. Pertama setiap ujung jaring diikat dengan tali sepanjang 200 meter. Untuk menggunakan teknik ini diperlukan 5-10 orang nelayan. Mula-mula mereka pergi ke daerah pantai yang diperkirakan banyak ikannya, sebagian nelayan berdiri dipantai memegang salah satu ujung tali jaring, sementara itu mereka memperhatikan dua nelayan lainnya yang membawa jaring ke laut dengan mempergunakan perahu, satu orang bertugas mendayung perahu dan seorang lagi menebar jaring sedikit demi sedikit dengan cara memutar dari arah kiri ke kanan hingga jaring mengembang di laut. Setelah selesai, perahu kembali lagi ke pantai dengan membawa ujung tali yang sebelah kanan.

Nelayan lainnya bersiap untuk menarik jaring, tiga hingga lima orang nelayan berada pada kedua ujung tali dan satu orang yang bertugas menggulung tali, aktivitas ini juga melibatkan perempuan, umumnya adalah anggota keluarga

dari nelayan yang bersangkutan. Setelah seluruh jaring ditarik, mulai diperiksa seberapa banyak ikan yang didapat, bila beruntung kelompok nelayan ini bisa mendapatkan sampai 20 kg macam-macam ikan kecil, bila kurang beruntung bahkan hanya 1-2 ekor ikan saja yang terjaring. Hasil tangkapan ini kemudian dibagi menurut berapa orang nelayan yang berperan dalam kegiatan itu. Tidak ada waktu khusus untuk melakukan kegiatan ini, yang jelas tidak dilakukan pada saat laut sedang pasang.

Tidak sembarang nelayan dapat mencari ikan di tengah lautan, ini tentunya tergantung dari perangkat yang dimiliki dan jenis ikan yang akan ditangkap. Ada tiga daerah penangkapan yaitu; 1. Lintas satu, yaitu jenis laut dangkal dekat daerah pantai, pada areal penangkapan ini tidak ada kapal-kapal besar yang melintas, 2. Lintas dua, yaitu jenis laut dalam namun tidak terlalu jauh dari pantai, bukan areal lintasan kapal besar, juga semacam pembatas areal penangkapan lokal dalam arti nelayan dari daerah lain tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan disini, 3. Lintas tiga, jenis laut dalam dan merupakan areal lintas laut internasional atau disebut sebagai laut bebas dalam pengertian sebagai daerah penangkapan ikan umum, siapa dan dari mana saja nelayan itu berasal boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan (Moeis, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga, jarak terjauh yang mungkin mereka tempuh adalah sepanjang ciri-ciri daratan masih terlihat. Ciri-ciri tersebut berperan sebagai pembatas penangkapan ikan dan juga petunjuk untuk kembali ke darat. Bila ciri daratan sudah tidak terlihat, nelayan merasa kesulitan tentang arah mana yang dituju untuk kembali. Ciri alam yang dipakai sebagai pedoman nelayan Cipatuguran adalah gunung Jayanti disekitar Palabuhanratu.

Saat musim paceklik (karena kondisi cuaca dan keberadaan ikan) atau masa istirahat nelayan akan libur dari kegiatan melaut. Kegiatan nelayan diisi dengan memperbaiki peralatan penangkapan ikan yang rusak. Mereka akan memperbaiki jaring hingga mesin/motor tempel perahu yang rusak. Kegiatan ini dilakukan dipekarangan rumah maupun ruang-ruang terbuka dekat dengan rumah ataupun tempat penyimpanan peralatan tangkap mereka.

Kondisi ketidakpastian hasil tangkapan ini membuat rumah tangga nelayan terancam. Disinilah peran keluarga terutama istri dan anak-anak nelayan menjadi sangat penting karena harus ikut mencari nafkah untuk kelanjutan hidup mereka hingga sang suami dapat melaut kembali dan mendapatkan tangkapan yang bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Begitu juga dengan kondisi nelayan buruh bila sedang tidak melaut, nelayan buruh akan bekerja apapun di darat untuk memperoleh penghasilan sehingga kehidupan rumah tangga nelayan tersebut akan terus berlangsung.

Namun kini nelayan Cipatuguran telah berkembang, ada beberapa istri di keluarga nelayan membuka usaha warung kecil-kecilan di rumah untuk membantu keuangan keluarga sehingga saat paceklik mereka masih mendapatkan penghasilan. Ada pula yang memiliki keterampilan untuk memperbaiki barang elektronik serta memiliki kendaraan pribadi yang digunakan untuk mencari nafkah.

Ada dua rute yang dilakukan oleh nelayan harian Cipatuguran dalam kegiatan harian melaut menangkap ikan dengan urutan rangkaian kerja. Pertama sebagai berikut;

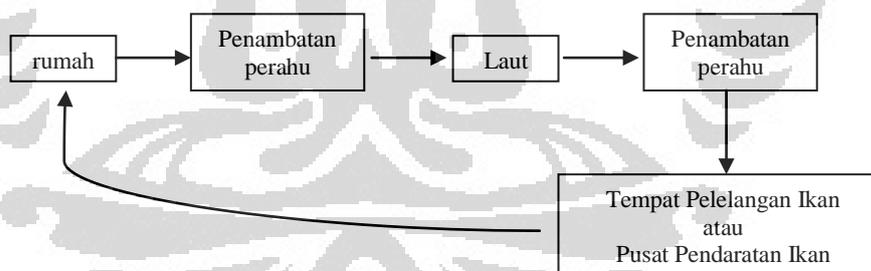


Diagram 4.5 Analisis Rute Rangkaian Kerja Nelayan Cipatuguran

Penambatan perahu dilakukan dipesisir pantai karena kampung ini tidak memiliki dermaga atau tempat yang dapat dijadikan lokasi penambatan. Sebenarnya kawasan PPN Palabuhanratu menyediakan dermaga untuk menambatkan perahu-perahu nelayan namun lebih didominasi oleh perahu/kapal dengan mesin dan muatan lebih besar seperti jenis kapal Longland, Diesel, Rumpon, dan Payang. Sebagian besar nelayan Cipatuguran tidak menambatkan

perahunya di PPN Palabuhanratu karena jarak antara PPN Palabuhanratu dan kampung mereka cukup jauh, sehingga nelayan tidak dapat memantau kondisi perahu mereka. Disini pesisir laut memiliki peran yang signifikan karena fungsinya sebagai penambatan perahu. Kedua, nelayan harian ini menambatkan perahu mereka setelah melaut di PPN Palabuhanratu;

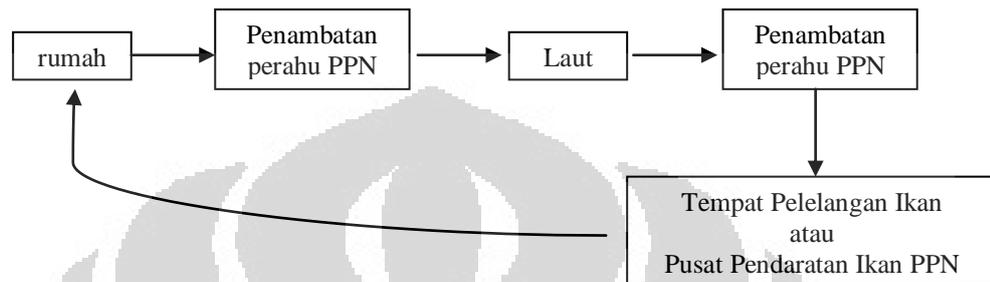


Diagram 4.6 Analisis Rute Rangkaian Kerja Nelayan Tangkap

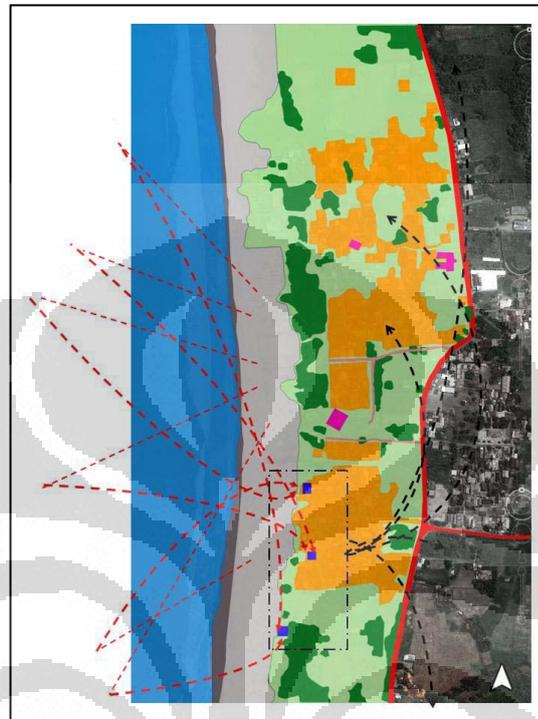
Nelayan cipatuguran tidak berani jika melaut dengan kapal dengan muatan dan daya jelajah lebih jauh, dan waktu dilaut yang lebih lama karena resiko yang cukup besar. Oleh karena itu mereka terbiasa menjadi nelayan harian. Meskipun ada yang menjadi nelayan rumpon atau longland biasanya mereka adalah nelayan buruh. Komoditas tangkapan utama nelayan cipatuguran adalah ikan layur. Bila musim ikan, tangkapan dapat mencapai 20 kg dalam sehari.



Gambar 4.9 Garis Pantai sepanjang Cipatuguran hingga PPN Palabuhanratu
Sumber: Google Earth, 2006 (telah diolah kembali)

Ada dua pilihan bagi nelayan Cipatuguran untuk menjual hasil tangkapan ikan yang didapat (jumlah tangkapan tergantung dari kondisi alam, lama penangkapan, dan musim ikan). Jika hasil tangkapan ikan melimpah nelayan harian Cipatuguran akan melabuhkan perahu dan menjual langsung hasil tangkapan ikan di TPI PPN Palabuhanratu sebagai pusat penjualan komoditas ikan di wilayah Palabuhanratu dan sekitarnya. Namun bila hasil tangkapan tidak

sebanyak masa panen ikan, nelayan akan menjual hasil tangkapannya di TPI sekitar Cipatuguran. Ikan segar hasil akan dibeli langsung oleh pedagang, pengolah, sampai konsumen akhir.



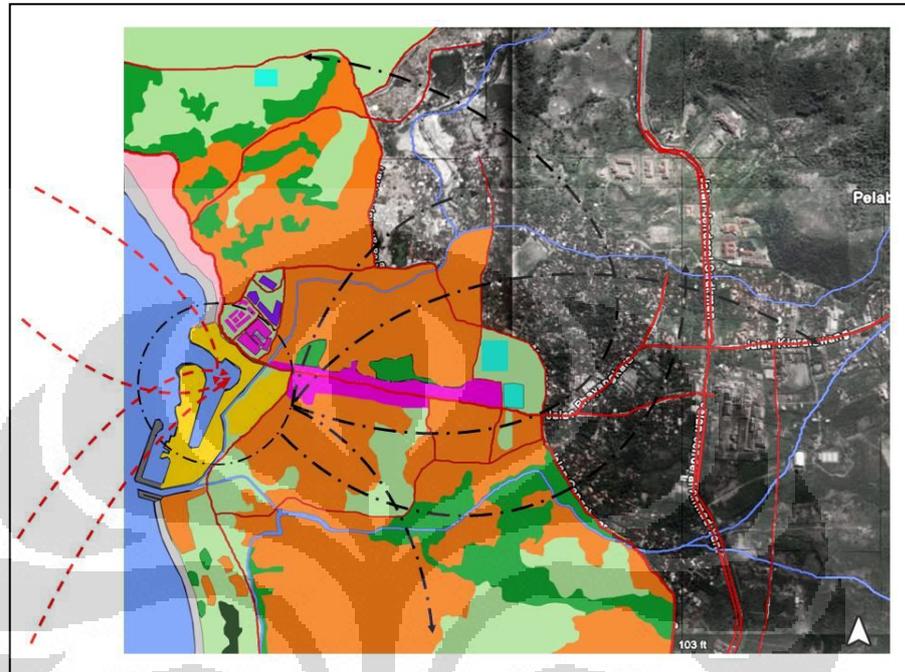
Keterangan:

- Perahu nelayan berlayar
-► Distribusi hasil tangkapan

Gambar 4.10 Zoom out A Rute Penangkapan Ikan dan Distribusi Hasil Tangkapan dari Cipatuguran
Sumber: Ilustrasi Pribadi, Desember 2011

Telah disebutkan bahwa penjualan hasil tangkapan nelayan dapat menjualnya di pasar ikan PPN Palabuhanratu maupun langsung di TPI Cipatuguran. Semua tergantung dari jumlah hasil tangkapan yang didapat oleh nelayan. wilayah distribusi hasil tangkapan dari TPI di sekitar Cipatuguran tidak seluas distribusi ikan melalui pasar ikan PPN Palabuhanratu karena keterbatasan hasil dan jaringan distribusi. Hasil tangkapan nelayan harian Cipatuguran kalah bersaing dengan nelayan-nelayan besar karena itu target penjualan hasil tangkapannya pun berbeda. Nelayan-nelayan besar hasil tangkapannya didominasi oleh ikan tuna yang merupakan komoditas ekspor di

Indonesia, berbeda dengan nelayan harian Cipatuguran yang tangkapannya didominasi oleh ikan layur.



Keterangan:
 Perahu nelayan berlayar
 Distribusi hasil tangkapan

Gambar 4.11 Zoom out B. Rute Penangkapan Ikan dari Cipatuguran menuju PPN Palabuhanratu dan Distribusi Hasil Tangkapan.

Sumber: Ilustrasi Pribadi, Desember 2011

Hasil laut (ikan) merupakan komoditas yang tidak tahan lama. Perlu penanganan khusus dalam penyimpanan selama penangkapan. Nelayan harian cipatuguran hanya berbekal box berisi es batu dan garam untuk pengawetan ikan selama di laut hingga kembali ke daratan. PPN Palabuhanratu menyediakan pabrik es untuk kebutuhan para nelayan, namun keberadaan PPN Palabuhanratu yang cukup jauh dari Cipatuguran harus ditempuh oleh kendaraan bermotor atau menggunakan ojek karena transportasi umum tidak melewati Cipatuguran, hal ini dapat menambahkan biaya operasional yang dikeluarkan nelayan.

Penjualan hasil tangkapan setelah pendaratan harus segera habis atau kemudian dipilah-pilah berapa bagian dari tangkapan yang akan diasinkan atau diolah. Biasanya yang akan diolah adalah ikan dengan kualitas nomor dua.

Sebagian besar nelayan Cipatuguran mengolah kembali hasil tangkapan seperti pengasapan, pengeringan ikan, atau pembuatan terasi yang biasa mereka lakukan di ruang-ruang terbuka seperti lapangan atau pekarangan karena sistem yang digunakan masih manual dengan memanfaatkan sinar matahari dalam prosesnya (khusus untuk pengeringan ikan) dan kemudian dijual di pasar-pasar Palabuhanratu dan sekitarnya.

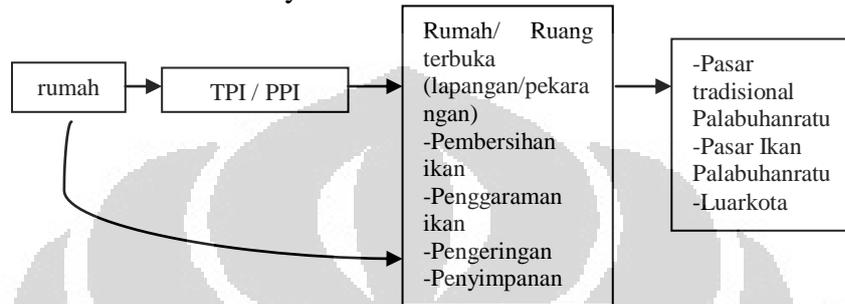
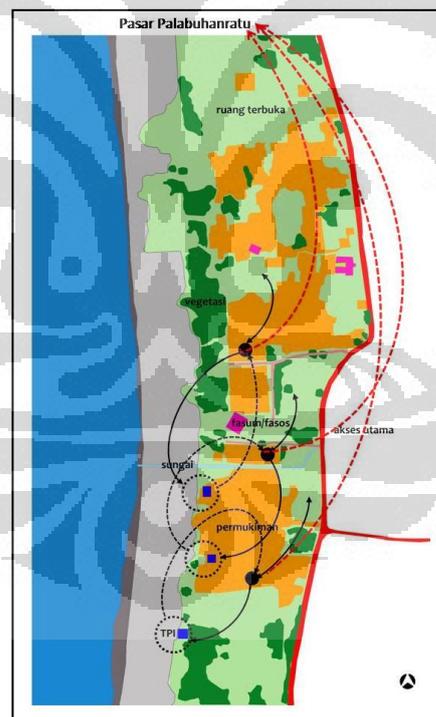


Diagram 4.7 Analisis Rute Rangkaian Kerja Unit Rumah Usaha Pengasinan Ikan Nelayan Cipatuguran



Keterangan:

-> Penjualan hasil pengolahan
- > Tempat pengolahan atau penjemuran hasil
-> Dari tempat penurunan menuju penyimpanan hasil olahan

Gambar 4.12 Rute Rangkaian Kerja Unit Usaha Rumah Pengolahan Ikan Nelayan Cipatuguran

Sumber : Ilustrasi pribadi, Desember 2011

4.2.2 Nelayan Buruh Palabuhanratu

Nelayan buruh memiliki waktu bekerja yang berbeda dengan nelayan harian di Cipatuguran. Sangat sedikit masyarakat lokal dari Palabuhanratu menjadi nelayan buruh untuk kapal-kapal besar. Sebagian besar nelayan buruh berasal dari luar Palabuhanratu, seperti berasal dari Banten, Bugis, Cirebon dan Indramayu.

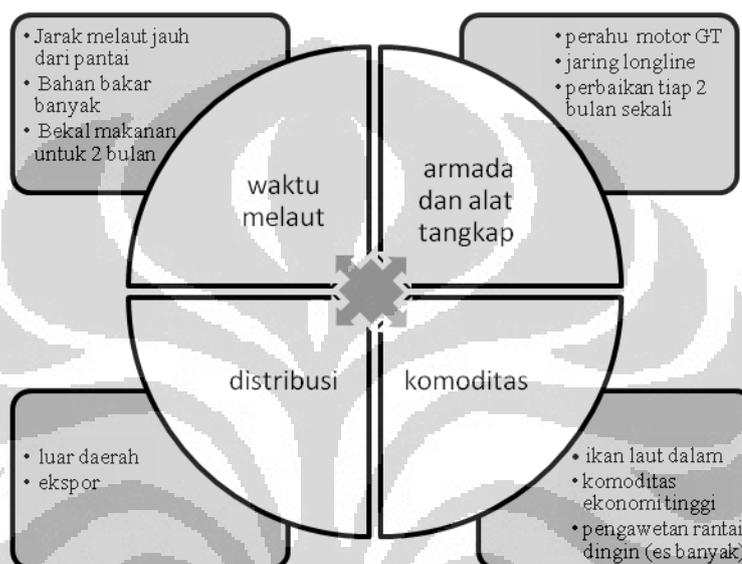


Diagram 4.8 Nelayan Buruh Palabuhanratu

Sebagian besar nelayan tangkap di PPN Palabuhanratu adalah nelayan buruh yang bekerja untuk nelayan juragan. Kapal yang digunakan oleh nelayan buruh merupakan kapal dengan muatan besar seperti kapal longline, rumpon, dan diesel dengan daya jelajah hingga tengah laut sehingga membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak dari nelayan harian karena durasi kerja berada di lautan hingga dua bulan lamanya. Komoditas ikan yang didapatkan juga merupakan ikan-ikan laut dalam seperti tuna atau tongkol yang memiliki teknik tersendiri dalam penangkapannya. Mayoritas nelayan buruh di Palabuhanratu hidup di kapal atau mengontrak rumah dekat lokasi PPN Palabuhanratu bagi nelayan buruh diluar wilayah Palabuhanratu, dan untuk nelayan buruh dari sekitar

Palabuhanratu akan memilih kembali ke rumahnya selepas dari laut hingga datang panggilan untuk melaut kembali dari nelayan juragan.

Sebelum melakukan penangkapan di laut anggota kelompok nelayan memiliki pembagian kerja yang berbeda-beda sesuai instruksi yang diberikan oleh nelayan juragan (pemilik kapal) atau kesepakatan bersama antar kelompok. Pembagian kerja nelayan yang melaut menggunakan perahu besar cukup kompleks. Anggota perahu besar berkisar antara 5-8 orang dengan sistem pembagian tugas sebagai berikut :

1. Pemilik perahu, tugasnya mempersiapkan dan mengatur segala keperluan di laut, biasanya pemilik perahu tidak ikut melaut.
2. Juru mudi merupakan sosok yang memiliki tanggung jawab paling besar. Ia sosok yang memerankan pimpinan di laut karena paling menguasai segala hal tentang laut termasuk menentukan dimana, kapan, dan bagaimana melakukan aktivitas penangkapan. Juru mudi adalah orang yang paling berkuasa di atas perahu, termasuk pemilik perahu jika turut melaut adalah dibawah perintahnya.
3. Petawuran bekerja menebar jaring.
4. Pengawas adalah orang yang mengawasi keberadaan ikan, sehingga ia harus berdiri di tempat yang tinggi.
5. Juru batu adalah orang yang khusus membersihkan perahu dan menarik jaring ikan.

Hubungan sesama nelayan, kerja sama di lingkungan kelompok ini terjalin sangat erat, disamping didorong oleh faktor saling membutuhkan juga melibatkan aspek kepercayaan dan aspek emosional. Namun diluar lingkungan ini, pola hubungan antar manusia tidak sekaku gambaran di atas, karena ketika berada di laut meski tiap individu memiliki tugas utama, mereka tetap saling membantu satu sama lainnya.

Ada dua konsep yang menerangkan mobilitas geografis masyarakat pesisir. Pertama, gerakan penyebaran dari pusat yang menjadikan para anggotanya tersebar, memisahkan diri dari lembah atau pulau mereka, untuk

sementara waktu atau untuk selama-lamanya, dimana mereka berjuang tanpa lelah mencari kepandaian atau kekayaan baru. Kedua, selalu memusatkan diri atau berorientasi ke pusat, karena mereka selalu berusaha merangkul para anggotanya dan tidak dibiarkan pergi keluar (Geertz, 1981: 58-59).

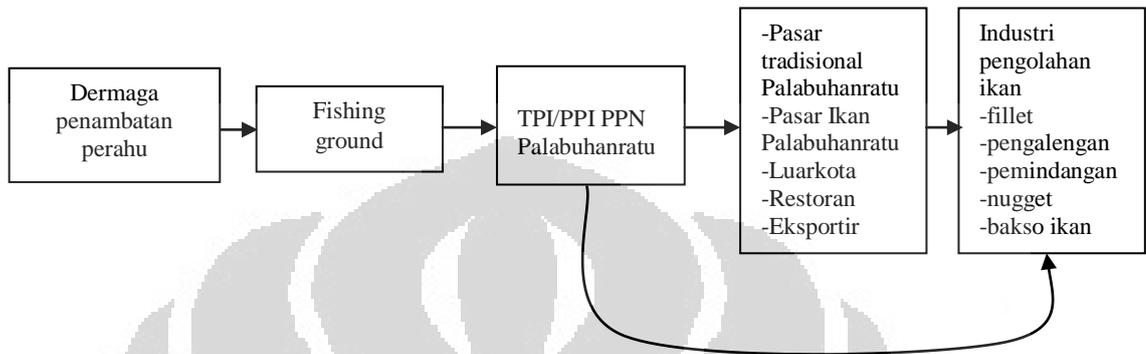
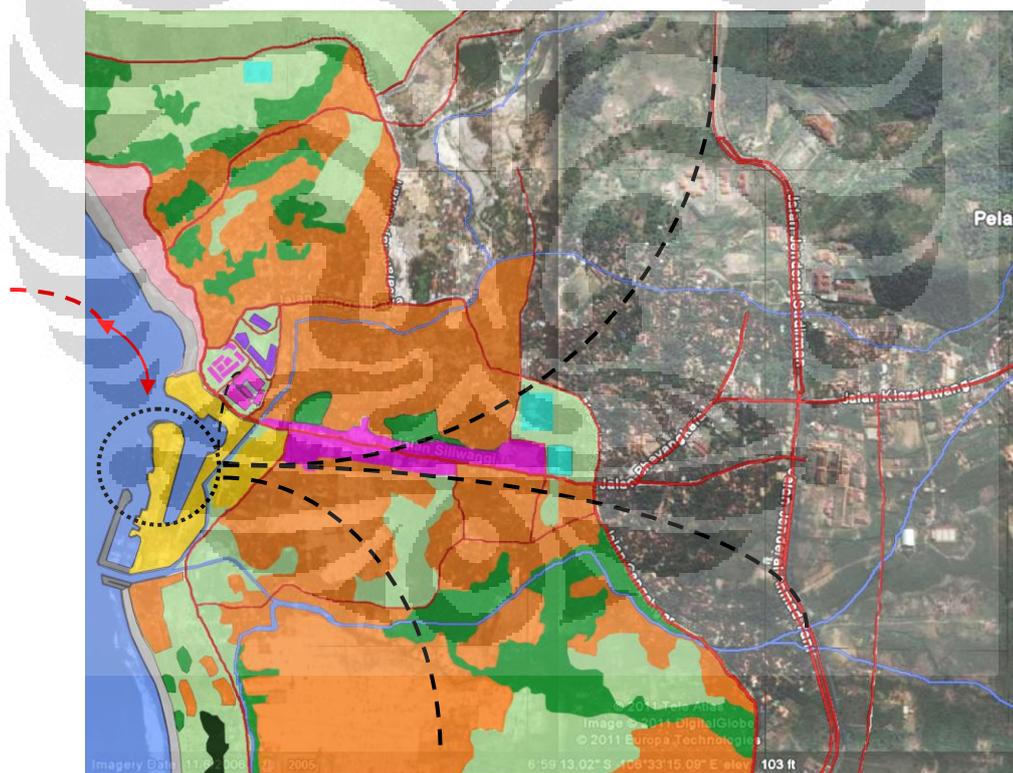


Diagram 4.9 Analisis Rute Rangkaian Kerja kelompok nelayan PPN Palabuhanratu



-➔ Arah datang dan pergi kapal nelayan berlayar
-➔ Distribusi hasil tangkapan laut

Gambar 4.13 Rute Rangkaian Kerja kelompok nelayan PPN Palabuhanratu dan Distribusi hasil tangkapan
Sumber: Ilustrasi Pribadi, Desember 2011

Kelompok nelayan buruh bekerja di laut hingga dua bulan lamanya, hal ini dipastikan kapal harus bisa menampung kebutuhan hidup nelayan, biasanya ditengah laut telah ada bagan untuk nelayan tinggal selama di laut selain sebagai tempat penanda rumpon ditanam (khusus bagi perahu rumpon). Kapal pun dilengkapi oleh sistem pendingin untuk membekukan hasil tangkapan agar tetap segar dan awet hingga diturunkan di tempat penurunan ikan PPN Palabuhanratu. PPN Palabuhanratu telah menyediakan es curah dan coolbox untuk kebutuhan nelayan melaut, bengkel perahu bagi nelayan untuk melakukan perawatan perahu mereka, serta SPBN untuk menyediakan bahan bakar bagi perahu.

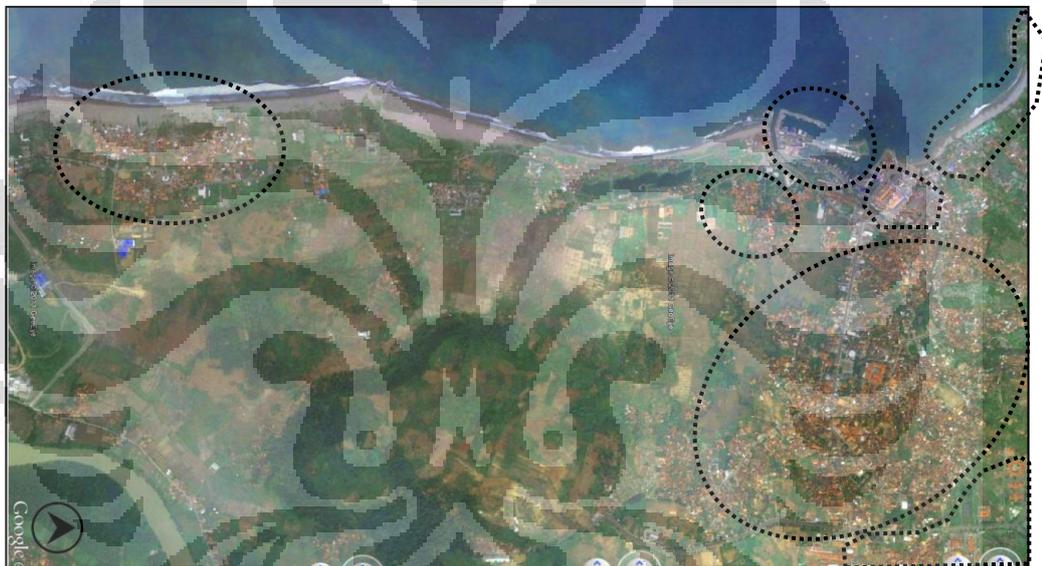
Pelelangan ikan dilakukan di kawasan PPN Palabuhanratu agar memudahkan dalam menghitung jumlah ikan masuk perharinya, mengkoordinasikan antara pihak nelayan dan pembeli/pedagang, dan meminimalisasikan dominasi perlele yang kerap kali merugikan nelayan-nelayan kecil. Distribusi hasil tangkapan di PPN mencakup luar wilayah Palabuhanratu bahkan terdapat perusahaan eksportir untuk mengkespor ikan tuna ke Jepang dan USA. Pihak PPN Palabuhanratu juga menyediakan tempat bagi pabrik industri pengolahan fillet dan pemindangan hasil tangkapan agar jarak tempuh dari TPI menuju letak industri lebih dapat dijangkau. Pengangkutan hasil tangkapan ikan akan melibatkan buruh angkut di Palabuhanratu. Sebelum pukul 08.00 pagi para buruh angkut yang datang dari sekitar bahkan luar Palabuhanratu telah siap di PPN Palabuhanratu. Mereka bertugas mengangkut hasil tangkapan yang telah diturunkan dari kapal menuju tempat pelelangan ikan, tempat industri pengolahan, pasar hingga truk-truk yang telah siap mengangkut hasil tangkapan untuk didistribusikan. Disinilah jaringan jalan dan moda transportasi sangat penting bagi keberlangsungan distribusi hasil tangkapan dan kegiatan perikanan di Palabuhanratu.

Sesuai dengan kriteria kawasan Minapolitan yang telah diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa untuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan telah tersedia infrastruktur awal yakni pelabuhan perikanan dan tersedia infrastruktur kota yang memadai (jaringan listrik, BBM,

air bersih, jalan utama). Namun bila seluruh elemen yang menunjang kegiatan perikanan tidak terintegrasi maka yang ada hanyalah kota pesisir pada umumnya.

4.2.3 Infrastruktur Sebagai Penunjang Kegiatan Perikanan Bagi Minapolitan

Prasarana atau infrastruktur menurut Jayadinata (1999: 31) adalah alat (mungkin tempat) yang paling utama dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi. Sedangkan sarana merupakan alat pembantu dalam prasarana itu. Baik prasarana maupun sarana tidak bisa terlepas satu dengan yang lain, sehingga keduanya mesti dipahami sebagai satu kesatuan.



Gambar 4.14 Perkembangan Infrastruktur Kawasan Palabuhanratu
Sumber : Google Earth, 2006

Sarana dan prasarana (jaringan jalan, tempat pembuangan sampah sementara, toilet umum di kawasan wisata, pasar dan terminal) yang mendukung aktivitas pesisir belum sepenuhnya baik. Sehingga mempengaruhi kegiatan perikanan dan perekonomian yang dilakukan masyarakat pesisir. Masalah tersebut mengindikasikan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produktivitas sumber daya pesisir. Dan penambahan sarana prasarana yang sesuai dengan daya dukung lingkungan pesisir.

Jaringan jalan sebagai modal penting untuk menghubungkan Palabuhanratu dengan kawasan sekitar memang telah berkembang dengan baik namun pengadaan transportasi umum di kawasan ini masih sangat rendah. Dari gambar di atas dapat terlihat jelas infrastruktur hanya berkembang di kawasan utara Palabuhanratu, di kawasan selatan hanya terdapat satu akses utama yang menghubungkan bagian selatan ke pusat kota Palabuhanratu (bagian utara) akan tetapi sarana transportasi darat tidak melewati jalan tersebut karena sepanjang Jalan Cipatuguran belum berkembang seperti bagian utara. Terlihat jelas kondisi nyata di lapangan bahwa terjadi ketimpangan pembangunan antara bagian selatan dan utara, sedangkan di bagian selatan didominasi oleh nelayan-nelayan harian Palabuhanratu. Ketimpangan ini dapat menghambat kegiatan perikanan di Palabuhanratu, masyarakat dan nelayan di bagian selatan Palabuhanratu kesulitan mengakses bagian utara (pusat kegiatan perikanan) karena sarana transportasi yang terbatas. Hakikat Minapolitan adalah adanya keterpaduan antar wilayah yang memiliki kegiatan perikanan yang saling mendukung, sehingga kawasan pesisir lebih produktif dan memiliki keunggulan ekonomi dalam kegiatan perikanan.

Supply air bersih bagi kawasan ini mencukupi karena topografi yang berbukit dan tidak adanya daerah payau menyebabkan air tanah pada kawasan ini dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk di kawasan pesisir pantai (tidak termasuk untuk masak dan minum). Keberadaan fasilitas pendidikan belum mampu mencakup seluruh masyarakat Palabuhanratu. Terutama fasilitas pendidikan bagi anak usia dini. Banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Sukabumi hal itu karena, diakui oleh masyarakat sekitar, fasilitas pendidikan masih belum sebaik yang ada di Kabupaten.

4.3 Kesimpulan Pembahasan

Pola spasial kawasan pesisir di Palabuhanratu sangat tergantung dengan kondisi geografis dan kegiatan masyarakat didalamnya. Interaksi masyarakat terhadap ruang menciptakan pola spasial yang khas bagi kawasan pesisir. Kegiatan masyarakat yang berorientasi pada ruang-ruang terbuka dan pantai dikarenakan kegiatan mereka yang cenderung selalu ingin dekat dengan pantai, hal ini lah yang menyebabkan pertumbuhan kawasan permukiman nelayan mengarah ke pesisir/pantai dan mengambil area konservasi dan greenbelt bagi kawasan pesisir. Hilangnya greenbelt di pesisir pantai permukiman Cipatuguran menyebabkan permukiman ini rentan terkena dampak bencana alam dan air pasang laut yang bisa mengakibatkan abrasi pantai. Palabuhanratu belum ada perangkat-perangkat keras untuk mengantisipasi bencana gempa dan tsunami yang mengancam kawasan Palabuahratu.

Pola spasial gagasan Minapolitan dapat dilihat dari kegiatan perikanan yang terjadi di Palabuhanratu terutama kegiatan nelayan. Kegiatan nelayan perorangan sebagai nelayan harian membentuk spasial yang memiliki keterkaitan dengan elemen masyarakat lainnya yang mendukung kegiatan perikanan seperti pedagang hingga wisatawan.

Keterkaitan antara satu elemen masyarakat dengan lainnya saling menunjang yang masing-masing membutuhkan akses menuju ruang-ruang kegiatan perikanan yang dialami oleh tiap elemen masyarakat. Bagaimana nelayan dapat mengakses laut sebagai daerah kerja dari tempat penambatan perahu menuju tempat penurunan ikan dan permukiman. Tempat pendaratan dan pelelangan ikan yang dapat diakses oleh pedagang, nelayan, dan pengolah hasil tangkapan. Begitu juga dengan kegiatan nelayan buruh atau nelayan kelompok besar sebagai nelayan yang berdasar kan wilayah kerja lebih lama hidup di laut daripada hidup di daratan membentuk spasial yang memiliki keterkaitan dengan elemen masyarakat lainnya yang mendukung kegiatan perikanan seperti pedagang hingga wisatawan.

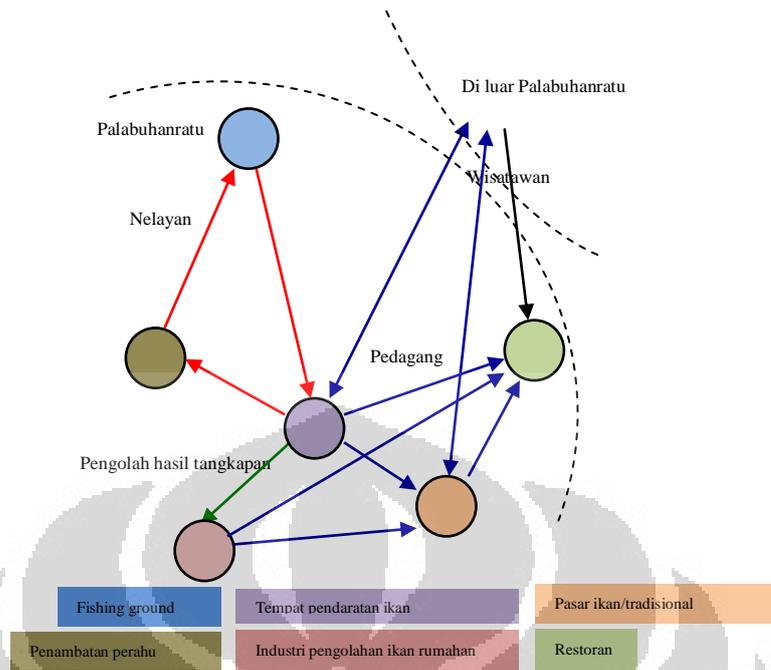


Diagram 4.10 Kegiatan perikanan nelayan harian Palabuhanratu dan kaitannya dengan elemen masyarakat pendukung kegiatan perikanan

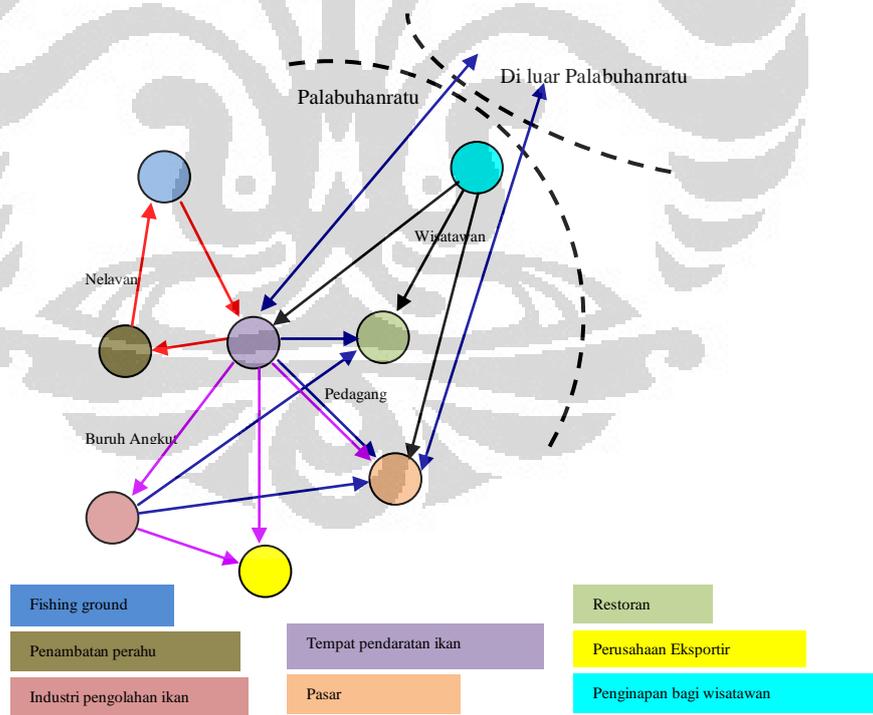


Diagram 4.11 Kegiatan perikanan nelayan buruh Palabuhanratu dan kaitannya dengan elemen masyarakat yang mendukung kegiatan perikanan didalamnya

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Palabuhanratu sebagai *pilot project* gagasan Minapolitan memiliki ruang interaksi kegiatan yang saling mempengaruhi. Ruang interaksi yang terjadi timbul karena kegiatan utama masyarakat pesisir. Pola interaksi ruang yang kuat dapat dilihat dari kondisi eksisting seperti ruang terbuka di bagian selatan yang tetap dipertahankan sebagai tempat aktivitas perikanan tradisional skala kecil, seperti penambatan perahu, penurunan ikan, pengolahan hasil tangkap hingga sebagai tempat menyimpan peralatan tangkap. Pola perilaku hidup masyarakat cenderung memilih tinggal di dekat pantai dengan tujuan mempermudah akses menuju laut. Kondisi alam seperti angin barat yang bertiup kencang sepanjang tahun menumbuhkan kearifan lokal masyarakat berupa tata bangunan yang tidak langsung menghadap ke arah laut. Aktivitas perikanan dalam skala besar terpusat di Utara sebagai kawasan inti minapolitan. Kondisi geografis di utara yang jauh dari pantai dan tidak memiliki ketergantungan akses menuju pantai, pola interaksi ruang yang terlihat dari kondisi eksisting adalah terbentuknya permukiman yang mengikuti akses/jalan utama. Tepat pada barisan utama sepanjang akses utama bermunculan ruko-ruko sebagai kawasan perekonomian yang mendukung kegiatan perikanan. Interaksi kegiatan yang berbeda di bagian utara dan bagian selatan dapat saling mendukung dalam membentuk kawasan Minapolitan.

Program kebijakan pengembangan Palabuhanratu sebagai kawasan Minapolitan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan khususnya di kawasan inti minapolitan. Elemen spasial kegiatan perikanan yang sudah ada di Palabuhanratu yang masih terpusat di bagian utara. Elemen-elemen ini terdiri dari infrastruktur awal Pelabuhan Perikanan Nusantara yang didalamnya didukung oleh persediaan BBM melalui SPBN, air bersih, jaringan listrik dan bengkel kapal. Unit pengembangan ekonomi kegiatan perikanan didukung oleh tempat pendaratan dan pelelangan ikan, pasar ikan

modern dan restoran ikan, industri pengolahan skala kecil, pranata sosial seperti balai-balai penyuluhan perikanan dan kelompok usaha bersama nelayan. Kondisi berbeda terlihat di bagian selatan seperti masih banyaknya area terbuka yang dapat dikembangkan untuk perikanan darat berupa tambak ikan untuk mengantisipasi musim paceklik. Selain itu, pengembangan menjadi kawasan wisata bahari dengan mengoptimalkan akses utama yang telah ada dan menambahkan fasilitas yang menunjang kegiatan wisata dapat melengkapi dan mendukung kawasan Palabuhanratu sebagai kawasan minapolitan. Sehingga bagian utara dan selatan Palabuhanratu dapat saling terintegrasi dan mendukung kegiatan perikanan dengan optimal.

Palabuhanratu sebagai kawasan minapolitan berkembang membutuhkan beberapa elemen spasial yang akan saling mempengaruhi. Pertama adalah kondisi geografis dan eksisting seperti keberadaan laut dan pesisir sebagai akses utama menuju ke laut dan kembali dari laut. Kedua, infrastruktur seperti akses jalan, transportasi udara, darat, dan laut yang memadai untuk mempermudah distribusi komoditas ekspor maupun lokal. Pelabuhan perikanan sebagai sentra kegiatan perikanan, dermaga berlabuh kapal yang dapat dijangkau oleh masyarakat nelayan tradisional maupun nelayan besar. Tempat pelelangan ikan dan pendaratan ikan, unit usaha industri pengolahan, jaringan listrik, air bersih, pengelolaan sampah, dan suplai BBM yang mencukupi kebutuhan kota. Ketiga, sistem dan penyediaan evakuasi bencana kawasan pesisir pantai di Palabuhanratu dan penunjang kegiatan perikanan inti seperti pengembangan kawasan wisata bahari.

5.2 Saran

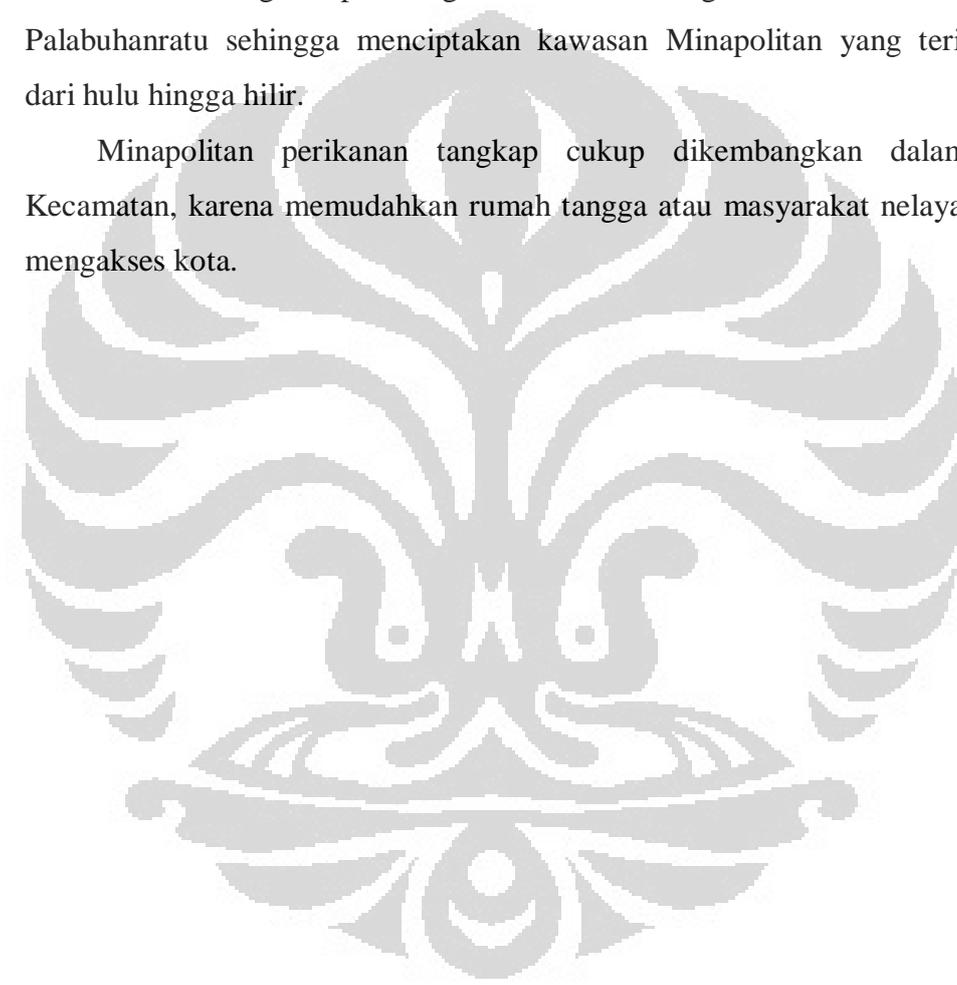
Menentukan *building code*, dengan menggunakan struktur rumah panggung bagi bangunan di pesisir pantai sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman air rob/pasang air laut dan gelombang tsunami.

Membangun dan menentukan bangunan yang dapat digunakan sebagai *escape building* dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan kondisi gelombang tsunami yang pernah menghantam wilayah-wilayah di Indonesia.

Mengembangkan wisata mina bahari untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan dapat sebagai lahan pekerjaan bagi nelayan jika terjadi masa-masa paceklik ikan.

Kesinambungan pembangunan antara bagian selatan dan utara Palabuhanratu sehingga menciptakan kawasan Minapolitan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Minapolitan perikanan tangkap cukup dikembangkan dalam skala Kecamatan, karena memudahkan rumah tangga atau masyarakat nelayan untuk mengakses kota.



DAFTAR REFERENSI

- Adriyani, F. (2004). *Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan : Studi Kasus Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur*. Skripsi (tidak diterbitkan). Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Branch, Melville C. (1996). *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan*. (Penerjemah Wibisono, Bambang P. & Djunaedi, Achmad). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Burhanuddin, Andi Iqbal. (2011). *The Sleeping Giant: Potensi dan Permasalahan Kelautan*. Yogyakarta: Brilian Internasional
- Budihardjo, Eko. (1997). *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni
- Butuner, Bas. (2006). *Waterfront Revitalization as a Challenging Urban Issue, 42nd ISoCaRP Congress*. http://www.isocarp.net/Data/case_studies/792.pdf diakses pada 20 Mei 2011 pukul 22.45
- Clark, Jhon R. (1996). *Coastal Zone Management Handbook*. New York : Lewis Publisher
- Dahuri. et al. (2001). *Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pt Pradnya Paramita.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. (2010). *Pengembangan Kawasan Minapolitan Palabuhanratu Berbasis Perikanan Tangkap*.
- Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Keci, Kementrian Kelautan dan Perikanan. *Rencana Strategis Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2010-2014*
- Direktorat Jendral Perikanan tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2010). *Program Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Sukabumi*.
- Doxiadis, C., (1967), *Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements*. London: Hutchinson
- Doxiadis, C. (1970). *Ekistics, the Science of Human Settlements*. From Science, v.170, no.3956, October 1970, p. 393-404: 21 fig. http://www.doxiadis.org/files/pdf/ecistics_the_science_of_human_settlements.pdf diakses pada 8 November 2011 pukul 20:07
- Geertz, Hildred. (1981). *Aneka Budaya Dan Komunitas Di Indonesia* (terj.), Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FS UI.

- Jacobs, Allan B. (1993). *Great Streets*. Massachusetts: MIT Press
- Jayadinata, Johara T. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB Bandung.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/Men/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Koentjaraningrat. (1990). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat
- Kostof, Spiro. (1991). *The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History*. London: Bulfinch Press
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Moeis, Syarif. (2008). *Adaptasi Ekologi Masyarakat Pesisir Selatan Jawa Barat Suatu Analisa Kebudayaan*. Makalah Disajikan dalam diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. SEJARAH/195903051989011-SYARIF MOEIS/MAKALAH_8.pdf diakses pada 20 Mei 2011 pukul 22:45
- Mulyandari, Hestin. (2011). *Pengantar Arsitektur Kota*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Pangardjito. (1999). *Pola Tata Ruang Permukiman Nelayan Tambak Lorok Semarang dan Bendar-Bajomulyo Juwana*. Tesis (tidak diterbitkan). Semarang: Universitas Diponegoro
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Profil Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2010
- Riskayanti, Gita, Miftah Farid, Nadya Putri Utami. (2010). *Penggunaan Lahan Geomer 4 Desa Citepus*. Laporan Kerja Lapangan (tidak diterbitkan). Departemen Geografi Fakultas MIPA, Universitas Indonesia
- S, Mulyadi. (2005). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soesanti, et al. (2006). *Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 34, No. 2, Desember 2006: 115 – 121*. <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=ARS> diakses pada 20 Mei 2011 pukul 22:45
- Sunoto. *Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan Di Indonesia*. http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi2%20pdf2c.pdf diakses pada 27 Desember 2011 pukul 20.00
- Suprijanto, Iwan. (*Karakteristik Spesifik, Permasalahan Dan Potensi Pengembangan Kawasan Kota Tepi Laut/Pantai (Coastal City) Di Indonesia*. Proceeding - Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global <http://sim.nilim.go.jp/GE/SEMI2/Proceedings/Makalah%2016.doc>. diakses pada 20 Mei 2011 pukul 22:45
- Taylor, Lee. (1980). *Urbanized Society*. California: Good Year Company inc.
- Toha-Sarumpaet, R.K dkk. (2007). *Pembangunan Perdesaan dan Daerah Pesisir Pada Era Millenium III*. Jakarta: UI Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Wati, Masrul. (2007). *Perancangan Kawasan Waterfront Dumai sebagai Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Wisata (Studi Kasus Kawasan Pelindo, Jl. Datuk Laksmana Dumai-Riau)*. Tesis (tidak diterbitkan). Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Yunus, Hadi Sabari. (2001). *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.